# KESENJANAGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MADRASAH SWASTA

## (Studi Multi Kasus Di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo Ponorogo)

**TESIS**


**SUNANDAR**

**NIM : 505230026**

**PROGRAM MAGISTER**

**PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAR ISLAM NEGERI**

**KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI**

**PONOROGO**


**2026**


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

# ABSTRAK

**Sunandar, 2026**. Kesenjangan Implementasi Kurikulum Madrasah Swasta (Studi Multi Situs di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo). Tesis. Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., Pembimbing II : Dr. Iswahyudi, M.Ag.

**Kata Kunci** : Kurikulum, Kesenjangan, Implementasi, Madrasah Ibtidayah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan implementasi kurikulum pada madrasah swasta serta faktor-faktor yang mempengaruhinya di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya dinamika perubahan kebijakan kurikulum, seperti Kurikulum 2013, Kurikulum Merdeka dan Kurikulum Berbasis Cinta, yang menuntut kesiapan madrasah dalam menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi multi situs.Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari Kepala Madrasah, guru, serta pihak yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kurikulum di kedua Madrasah telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, namun masih terdapat kesenjangan antara perencanaan kurikulum dan praktik pembelajaran di kelas. Kesejangan implementasi kurikulum di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah kesiapan perangkat pembelajaran yang belum sepenuhnya memadai, di mana perangkat yang disusun belum sepenuhnya disesuaikan dengan karakteristik siswa dan kondisi madrasah. Hal ini berdampak pada belum maksimalnya penerapan pembelajran yang sesuai dengan tujuan kurikulum nasioanal belum sepenuhnya tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi guru, penguatan supervisi akademik, serta dukungan sarana prasarana agar implementasi kurikulum di madrasah dapat berjalan lebih efektif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Setelah memulai pengkajian dan telaah mendalam dalam peoses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **SUNANDAR, NIM 505230025** yang berjudul: " **Kesenjangan Implementasi Kurikulum Madrasah Swasta (Studi Multi Kasus di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'rif Polorejo Ponorogo)**" maka tesis ini sudah dipan-dang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada siding Majelis Munaqahah Tesis.

Ponorogo, 12 Februari 2026

| Pembimbing I. | Pembimbing II. |
|---|---|
| **Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag.** | **Dr. Iswahyudi, M.Ag.** |
| **NIP. 197409092001220001** | **NIP. 197903072003121003** |

Mengetahui Kaprodi
Magister Pendidikan Agama Islam
Universitas Islam Negeri Ponorogo

**Dr. Mambaul Ngadhimah, M.Ag.**
**NIP. 197402041998032009**

NIM 505230025 MAHASISWA UIN PONOROGO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO
Alamat : Jl. Pramuka 156, Ronowijayan, Siman, Ponorogo 63471 Website: https://pasca.uinponorogo.ac.id Email: pasca@uinponorogo.ac.id

## KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Sunandar, NIM 505230026, Program Magister Program Studi Pendidikan Agama Islam** dengan judul: ***"Kesenjangan Implementasi Kurikulum Madrasah Swasta (Studi Multi Situs di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo)"*** telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis Munáqashah Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo pada **Hari Senin, tanggal 6 April 2026** dan dinyatakan **LULUS.**

**DEWAN PENGUJI**

| No | Nama Penguji | Tanda Tangan | Tanggal |
|---|---|---|---|
| 1 | **Dr. Mambaul Ngadhimah, M.Ag.**<br>**NIP 197402041998032009**<br>Ketua Sidang | | 21/5-2026. |
| 2 | **Prof. Dr. Mukhibat, M.Ag.**<br>**NIP 197311062006041017**<br>Penguji Utama | | 21/05 2026 |
| 3 | **Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag.**<br>**NIP 19740909200122001**<br>Penguji 2 | | 19 mei 2026 |
| 4 | **Dr. Iswahyudi, M.Ag.**<br>**NIP 197903072003121003**<br>Sekretaris | | 21 Mei 2026. |

Ponorogo, 20 April 2026
Direktur Pascasarjana,

**Prof. Dr. Agus Purnomo, M.Ag.**
**NIP 197308011998031001**

UIN KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

**SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUNANDAR

NIM : 505230026

Frogram Studi : Magister Pendidikan Agama Islam

Judul Tesis : **"Kesenjangan Implementasi Kurikulum Madrsah Swasta (Stadi Multi Situs Di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo)"**

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikn oleh perpustakaan UIN Ponorogo yang dapat diakses di ***etheses.iainponorogo.ac.id.*** Adapun ini dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari peneliti. Demikian peryataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 12 Februari 2026

Penulis

Sunandar

NIM : 505230026

PONOROGO

## PERYATAAN KESLIAN TULISAN

Dengan ini, saya. **Sunandar, NIM 505230026, Program Magister Proram Studi Pendidikan Agama Islam** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: **" Kesenjangan Implementasi Kurikulum Madrasah (Studi Multi Situs Di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo Ponorogo)"** ini merupakan hasil kaya madiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan rujuakannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia memper-tanggugjawabkanya secara akademik da secara hukum.

Ponorogo, 12 Februari 2026

Yang membuat peryataan

Sunandar

NIM. 505230026

PONOROGO

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Di Indonesia, madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki peran yang signifikan dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Selain itu kurikulum yang diterapkan di madrasah negeri dan swasta juga sangat berperan sebagai fondasi utama dalam menentukan arah, mutu, dan relevansi pendidikan yang diberikan kepada peserta didik. Dasar normatif pentingnya penerapan kurikulum di madrasah negeri dan swasta didasarkan pada beberapa regulasi dan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum pelaksanaan pendidikan di Indonesia, khususnya di lingkungan madrasah. Terdapat didalam UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional yang mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan nasional secara terpadu, termasuk madrasah sebagai satuan pendidikan formal yang setara dengan sekolah umum.[1]

Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum-13 pada Madrasah yang memberikan panduan teknis dan standarisasi pelaksanaan kurikulum di madrasah negeri dan swasta, implementasi kurikulum di MI dapat dilakukan antara lain : Menambahkan

[1] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional," Pub. L. No. 20 (2003), https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU20-2003Sisdiknas.pdf.

beban belajar berdasarkan pertimbangan kebutuhan peserta didik dan kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan ketersedian waktu, Merelokasi jam pelajaran pada mata pelajaran tertentu untuk mata pelajaran lainya sebanyak-banyaknya 6 jam pelajaran untuk keseluruhan relokasi, menyelenggarakan pembelajaran terpadu (*integrated learning*) dengan pendekatan kolaboratif.[2]

*J. Galen Saylor and William Alexander in his book Curriculum Planning for Better Teaching and Learning The sum total of the school's efforts to influence learning, whether in the classroom, on the playground, or out of school. Whether the efforts result in the learnings that teachers desire depends on the many factors which affect the individual pupil's interaction with the situations arranged. Whether the experiences had correlated or conflict with those that pupils have outside the school must also be answered for each individual. The significant conclusion for the teachers is that everything they do to stimulate and direct pupils' experience and subsequent learning must be considered in curriculum planning.*[3]

J. Galen Saylor dan William Alexander dalam bukunya *Curriculum Planning for Better Teaching and Learning* menyatakan bahwa kurikulum merupakan keseluruhan usaha sekolah untuk mempengaruhi proses belajar, baik di dalam kelas, di halaman sekolah, maupun di luar sekolah. Apakah usaha tersebut menghasilkan pembelajaran sebagaimana yang diharapkan guru sangat bergantung pada banyak faktor yang mempengaruhi interaksi peserta didik dengan situasi yang diatur. Apakah pengalaman belajar tersebut selaras atau justru bertentangan dengan pengalaman yang dimiliki peserta didik di luar sekolah juga harus dijawab secara individual. Kesimpulan penting bagi guru adalah bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan untuk merangsang dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[2] "Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 Tentang Kurikulum Pada Madrasah," Pub. L. No. 184 (2019), https://www.mtsypkpsentani.sch.id/read/5/kma-184-tahun-2019-pedoman-implementasi-kurikulum-pada-madrasah.

[3] William M. Alexander and J Galen Saylor, *Curriculum Planning for Better Teaching and Learning* (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1954), 5.

mengarahkan pengalaman serta pembelajaran peserta didik selanjutnya harus dipertimbangkan dalam perencanaan kurikulum.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum Permendikbud No.81A/2013 mengatur tahap pelaksanaan Kurikulum 2013 secara nasional dan memuat pedoman implementasi, termasuk lampiran-lampiran yang berisi: pedoman penyusunan dan pengelolaan kurikulum tingkat satuan pendidikan, pedoman pengembangan muatan lokal, pedoman kegiatan ekstrakurikuler, pedoman umum pembelajaran, dan pedoman evaluasi kurikulum. Ketentuan ini penting karena memberikan panduan praktis pelaksanaan K-13 di lapangan dan mengatur pelaksanaan bertahap mulai tahun pelajaran 2013/2014.[4]

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Permendikbud No.67/2013 memberikan pedoman teknis bagi penyusunan Kurikulum 2013 pada tingkat SD/MI. Dokumen ini menjabarkan landasan filosofis, sosiologis, psiko pedagogis, serta struktur kurikulum (misalnya: kompetensi inti, kompetensi dasar, mata pelajaran, muatan lokal, dan beban belajar). Bagi MI, Permendikbud ini menjadi acuan utama dalam merancang struktur kurikulum tingkat satuan pendidikan sambil mempertimbangkan karakteristik madrasah.[5]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[4] Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013, 2013, https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/Permendikbud81A-2013ImplementasiK13Lengkap.pdf.

[5] Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013, 2013, https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/Permendikbud67-2013KD-StrukturKurikulum-SD-MI.pdf.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013 dan Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 merupakan dua regulasi penting yang saling melengkapi dalam implementasi Kurikulum 2013 di tingkat Sekolah Dasar maupun Madrasah Ibtidaiyah. Permendikbud No.67/2013 memberikan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang mencakup landasan filosofis, sosiologis, serta psiko pedagogis, termasuk rumusan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan struktur mata pelajaran.[6] Sementara itu, Permendikbud No.81A/2013 berfungsi sebagai pedoman implementatif yang mengatur tahapan pelaksanaan kurikulum, pengembangan muatan lokal, kegiatan ekstrakurikuler, pembelajaran, serta evaluasi. Dengan demikian, kedua regulasi tersebut bersama-sama menjadi dasar yang utuh bagi satuan pendidikan, khususnya Madrasah Ibtidaiyah, untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Kurikulum 2013 sesuai dengan karakteristik peserta didik dan kebutuhan madrasah.[7]

Kesenjangan implementasi kurikulum pada madrasah swasta terjadi ketika terdapat perbedaan yang signifikan antara kebijakan kurikulum yang dirumuskan secara formal oleh pemerintah maupun lembaga pendidikan dengan praktik pelaksanaannya di tingkat satuan pendidikan. Salah satu faktor yang menyebabkan munculnya kesenjangan tersebut adalah banyaknya titik pengambilan keputusan serta aktor yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan kurikulum, baik di tingkat pusat, daerah, maupun madrasah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

---

[6] *Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013*, 2013, https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/Permendikbud67-2013KD-StrukturKurikulum-SD-MI.pdf.

[7] *Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013*, 2013, https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/Permendikbud81A-2013ImplementasiK13Lengkap.pdf.

Semakin banyak pihak yang terlibat, seperti pengawas madrasah, kepala madrasah, guru, komite, dan lembaga pengelola di bawah LP Ma'arif NU, maka semakin besar pula potensi terjadinya hambatan koordinasi, perbedaan pemahaman terhadap substansi kurikulum, serta resistensi terhadap perubahan. Kondisi tersebut berimplikasi pada tidak tercapainya tujuan kurikulum sebagaimana yang telah dirancang, baik dalam aspek peningkatan mutu pembelajaran maupun penguatan karakter Islami. Fenomena ini tampak pada pelaksanaan kurikulum di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo Ponorogo, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan formal dan praktik implementasinya di lapangan.[8]

Kondisi tersebut menyebabkan munculnya kesenjangan dalam implementasi kurikulum antara madrasah swasta. Kesenjangan ini tidak hanya berdampak pada kualitas pembelajaran, tetapi juga berpengaruh terhadap mutu lulusan dan pencapaian tujuan pendidikan. Beberapa madrasah swasta mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan kurikulum ke dalam kegiatan belajar mengajar yang sesuai standar, terutama dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Penelitian ini difokuskan pada kedua madrasah ibtidaiyah yakni MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo , MI Ma'arif Mojorejo yang merupakan pendidikan Islam swasta yang berada dalam naungan Yayasan Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (BPPPMNU) Cabang Ponorogo yang memiliki visi :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[8] Jeffrey L. Pressman and Aaron Wildavsky, *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland* (Los Angeles: Universitas Of California Press, 1984). 88.

Terwujudnya madrasah yang islami, berprestasi, berbasis iptek, berlandaskan imtaq yang sesuai dengan dinamika Pendidikan.

Juga memiliki misi : meningkatkan prestasi akademik dan nonakademik, meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta didik dalam menghadapi tantangan zaman serta mengembangkan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan ideal, mengoptimalkan pengamalan ajaran agama menuju anak soleh secara ketat dan berkelanjutan, mampu memahami syariat Islam dan giat beramal sholeh, berkepribadian Iman dan Taqwa dan berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki lingkungan nyaman dan kondusif untuk belajar. Di MI Ma'arif Mojorejo ini memiliki persentase kelulusan yang cukup baik karena bisa dikalkulasikan hampir 90% lulusan MI Ma'arif Mojorejo ini bisa diterima di SMP/MTs/Pondok Pesantren favorit di wilayah kabupaten ponorogo disekitarnya.[9]

Demikian juga untuk MI Ma'arif Polorejo yang merupakan pendidikan Islam swasta yang berada dalam naungan Yayasan Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (BPPPMNU) Cabang Ponorogo yang memiliki visi Terwujudnya madrasah Al-Qur'an, Inovatif, Kompetitif, dan Berbudaya dan memiliki misi Membentuk muslim taat beribadah, berakhlak mulia, sholih dan sholihah, Meningkatkan kualitas belajar, terampil, dan mandiri, Mengoptimalkan kompetensi dan daya saing Pendidikan, dan Mengembangkan seni budaya dan religi dalam membentuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[9]. Hasil wawancara dengan kepala sekolah MI Ma'arif Mojorejo pada 25 November 2024 pukul 09.30

karakter generasi bangsa yang maju dan bermartabat. Di MI Ma'arif Polorejo ini memiliki persentase kelulusan yang cukup baik.[10]

Penelitian ini memiliki keunikan yang berfokus pada kesenjangan implementasi kurikulum di dua madrasah swasta tingkat dasar, yaitu MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo Ponorogo. Selama ini, kajian tentang implementasi kurikulum lebih banyak diarahkan pada madrasah negeri atau sekolah umum, sehingga penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai bagaimana madrasah swasta dengan kondisi sumber daya terbatas mengadaptasi kebijakan kurikulum nasional. Keunikan lainnya terletak pada pendekatan multi-kasus yang digunakan, sehingga dapat menggambarkan perbedaan nyata dalam praktik kurikulum antara dua madrasah yang memiliki latar belakang sosial, budaya, dan religius berbeda. Selain itu, penelitian ini menekankan pada integrasi muatan keagamaan, seperti tahfidz dan pendidikan karakter Islami, yang seringkali tidak mendapat perhatian dalam studi kurikulum umum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur tentang implementasi kurikulum di madrasah swasta, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis yang relevan bagi pengembangan kebijakan pendidikan Islam di tingkat lokal

Berdasarkan deskripsi diatas bahwa kesenjangan implementasi kurikulum madrasah swasta memiliki keunikan dalam menyoroti kesenjangan implementasi kurikulum di madrasah swasta dengan menggunakan pendekatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI AHMAD MUHAMMAD SIDDIQ PONOROGO

[10] Ahmad Suyono, "MI Ma'arif Polorejo," 2022, https://mipolorejo.maarifponorogo.sch.id/. Diakses pada tanggal 06-Oktober-2025 jam 10.15

multi-kasus. Fokus pada adaptasi kurikulum nasional, keterbatasan sumber daya, serta integrasi nilai-nilai keagamaan menjadikan penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah tentang kurikulum di madrasah swasta sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pengembangan kebijakan pendidikan Islam di tingkat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kelembagaan dan dukungan eksternal sangat menentukan kualitas pembelajaran, namun komitmen internal madrasah swasta juga berperan penting dalam menjaga mutu lulusan Oleh karena itu, penulis berminat melakukan penelitian dengan judul **Kesenjangan Implementasi Kurikulum Madrasah Swasta : Studi Multi Kasus di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo Ponorogo.**

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan penerapan kurikulum di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan kurikulum di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo ?
3. Bagaimana implikasi kesenjangan implementasi kurikulum di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo ?

## C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan kebijakan penerapan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka yang dilaksanakan di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk kesenjangan implementasi kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka antara MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo
3. Mengeksplorasi sikap kepala madrasah terhadap kesenjangan implementasi kurikulum 2013 dalam upaya yang dilakukan dalam mengatasinya.

## D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah khazanah pengetahuan mengenai kesenjangan implementasi kurikulum madrasah negeri dan swasta : studi kasus di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo guna untuk mendongkrak kurikulum yang telah ada agar lebih baik lagi kedepannya.

2. Bagi Peneliti

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti dapat menambah wawasan yang baru dan bisa mengetahui lebih dalam mengenai kesenjangan implementasi kurikulum madrasah negeri dan swasta : studi multi kasus di MI Ma`arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo

b. Bagi Sekolah

Penelitian ini semoga bisa bermanfaat untuk memberi acuan atau masukan bagi MI Ma`arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo yang berguna untuk menyelesaikan tugas atau menyusun kurikulum bagi kedua sekolahan tersebut agar lebih baik kedepannya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

c. Bagi Guru

Memberikan masukan kepada guru supaya lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan atau keputusan mengenai kurikulum yang beredar di kedua sekolah tersebut

d. Bagi Pembaca

Semoga bisa menambah pengetahuan dari berbagai sumber yang kami susun jadi satu dengan pemilihan kata-kata yang bisa diterima oleh para pembaca dan semoga bisa bermanfaat bagi kalangan pembaca baik itu masyarakat atau petinggi publik yang terhormat.

## E. Penelitian Terdahulu

Menurut Machi and McEvoy penelitian terdahulu merupakan argumen tertulis yang mendukung suatu posisi tesis dengan didasarkan pada bukti-bukti kredibel dari hasil penelitian sebelumnya. Tinjauan ini memberikan konteks dan latar belakang terhadap pengetahuan terkini mengenai topik yang dikaji, serta menyusun argumentasi logis untuk mempertahankan kesimpulan yang diambil. Secara umum, tinjauan pustaka dapat didefinisikan sebagai dokumen ilmiah yang menyajikan argumentasi logis berdasarkan pemahaman menyeluruh terhadap kondisi aktual pengetahuan dalam suatu bidang studi, sehingga membentuk tesis yang meyakinkan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian.[11] Penelitian mengenai kesenjangan implementasi kurikulum madrasah swasta : studi multi kasus di MI Ma`arif Mojorejo, Jetis dan MI Ma`arif Polorejo sudah sering kali dikaji oleh beberapa penelitian terdahulu.

[11] Lawrence A. Machi and Brenda T. McEvoy, *The Literature Review 3 Rd Ed.* (California: Corwin A SAGE Company, 2016), 28.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER PONOROGO

Untuk menghindari adanya asumsi plagiasi penelitian, maka perlu adanya pengkajian terhadap penelitian terdahulu yang telah mengkaji dengan topik yang serupa. Dibawah ini peneliti sajikan telaah hasil penelitian terdahulu, yang mana sebagai berikut

1. Penelitian jurnal dari Masruhin dengan judul Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Semarang dengan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, dalam pelaksanaan di MI Tarbiyatul Aulad Jombor menggunakan pembelajaran aktif dan kreatif dengan pendekatan tematik integratif, saintifik, serta penilaian situasional. Kedua, di MI Ma'arif Rowosari implementasi dilakukan bertahap sejak tahun ajaran 2017–2018, dimulai pada kelas I dan IV, kemudian kelas II dan V pada 2018–2019, serta kelas III dan VI pada 2019. Ketiga, faktor pendukung meliputi buku pedoman, arahan pengawas, sarana prasarana, dan sosialisasi. Adapun kendala yang dihadapi adalah kemampuan dasar siswa kelas I yang masih rendah, beban materi yang padat dalam satu tema, serta tingginya tuntutan administrasi.[12]
2. Penelitian jurnal dari Dwi Ummul Hasanah, Miladina Nur Khasanah, dan Desty Putri Hanifah dengan judul Analisis Tantangan dan Hambatan Penerapan Kurikulum 2013 di MI Ma'arif Budiluhur Kertek dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul dalam implementasi kurikulum 2013 di MI Ma'arif Budiluhur menghadapi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[12] Seorang Masruhin, "Implementasi Kurikulum 2013 Di Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Semarang," *Jurnal Pembinaan : Pendidikan Agama Islam* Vol 3 No 1 (2020): 85–109, https://doi.org/https://doi.org/10.37092/ej.v3i1.220.

berbagai permasalahan, seperti kondisi kelas yang kurang kondusif, jumlah siswa yang berlebihan, kompetensi guru yang tidak linier, serta kalender akademik yang padat. Selain itu, hambatan utama meliputi kesulitan guru dalam mengintegrasikan materi, keterbatasan keterampilan teknologi informasi, keterlambatan distribusi buku panduan, dan tuntutan untuk membuat media pembelajaran secara mandiri. Temuan ini menegaskan bahwa tantangan utama terletak pada peningkatan kemampuan dan kemauan guru dalam memanfaatkan teknologi serta penguasaan materi Kurikulum 2013. [13]

3. Penelitian Tesis dari Laeli Mubarok yang berjudul Implementasi Penilaian Autentik Kurikulum 2013 Di MI Ma'arif NU Karangdadap Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas menghasilkan temuan dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa: penyusunan instrumen penilaian pada semua kompetensi menghadapi kendala, terutama karena keberagaman karakteristik peserta didik dan belum adanya format skala penilaian yang baku. Akibatnya, guru menyusun skala penilaian secara mandiri sehingga tujuan penilaian, khususnya sikap, menjadi tidak seragam. Dalam pelaksanaan, guru mengalami kesulitan menilai seluruh aspek, terutama aspek afektif yang menuntut penilaian menyeluruh terhadap sikap siswa. Selain itu, pelaporan hasil penilaian juga bermasalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[13] Dwi Umul Hasanah, Miladina Nur Khasanah, and Desty Putri Hanifah, "Analisis Tantangan Dan Hambatan Penerapan Kurikulum 2013 Di MI Ma'arif Budiluhur Kertek," *Waspada : Jurnal Wawasan Pengembangan Pendidikan* Vol 11 No (2023): 23–29, https://doi.org/https://doi.org/10.61689/waspada.v11i1.404.

karena guru belum mampu mengolah nilai sikap, belum tersedia rekap khusus, dan tidak didukung oleh aplikasi rapor Kurikulum 2013. [14]

4. Penelitian Tesis dari Siti Khojanah dengan judul Analisis Swot Dalam Pembelajaran Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Di MI Ma'arif NU Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga yang menggunakan metode penelitian *field research* adalah penelitian deskriptif dengan hasil yang menunjukan bahwa pembelajaran tematik terpadu dalam Kurikulum 2013 di MI Ma'arif NU Pandansari memiliki keunggulan utama pada penekanan pendidikan karakter siswa. Namun, kelemahannya terletak pada kesulitan guru dalam mengintegrasikan berbagai mata pelajaran yang menuntut kreativitas dan inovasi tinggi. Dari sisi peluang, guru dapat meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan seperti Kelompok Kerja Guru (KKG) dan berbagai pelatihan profesional. Sementara itu, tantangan yang dihadapi adalah pemanfaatan teknologi yang tidak tepat, yang berpotensi berdampak negatif terhadap prestasi belajar siswa jika tidak dikendalikan. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran sudah berjalan cukup baik, meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek tertentu.[15]
5. Penelitian jurnal dari Anri Naldi, Neng Nurcahyati Sinulingga Putri, Handayani Lubis dengan judul Analisis Perkembangan Dan Pelaksanaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER PONOROGO

[14] Laeli Mubarok, "Implementasi Penilaian Autentik Kurikulum 2013 Di Mi Maarif Nu Karangdadap Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas (Thesis, Master)" (Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2022).

[15] Siti Khojanah, "Analisis Swot Dalam Pembelajaran Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Di MI Ma'arif Nu Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga (Tesis, Master)" (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

Kurikulum DI MIS Elsusi Medina Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak berdiri tahun 1991 perkembangan kurikulum berdasarkan perubahan kurikulum pendidikan, sejak kurikulum 1984, kurikulum 1994, KBK, KTSP dan kurikulum 2013 dan merdeka belajar. menunjukkan bahwa sejak berdiri tahun 1991, MIS Elsusi Medina mengalami perkembangan kurikulum yang mengikuti perubahan nasional, mulai dari kurikulum 1984, 1994, KBK, KTSP, Kurikulum 2013, hingga Merdeka Belajar. Dalam pelaksanaannya, madrasah menerapkan Kurikulum 2013 yang dipadukan dengan nilai-nilai keislaman sesuai program lembaga. Hasilnya terlihat pada tiga aspek utama, yaitu penguatan sikap spiritual (afektif), penguasaan pengetahuan agama dan umum (kognitif), serta keterampilan melalui kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler (psikomotorik). Secara keseluruhan, perkembangan dan pelaksanaan kurikulum ini mampu menjadikan madrasah selaras dengan harapan orang tua, masyarakat, serta tuntutan bangsa dan negar.[16]

## F. Definisi Operasional

1. Kesenjangan implementasi kurikulum adalah perbedaan antara rencana atau kebijakan kurikulum madrasah yang tertulis dengan pelaksanaan nyata di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo. Indikator kesenjangan diamati melalui wawancara dengan fokus pada:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[16] Anri Naldi, Neng Nurcahyati Sinulingga Lubis, and Putri Handayani, "Analisis Perkembangan Dan Pelaksanaan Kurikulum Di Mis Elsusi Medina," *Paedagoria : Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Kependidikan* Vol 14 No (2023): 292–300, https://doi.org/10.31764.

a. Pemahaman guru terhadap isi dan tujuan kurikulum madrasah
b. Cara pengajaran dan metode pembelajaran sesuai dengan kurikulum
c. Ketersediaan dan penggunaan sumber belajar atau media pembelajaran
d. Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam penerapan kurikulum
e. Evaluasi pelaksanaan kurikulum dari perspektif guru dan kepala madrasah

2. Kurikulum madrasah didefinisikan sebagai dokumen resmi yang berisi tujuan, materi, metode, dan evaluasi pembelajaran yang digunakan di madrasah, yang merujuk pada standar nasional pendidikan dan nilai-nilai keagamaan Islam, dan menjadi pedoman dalam proses belajar mengajar di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo.

## G. Sistematika Pembahasan

BAB I, Pada bagian bab ini akan membahas tentang pendahuluan, yaitu dimulai dari latar belakang penelitian yang diambil, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan, dan jadwal penelitian.

BAB II, Pada bagian bab ini akan membahas tentang kajian penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka berpikir yang mana dijadikan sebagai referensi, perbandingan, pondasi dan penguat dari penelitian yang akan dilaksanakan.

BAB III, Pada bagian bab ini akan membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan peneliti, menguraikan terkait lokasi dan waktu penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan penelitian, dan tahap penelitian

BAB IV, Pada bagian bab ini berisikan tentang hasil pengumpulan sumber-sumber data, pembahasan penelitian, yang mencakup mulai dari gambaran umum latar penelitian (lembaga yang diteliti), deskripsi data, dan pembahasan terkait rumusan masalah kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum madrasah di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo

BAB V, Pada bagian bab ini berisikan tentang hasil pengumpulan sumber-sumber data, pembahasan penelitian, yang mencancup mulai dari gamabarn umum latar penelitian (lembaga yang diteliti), deskripi data, dan embahasan terkait rumusan masalah ketua faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangn implementasi kurikulum di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo

BAB VI, Pada bagian bab ini berisikan tentang hasil pengumpulan sumber-sumber data, pembahasan penelitian, yang mencangup mulai dari gambaran umum latar penelitian (Lembaga yang diteliti), diskripsi data, dan pembahasan rumuan masalah ketiga yaitu dampak implementasi kurikulum di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo

BAB VII, berisi tentang rangkuman penelitian dalam bentuk kesimpulan hasil dari seluruh pembahasan penelitian yang dikaji, dan saran dari peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

# BAB II
# KAJIAN TEORITIK

## A. Kesenjangan Implementasi

1. Pengertian

Menurut Hill dan Hupe kesenjangan implementasi merupakan ketidaksesuaian antara apa yang dirumuskan dalam kebijakan dengan apa yang terjadi di tingkat pelaksanaan. Mereka menegaskan bahwa implementasi bukanlah proses mekanis, melainkan proses yang sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, interpretasi individu, dan kebebasan bertindak (*discretion*) para pelaksana di lapangan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi memerlukan keterlibatan berbagai aktor, koordinasi yang kuat, serta desain kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap kondisi nyata di lapangan.[17] Kemudian menurut Michael Fullan dalam bukunya *The New Meaning of Educational Change* Kesenjangan implementasi menjadi pijakan teoritis yang relevan dalam memahami fenomena perubahan pendidikan, khususnya dalam konteks implementasi kurikulum di tingkat sekolah.

Pemikiran ini memperkuat pandangan bahwa perubahan tidak hanya berkaitan dengan perumusan kebijakan, tetapi juga sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan tersebut dapat diterjemahkan dalam tindakan nyata. Oleh karena itu, teori perubahan Fullan menjadi salah

[17] Michael Hill and Peter Hupe, *Implementing Public Policy* (California: SAGE Publications, 2002), 41-57.

satu kerangka utama dalam kajian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kurikulum, khususnya dalam membandingkan praktik implementasi di madrasah swasta.[18] Kemudian Fullan juga menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kejelasan tujuan perubahan, tingkat kompleksitas, ketersediaan sumber daya, dukungan dari kepala sekolah, serta keterlibatan dan kesiapan guru. Jika faktor-faktor ini diabaikan atau tidak dipenuhi, maka akan terjadi kesenjangan antara kebijakan dengan pelaksanaan, yang pada akhirnya membuat perubahan tersebut tidak berdampak nyata.[19] Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kejelasan tujuan perubahan, merupakan elemen mendasar yang harus diperhatikan dalam setiap upaya implementasi. Tanpa pemahaman yang jelas mengenai arah dan tujuan perubahan, para pelaksana di tingkat sekolah akan mengalami kesulitan dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik nyata. Kejelasan ini mencakup pemahaman terhadap apa yang diharapkan berubah, bagaimana perubahan tersebut dilakukan, serta hasil akhir yang diinginkan.
b. Tingkat kompleksitas perubahan, juga menjadi faktor penentu. Perubahan yang bersifat kompleks, baik dalam hal isi maupun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[18] Michael Fullan, *The New Meaning of Educational Change* (Columbia University, New York: Teachers College Press, 1991), 72.
[19] Fullan, 86-90.

prosesnya, cenderung menimbulkan resistensi dan kebingungan di kalangan guru dan pemangku kepentingan lainnya. Kompleksitas ini dapat mencakup penggunaan pendekatan pedagogis baru, perubahan kurikulum, maupun penerapan teknologi dalam pembelajaran. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat kompleksitas, semakin besar pula tantangan yang dihadapi dalam implementasi.

c. Ketersediaan sumber daya, memiliki peranan penting dalam mendukung kelancaran proses implementasi. Sumber daya yang dimaksud meliputi fasilitas fisik, sarana dan prasarana, dukungan finansial, serta akses terhadap pelatihan dan pengembangan profesional. Keterbatasan sumber daya dapat menjadi hambatan signifikan yang mengurangi efektivitas penerapan kebijakan.
d. Dukungan dari kepala sekolah, merupakan faktor kepemimpinan yang sangat berpengaruh. Kepala sekolah tidak hanya berfungsi sebagai pengelola administrasi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendorong, memfasilitasi, dan memotivasi seluruh warga sekolah untuk berpartisipasi aktif dalam implementasi. Kepemimpinan yang kuat dan visioner akan menciptakan iklim sekolah yang kondusif terhadap perubahan
e. Keterlibatan dan kesiapan guru, menjadi aspek sentral dalam implementasi perubahan. Guru adalah pelaksana utama di lapangan, sehingga keterlibatan mereka dalam setiap tahapan proses sangat menentukan keberhasilan. Guru yang memiliki kesiapan baik dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap akan lebih mampu mengadaptasi dan menjalankan perubahan dengan efektif.[20]

Menurut Pressman dan Wildavsky Kesenjangan implementasi merupakan suatu kondisi di mana terdapat perbedaan antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan pelaksanaannya di lapangan. dalam bukunya *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland* menegaskan bahwa kebijakan tidak akan bermakna tanpa adanya implementasi yang efektif. Mereka menyatakan bahwa "*implementation is the ability to forge subsequent links in the causal chain so as to obtain the desired results*" yang berarti keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kemampuan setiap aktor yang terlibat dalam membangun mata rantai sebab-akibat sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai.

Dari kutipan diatas bisa dideskripsikan bahwasanya implementasi tidak sekadar memindahkan kebijakan atau program dari tingkat perencanaan ke tingkat pelaksanaan, tetapi lebih dari itu, implementasi merupakan kemampuan untuk menciptakan dan menjaga kesinambungan hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan agar tujuan atau hasil yang diharapkan dapat tercapai. Artinya, setiap tahapan dalam pelaksanaan kebijakan harus saling terhubung dan diperkuat agar dampaknya sesuai dengan yang telah direncanakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PONOROGO

[20] Fullan, 68-72.

Pressman dan Wildavsky juga menjelaskan bahwa semakin banyak titik keputusan (*decision points*) dan aktor yang terlibat dalam proses implementasi, maka semakin besar pula potensi terjadinya kegagalan. Hal ini dinyatakan dalam kutipannya, "*the greater the number of decision points and actors, the greater the probability of failure*`, yang berarti Semakin banyak titik pengambilan keputusan dan aktor yang terlibat, semakin besar pula kemungkinan terjadinya kegagalan mengapa demikian karena dalam proses implementasi suatu kebijakan akan semakin tinggi seiring dengan bertambahnya jumlah titik pengambilan keputusan dan jumlah aktor yang terlibat di dalamnya. Semakin banyak pihak yang terlibat, maka akan semakin besar pula potensi munculnya perbedaan persepsi, kepentingan, dan cara bertindak yang dapat memicu terjadinya hambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan.

Kesenjangan implementasi terjadi ketika terdapat perbedaan signifikan antara kebijakan yang dirumuskan (kebijakan formal) dengan praktek pelaksanaannya di lapangan. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan tersebut adalah banyaknya titik pengambilan keputusan dan aktor yang terlibat, sebagaimana dinyatakan dalam kutipan tersebut. Semakin banyak pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan, maka semakin besar potensi terjadinya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

hambatan, ketidaksesuaian pemahaman, hingga resistensi yang berujung pada tidak tercapainya tujuan kebijakan sesuai yang dirancang.[21]

Kesenjangan implementasi kurikulum dalam penelitian ini terlihat dari adanya perbedaan antara standar yang ditetapkan dengan praktik nyata di kelas. Pada tahap perencanaan, guru telah menyusun RPP sebagai tuntutan kurikulum, namun belum mencantumkan media pembelajaran secara lengkap sehingga belum sepenuhnya memenuhi standar yang diharapkan. Pada tahap pelaksanaan, proses pembelajaran sudah berjalan komunikatif dan guru mampu mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, tetapi masih ditemukan kendala seperti rendahnya konsentrasi siswa, kurangnya partisipasi aktif, serta penggunaan metode yang masih didominasi ceramah dan demonstrasi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran aktif belum diterapkan secara optimal. Sementara itu, pada tahap evaluasi, guru telah menggunakan penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik, namun pelaksanaannya belum konsisten, terutama dalam pengelolaan penilaian afektif dan penggunaan penilaian autentik yang masih terbatas pada bentuk lisan dan tulis sederhana.[22]

Hal ini juga selaras yang menurut Denis Lawton kesenjangan implementasi kurikulum terjadi karena adanya perbedaan mendasar antara kurikulum sebagai rancangan normatif dan kurikulum sebagai praktik di lapangan. Implementasi kurikulum tidak hanya bergantung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI ASENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[21] Jeffrey L. Pressman and Aaron Wildavsky, *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland* (Los Angeles: Universitas Of California Press, 1984), 87-95.

[22] Vicky Fitriani Herdiana and Evi Muafiah, "Kompetensi Pedagogik Guru Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Kelas Iv Di Mi Al-Jihad Karanggebang, Jetis, Ponorogo," *Jurnal Ilmiah Al-Thifl* Vol 2 No 1 (2022): 43–58, https://repository.iainponorogo.ac.id/1362/1/972-Article Text-3278-1-10-20220825.pdf.

pada isi dokumen yang telah disusun, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik tempat kurikulum tersebut dijalankan. Ketidaksesuaian antara harapan yang dituangkan dalam kebijakan kurikulum dan kenyataan di ruang kelas menciptakan celah atau kesenjangan implementasi. Oleh karena itu, agar implementasi kurikulum dapat berjalan optimal, diperlukan kesesuaian antara teori dan praktik serta keterlibatan semua pihak terkait dalam proses implementasi.

Dalam hal ini disampaikan Lawton lewat kutipannya ``*Discusses the idea of curriculum and the need to remove the gap between theory and practice*`` yang berarti Membahas konsep kurikulum serta pentingnya menghilangkan kesenjangan antara teori dan praktik dalam pelaksanaannya. Dari pernyataan diatas bisa dideskripsikan bahwasanya pentingnya upaya untuk menghilangkan kesenjangan antara teori dan praktik dalam implementasi kurikulum. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kurikulum tidak hanya bergantung pada rumusan teoritis semata, melainkan juga pada sejauh mana kurikulum tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam konteks pembelajaran nyata di lapangan.[23]

*J. Galen Saylor and William Alexander in his book Curriculum Planning for Better Teaching and Learning The curriculum is the sum total of the school's efforts to influence learning, whether in the classroom, on the playground, or out of school. Whether the efforts result in the learnings that teachers desire depends on the many factors*

[23] Denis Lawton et al., *Theory and Practice of Curriculum Studies* (London: Routledge & Kegan Paul, 1978), 176-186.

*which affect the individual pupil's interaction with the situations arranged. Whether the experiences had correlate or conflict with those that pupils have outside the school must also be answered for each individual. The significant conclusion for the teachers is that everything they do to stimulate and direct pupils' experience and subsequent learning must be considered in curriculum planning*.

Kurikulum dipahami sebagai keseluruhan upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk mempengaruhi proses belajar peserta didik, baik yang berlangsung di dalam kelas, di halaman sekolah, maupun di luar lingkungan sekolah. Keberhasilan upaya tersebut dalam mencapai hasil belajar yang diharapkan sangat bergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi interaksi setiap individu peserta didik dengan situasi-situasi pembelajaran yang telah dirancang. Setiap pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik perlu dievaluasi apakah pengalaman tersebut selaras atau justru bertentangan dengan pengalaman yang mereka peroleh di luar sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa segala bentuk aktivitas, interaksi, maupun situasi yang diciptakan oleh guru untuk merangsang dan mengarahkan pengalaman serta pembelajaran peserta didik harus dipertimbangkan secara menyeluruh dalam perencanaan kurikulum.

Dengan demikian, kurikulum tidak hanya mencakup materi ajar yang formal, tetapi juga meliputi berbagai pengalaman belajar yang mempengaruhi perkembangan peserta didik secara holistik.[24] Tidak semua pakar kurikulum memiliki pandangan yang luas dan

[24] Alexander and Saylor, *Curriculum Planning for Better Teaching and Learning*, 5.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

komprehensif mengenai hakikat kurikulum. Salah satu pakar yang memiliki pandangan berbeda adalah Hilda Taba, yang mendefinisikan kurikulum sebagai suatu cara untuk mempersiapkan anak agar mampu berprestasi dan berperan sebagai anggota masyarakat yang produktif. Dalam perspektif Taba, setiap kurikulum, apapun model dan polanya, senantiasa memiliki komponen-komponen tertentu yang menjadi elemen dasar dalam perancangannya. Komponen tersebut mencakup pernyataan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran pembelajaran, pemilihan dan pengorganisasian bahan ajar serta isi pelajaran, perancangan bentuk dan kegiatan belajar-mengajar, serta evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik.

Perbedaan antara kurikulum, pada dasarnya, terletak pada penekanan yang diberikan pada masing-masing unsur tersebut sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pendidikan yang diinginkan. Dengan demikian, kurikulum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat rencana dan aktivitas pembelajaran, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk membentuk generasi yang mampu beradaptasi dan berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat.[25] Kurikulum memiliki peranan penting dalam lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum memiliki posisi yang sentral dalam proses pendidikan serta kurikulum merupakan syarat mutlak dan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan itu sendiri. Peranan kurikulum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PONOROGO

[25] S. Nasution, *Asas-Asas Kurikulum* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), 7.

sangatlah penting bagi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, ada tiga peranan kurikulum yaitu;

Peranan konservatif Kurikulum memiliki tanggung jawab dalam mentransmisikan warisan sosial kepada generasi muda, Peranan kritis atau evaluatif Kurikulum ikut serta aktif berpartisipasi dalam mengontrol sosial dan menekankan unsur berpikir kritis yang mana lembaga pendidikan tidak hanya semata-mata mewariskan kebudayaan yang ada melainkan menilai dan memilih unsur budaya yang akan di wariskan, Peranan kreatif Kurikulum menciptakan sesuatu yang baru sesuai dengan kebutuhan pada masa sekarang dan yang akan datang dalam masyarakat dengan cara menciptakan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan konstruktif.[26] Berdasarkan uraian di atas, dapat di deskripsikan bahwa kurikulum memiliki peran yang sangat vital dalam proses pendidikan, karena menjadi salah satu komponen utama yang menentukan arah, isi, dan tujuan pendidikan.

Kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan, tetapi juga memiliki tiga peranan strategis yang saling melengkapi. Pertama, peranan konservatif, di mana kurikulum berperan dalam mentransmisikan warisan sosial dan budaya kepada generasi muda sehingga identitas dan nilai-nilai masyarakat tetap terjaga. Kedua, peranan kritis atau evaluatif, yaitu peran kurikulum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[26] Muhammad Nasir and Muhammad, "Analisis Perkembangan Kurikulum Di Indonesia : Masa Lalu, Kini, Dan Masa Depan," *Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran* Vol 4 No 2 (2024): 228–36, https://doi.org/https://doi.org/10.51878/learning.v4i2.2846.

dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik serta melakukan seleksi terhadap budaya yang layak diwariskan. Ketiga, peranan kreatif, yang menuntut kurikulum mampu berinovasi dan menciptakan sesuatu yang baru sesuai dengan kebutuhan serta tantangan zaman. Dengan demikian, kurikulum menjadi alat yang dinamis dalam mempersiapkan peserta didik agar mampu menghadapi perkembangan dan perubahan sosial di masa depan.

Kurikulum merupakan pedoman mendasar dalam setiap pembelajaran. Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya proses pendidikan, baik tidaknya siswa menyerap mata pelajaran, tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan tergantung dari kurikulum yang digunakan.Peranan kurikulum dalam pendidikan formal sekolah atau lembaga pendidikan lainnya merupakan peranan yang sangat strategis dan menentukan pencapaian tujuan pendidikan itu sendiri, khususnya dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional.[27] Ada tiga peran kurikulum yang dianggap sangat penting, yaitu :

a. Peranan Konservatif

Salah satu tanggung jawab kurikulum adalah mentransmisikan dan menafsirkan warisan sosial pada generasi muda. Dengan demikian, sekolah sebagai suatu Lembaga sosial dapat mempengaruhi dan membina tingkah laku siswa sesuai dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[27] Farhany Zahra Qurrata Ainy and Anne Effane, "Peran Kurikulum Dan Fungsi Kurikulum," *Karimah Tauhid : Karya Ilmiah Mahasiswa Bertauhid* Vol 2 No 1 (2023): 153–156, https://doi.org/https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i1.7712.

berbagai nilai sosial yang ada dalam masyarakat, sejalan dengan peranan Pendidikan sebagai suatu proses sosial. Menurut Romine *In sense the conservative role provides what may be called `social cement`. It contributes to like-mindedness and provides for behavior which is consistent with values already accepted. It deals with what is sometimes known as the core of `relative universals`* yang berarti dengan adanya peranan konservatif ini, maka sesungguhnya kurikulum itu berorientasi pada masa lampau. Meskipun demikian, peranan ini sangat mendasar sifatnya.

b. Peranan Kritis atau Evaluatif

Kebudayaan senantiasa berubah dan bertambah. Sekolah tidak hanya mewariskan kebudayaan yang ada, melainkan juga menilai dan memilih berbagai unsur kebudayaan yang berpartisipasi dalam kontrol sosial dan memberi penekanan pada unsur berpikir kritis. Nilai-nilai sosial yang tidak sesuai lagi dengan keadaan di masa mendatang dihilangkan, kurikulum harus merupakan pilihan yang tetap atas dasar-dasar kriteria terlalu.

c. Peranan Kreatif

Kurikulum berperan dalam melakukan berbagai kegiatan kreatif dan konstruktif, dalam artian menciptakan dan menyusun suatu hal yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa sekarang dan mendatang. Untuk memantu setiap Individu dalam mengambangkan semua potensi yang ada padanya, maka dari itu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

kurikulum menciptakan pelajaran, pengalaman, cara berpikir, kemampuan, dan keterampilan yang baru, yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dari ketiga peranan kurikulum tersebut harus berjalan secara seimbang, atau dengan kata lain terdapat keharmonisan di antara ketiga. Dengan demikian, kurikulum dapat memenuhi tuntutan waktu dan keadaan dalam membawa siswa menuju kebudayaan masa depan.[28]

Menurut Michael Fullan terdapat sembilan faktor penting yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu: (1) karakteristik dari inovasi atau proyek perubahan, (2) peran lokal, dan (3) faktor eksternal berikut penjelasanya :

1. Karakteristik dari inovasi atau proyek perubahan
   a. Kebutuhan (*Need*) Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, banyak inovasi dicoba tanpa pemeriksaan yang cermat mengenai apakah inovasi tersebut memenuhi apa yang dianggap sebagai kebutuhan prioritas. Guru, misalnya, sering kali tidak melihat perlunya perubahan yang dianjurkan. Beberapa studi skala besar di Amerika Serikat menegaskan pentingnya menghubungkan kebutuhan dengan keputusan tentang inovasi atau arah perubahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[28] Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, ed. Boyke Ramdhani (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 12-13.

b. Kejelasan (*Clarity*) Kejelasan (mengenai tujuan dan cara mencapainya) merupakan masalah yang terus-menerus muncul dalam proses perubahan. Bahkan ketika telah tercapai kesepakatan bahwa suatu bentuk perubahan memang diperlukan seperti ketika para guru ingin meningkatkan salah satu aspek kurikulum atau memperbaiki kondisi sekolah secara keseluruhan perubahan yang diadopsi sering kali tidak menjelaskan secara jelas apa yang sebenarnya harus dilakukan secara berbeda oleh para guru.

c. Kompleksitas (*Complexity*) Kompleksitas merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu inovasi atau perubahan dalam pendidikan. Kompleksitas merujuk pada tingkat kesulitan serta sejauh mana perubahan tersebut menuntut penyesuaian dari individu yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, seperti guru atau tenaga kependidikan lainnya. Besarnya perubahan yang diperlukan tentu bervariasi, tergantung pada kondisi awal setiap individu atau kelompok. Namun demikian, secara umum setiap bentuk perubahan dapat dianalisis dari tiga aspek utama, yaitu tingkat kesulitan yang dihadapi, keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan perubahan tersebut, serta sejauh mana perubahan tersebut mengharuskan adanya penyesuaian terhadap keyakinan, strategi pembelajaran, dan penggunaan materi ajar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

d. Kualitas dan Kepraktisan Program Faktor terakhir yang secara langsung berkaitan dengan sifat perubahan adalah kualitas dan kepraktisan dari proyek perubahan tersebut apakah berupa kurikulum baru, kebijakan baru, atau restrukturisasi sekolah. Sejarah mengenai kualitas dari berbagai upaya perubahan jika dikaitkan dengan tiga variabel lainnya (kebutuhan, kejelasan, dan kompleksitas) memberikan gambaran yang signifikan. Mengatakan bahwa pentingnya kualitas suatu perubahan sudah jelas dengan sendirinya berarti meremehkan bagaimana keputusan untuk memulai suatu inovasi sebenarnya dibuat.[29]

**2. Karakteristik Lokal**

Kondisi sosial suatu institusi pendidikan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi perubahan. Fullan menjelaskan bahwa perubahan tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti organisasi tempat individu bekerja, serta peristiwa dan aktivitas baik yang direncanakan maupun yang tidak yang mempengaruhi produktivitas suatu upaya perubahan.

a. Distrik Sekolah, Telah kita lihat bahwa keputusan adopsi sering kali dibuat tanpa tindak lanjut yang memadai, dan bahwa berbagai kesulitan (realitas objektif) yang melekat dalam proses perubahan tidak dipahami dengan baik. Sebagian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[29] Michael Fullan, *The New Meaning of Educational Change Fourth Edition* (New York: Teachers College Press, 2007), 88-91.

besar upaya perubahan kolektif dalam dunia pendidikan tampaknya mengalami kegagalan, dan kegagalan ini berarti kekecewaan, waktu yang terbuang, perasaan tidak mampu, kurangnya dukungan, serta rasa putus asa. Karena pengenalan inovasi sudah menjadi bagian dari kehidupan di sebagian besar sistem sekolah, maka distrik-distrik sekolah membangun rekam jejak dalam mengelola perubahan. Apa pun rekam jejak tersebut pada titik waktu tertentu, hal itu menjadi prasyarat penting dalam kaitannya dengan inisiatif baru berikutnya.

b. Karakteristik Dewan Sekolah dan Komunitas, Sangat sulit untuk menggeneralisasi peran komunitas dan dewan sekolah dalam kaitannya dengan implementasi. Smith dan Keith (1971) serta Gold dan Miles (1981) menceritakan kisah-kisah menyakitkan tentang apa yang terjadi ketika komunitas kelas menengah tidak menyukai inovasi yang mereka saksikan di sekolah-sekolah mereka. Dewan sekolah dapat mempengaruhi implementasi secara tidak langsung, misalnya melalui perekrutan atau pemberhentian kepala sekolah yang berorientasi pada reformasi. Perubahan demografis juga seringkali memberikan tekanan yang semakin besar kepada sekolah untuk mengadopsi, meskipun belum tentu mengimplementasikan, kebijakan-kebijakan baru.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

c. Kepala Sekolah, keberhasilan implementasi perubahan di sekolah sangat bergantung pada peran aktif kepala sekolah sebagai pemimpin perubahan. Dukungan kepala sekolah tidak hanya mempengaruhi legitimasi suatu program inovasi, tetapi juga berperan penting dalam memberikan motivasi, arahan, serta fasilitas yang diperlukan oleh guru dalam menjalankan perubahan. Oleh karena itu, kepemimpinan kepala sekolah yang responsif dan partisipatif menjadi kunci utama dalam menjembatani kebijakan di tingkat atas dengan pelaksanaannya di tingkat satuan Pendidikan.

d. Guru, Baik karakteristik guru secara individu maupun faktor kolektif dan kolegial berperan dalam menentukan keberhasilan implementasi dan sejumlah peneliti lainnya menemukan bahwa kondisi psikologis seorang guru dapat membuatnya lebih atau kurang cenderung untuk mempertimbangkan serta mengambil tindakan terhadap suatu perbaikan. Beberapa guru, tergantung pada kepribadiannya, pengalaman sebelumnya, serta tahapan dalam perjalanan kariernya, cenderung lebih mampu mengaktualisasikan diri dan memiliki rasa efikasi yang lebih tinggi. Hal ini mendorong mereka untuk bertindak dan terus berupaya dalam proses yang diperlukan guna mencapai keberhasilan implementasi.[30]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[30] Fullan, 93-97

### 3. Faktor Eksternal

Kegagalan implementasi kebijakan pendidikan sering kali disebabkan oleh ketidakharmonisan antara pembuat kebijakan dan pelaksana di tingkat lokal. Ketimpangan ini muncul karena minimnya pemahaman dan komunikasi antara kedua belah pihak, yang berasal dari perbedaan latar belakang, perspektif, dan kepentingan. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi pendidikan sangat bergantung pada kualitas hubungan dan kolaborasi yang dibangun antara lembaga pemerintah dan praktisi di lapangan, serta pentingnya mempertimbangkan aspek implementasi sejak tahap perencanaan kebijakan.[31]

Menurut Marsh mengemukakan tiga faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum, yaitu dukungan kepala sekolah, dukungan rekan sejawat guru, dan dukungan internal di dalam kelas. Dari berbagai faktor tersebut, guru merupakan faktor penentu utama. Dengan kata lain, keberhasilan implementasi kurikulum di sekolah sangat ditentukan oleh faktor guru tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, maka implementasi kurikulum tidaklah akan berhasil.[32]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[31] Fullan, 100.
[32] Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, 239.

## B. Implementasi Kurikulum

Menurut Ornstein & Hunkins Implementasi kurikulum merupakan proses penerapan kurikulum yang telah dirancang ke dalam praktik pembelajaran di lapangan. Proses ini tidak hanya sebatas menjalankan rencana pembelajaran yang tertulis dalam dokumen kurikulum, tetapi juga mencakup bagaimana guru, sebagai pelaksana utama, menafsirkan dan menerjemahkan kurikulum tersebut dalam kegiatan belajar mengajar. Keberhasilan implementasi kurikulum sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keyakinan dan pandangan guru terhadap kurikulum, kondisi institusi atau sekolah tempat pelaksanaan berlangsung, serta harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pendidikan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor tersebut menjadi penting agar implementasi kurikulum dapat berjalan secara efektif dan mampu menghasilkan proses pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman.[33]

Menurut Ralph W. Tyler dalam bukunya *Basic Principles of Curriculum and Instruction*, implementasi kurikulum berarti menerapkan tujuan pembelajaran yang telah dirancang ke dalam kegiatan belajar yang nyata di kelas. Artinya, kurikulum tidak hanya berupa rencana atau dokumen, tetapi harus benar-benar dijalankan dalam proses pembelajaran sehari-hari. Guru memiliki peran penting dalam hal ini, karena guru yang menentukan bagaimana tujuan pembelajaran bisa dicapai melalui kegiatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER PONOROGO

[33] Allan C. Ornstein and Francis P. Hunkins, *Curriculum: Foundations, Principles, and Issues (7th Ed.)* (New York: Pearson, 2018), 34.

belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Tyler menekankan bahwa setiap kegiatan belajar harus dirancang agar membantu siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengalaman belajar yang diberikan perlu diatur secara terencana, dari yang mudah ke yang lebih sulit, agar siswa dapat berkembang secara bertahap. Ia juga menambahkan bahwa evaluasi harus dilakukan untuk melihat apakah kegiatan belajar tersebut benar-benar membantu siswa mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, implementasi kurikulum menurut Tyler adalah upaya nyata untuk mengubah rencana pendidikan menjadi pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa.[34]

Implementasi kurikulum merupakan suatu proses yang bersifat dinamis, artinya pelaksanaannya tidak dapat dipandang sebagai kegiatan yang bersifat statis atau sekali selesai. Proses implementasi menuntut adanya penyesuaian (adaptasi) terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi praktik pendidikan, seperti karakteristik peserta didik, kemampuan guru, ketersediaan sumber daya, serta perubahan sosial dan budaya di lingkungan sekolah dalam konteks ini, adaptasi menjadi unsur penting karena kurikulum yang dirancang secara nasional belum tentu sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal sekolah. Oleh karena itu, guru sebagai pelaksana utama kurikulum dituntut memiliki

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[34] Ralph W. Tyler, *Basic Principles of Curriculum and Instruction* (London: The University of Chicago Press, 1949), 61-62.

kemampuan reflektif untuk menyesuaikan strategi, metode, dan materi pembelajaran agar tetap relevan dengan situasi aktual di lapangan.

Selain adaptasi, implementasi kurikulum juga menuntut adanya perubahan berkelanjutan (*continuous improvement*). Hal ini sejalan dengan pandangan Carl dalam bukunya *Teacher Empowerment Through Curriculum Development: Theory into Practice* yang menyatakan bahwa implementasi kurikulum tidak berhenti pada tahap pelaksanaan, melainkan terus berkembang melalui proses evaluasi, revisi, dan inovasi sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kurikulum harus dipandang sebagai suatu sistem terbuka yang responsif terhadap dinamika sosial, teknologi, dan tuntutan globalisasi.[35] Selain itu implementasi juga memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan implementasi kurikulum diantaranya sebagai berikut :

a. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kesenjangan Implementasi Kurikulum

Menurut Posner faktor-faktor kontekstual yang berfungsi sebagai batasan atau kendala dalam proses pembelajaran, dan secara langsung berdampak terhadap implementasi kurikulum. Faktor-faktor ini mencakup berbagai aspek eksternal seperti sumber daya, sarana prasarana, waktu, kebijakan, dan kondisi sosial sekolah yang berada di luar kendali guru atau perancang kurikulum. Dalam contoh yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI AHMAD MUHAMMAD SIDDIQ PONOROGO

[35] Arend E. Carl, *Teacher Empowerment Through Curriculum Development: Theory into Practice* (Cape Town, Afrika Selatan: Juta & Co., Ltd, 1995), 165.

dikemukakan, Posner mengilustrasikan bahwa suatu kurikulum baru dalam mata pelajaran pendidikan jasmani yang menekankan aspek kebugaran mungkin memerlukan tambahan peralatan. Apabila sekolah tidak mampu menyediakan peralatan tersebut, maka implementasi kurikulum akan mengalami hambatan.

Secara konseptual, pernyataan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kurikulum tidak hanya ditentukan oleh kualitas rancangan kurikulumnya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan lingkungan pendidikan dalam menyediakan kondisi yang mendukung. Dengan demikian, kesenjangan antara kurikulum yang direncanakan (*intended curriculum*) dan kurikulum yang diimplementasikan (*implemented curriculum*) dapat disebabkan oleh keterbatasan faktor-faktor bingkai tersebut. Hal ini relevan untuk dianalisis dalam konteks evaluasi pelaksanaan kurikulum, khususnya di daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya Pendidikan.[36]

Berikut adalah empat faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan implementasi kurikulum diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Faktor Guru

Guru adalah elemen kunci dalam implementasi kurikulum. Kompetensi pedagogik, pemahaman terhadap isi kurikulum, serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
PONOROGO

[36] George J. Posner, *Analyzing the Curriculum 2nd Ed* (New York: McGraw Hill, 1995), 193.

sikap dan motivasi guru sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kurikulum.

a. Kompetensi Pedagogik: Kemampuan guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan.
b. Pemahaman terhadap Kurikulum: Pengetahuan guru mengenai tujuan, isi, dan metode kurikulum memungkinkan mereka untuk mengimplementasikan kurikulum dengan tepat.
c. Sikap dan Motivasi: Sikap positif dan motivasi tinggi dari guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan mendukung perubahan kurikulum.[37]

2. Faktor Kepemimpinan dan Manajemen Sekolah

Kepemimpinan yang efektif dan manajemen sekolah yang baik sangat mempengaruhi implementasi kurikulum.

a. Kepemimpinan Kepala Sekolah: Kepala sekolah sebagai pemimpin harus memiliki visi yang jelas dan mampu mengarahkan serta memotivasi staf untuk melaksanakan kurikulum dengan baik.
b. Manajemen Sumber Daya: Pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif mendukung kelancaran implementasi kurikulum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[37] Ornstein and Hunkins, *Curriculum: Foundations, Principles, and Issues (7th Ed.)*, 213.

c. Budaya Sekolah: Menciptakan budaya sekolah yang mendukung perubahan dan inovasi dalam pembelajaran.[38]

Faktor Pelatihan dan Pengembangan Profesional

3. Faktor Pelatihan dan Pengembangan Profesional

Pelatihan dan pengembangan profesional guru merupakan komponen penting dalam peningkatan kompetensi serta efektivitas implementasi kurikulum. Melalui pelatihan yang terarah dan berkelanjutan, guru dapat memperkuat pengetahuan, keterampilan pedagogik, serta kemampuan adaptif terhadap perubahan kebijakan dan inovasi pendidikan. Secara umum, pelatihan dan pengembangan profesional mencakup tiga bentuk utama, yaitu pelatihan awal, pelatihan berkelanjutan, serta *mentoring* dan *coaching*.

a. Pelatihan Awal

Pelatihan awal adalah pendidikan dan pelatihan yang diterima calon guru sebelum terjun ke dunia kerja. Program ini berfungsi membekali guru dengan pemahaman dasar tentang teori pendidikan, strategi pembelajaran, serta penerapan kurikulum. Pelatihan awal biasanya dilaksanakan melalui program pendidikan profesi guru (PPG) atau lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), dan menjadi dasar bagi guru dalam mengelola pembelajaran secara efektif.[39]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[38] George E. Hall and Susan M. Hord, *Change in Schools: Facilitating the Process* (New York: SUNY Press, 1987), 88

[39] Fullan, *The New Meaning of Educational Change, Fourth Edition*., 264-265.

b. Pelatihan Berkelanjutan

Pelatihan berkelanjutan merupakan kegiatan pengembangan profesional yang dilaksanakan selama masa kerja guru. Tujuannya adalah memperbarui kompetensi agar selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan peserta didik. Bentuknya dapat berupa workshop, seminar, pelatihan daring, atau kegiatan kolaboratif antar guru. Pelatihan ini membantu guru mengadopsi strategi pembelajaran inovatif dan meningkatkan kualitas pengajaran.

c. *Mentoring* dan *Coaching*

*Mentoring* dan *coaching* adalah bentuk pendampingan profesional yang dilakukan oleh guru berpengalaman atau ahli untuk membantu guru lain menghadapi tantangan dalam praktik mengajar dan penerapan kurikulum. *Mentoring* menekankan pada transfer pengalaman dan bimbingan, sedangkan coaching lebih berfokus pada pemberian umpan balik konstruktif guna meningkatkan kinerja guru. Kedua pendekatan ini memperkuat kolaborasi, refleksi, serta budaya belajar di lingkungan sekolah.[40]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[40] Fullan., 266.

4. Faktor Lingkungan Sosial dan Budaya

Lingkungan sosial dan budaya tempat sekolah berada sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Setiap sekolah berinteraksi dengan masyarakat yang memiliki nilai, kebiasaan, dan pandangan tertentu terhadap pendidikan.

a. Nilai dan norma masyarakat menentukan bagaimana warga memandang pendidikan. Bila nilai masyarakat sejalan dengan tujuan kurikulum, penerapannya akan lebih mudah. Namun, bila berbeda, bisa muncul penolakan terhadap perubahan.
b. Dukungan orang tua juga berperan besar. Orang tua yang terlibat dalam kegiatan sekolah dan mendukung anaknya belajar membantu meningkatkan hasil belajar serta keberhasilan penerapan kurikulum.
c. Keterbukaan terhadap perubahan memengaruhi seberapa cepat masyarakat menerima pembaruan pendidikan. Masyarakat yang terbuka cenderung mendukung inovasi, sementara yang tertutup lebih lambat beradaptasi.[41]

C. Macam-Macam Kurikulum

Kurikulum secara etimologis adalah tempat berlari dengan kata yang berasal dari Bahasa latin curir yaitu pelari, dan curere yang artinya tempat berlari.[42]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PONOROGO

[41] Carl, *Teacher Empowerment Through Curriculum Development: Theory into Practice*, 260.

[42] Oemar Hamalik, *Kurikulum Dan Pembelajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005). 16.

Di dalam buku John Franklin Bobbitt (1918) yang berjudul In The Curriculum menyatakan bahwa ``*The word curriculum is Latin for a race-course, or the race itself, a place of deeds, or a series of deeds. As applied to education, it is that series of things 'which children andyouth must do-and experience by way of developing abilities to do the things well that make up the affairs of adult life; and to be in all respects what adults should be*`` Kata curriculum berasal dari bahasa Latin yang berarti lintasan perlombaan, atau perlombaan itu sendiri sebuah tempat untuk berbuat, atau rangkaian perbuatan. Dalam konteks pendidikan, kurikulum adalah serangkaian hal yang harus dilakukan dan dialami oleh anak-anak dan remaja guna mengembangkan kemampuan untuk melakukan berbagai hal dengan baik yang merupakan bagian dari kehidupan orang dewasa, serta menjadi pribadi yang sepenuhnya mencerminkan apa yang seharusnya dimiliki oleh orang dewasa.[43]

Dari diskripsi diatas bahwa Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka itulah yang nantinya akan dibahas oleh peneliti yang sebagaimana keduanya memiliki hubungan yang erat sebagai bagian dari kesinambungan kebijakan pendidikan di Indonesia. Kurikulum 2013 dirancang dengan penekanan pada kompetensi inti dan kompetensi dasar, integrasi pendidikan karakter, serta penguatan pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka akan dijelaskan dibawah ini :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
PONOROGO

[43] John Franklin Bobbitt, *In The Curriculum* (New York: Houghton Miffjn Company, 1981). 42.

1. Kurikulum 2013

   a. Dasar Normatif Kurikulum 2013

      Kurikulum 2013 memiliki dasar normatif yang kuat, baik secara konstitusional maupun regulatif. Kurikulum 2013 memiliki landasan konstitusional yang kuat, sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (3) yang menyatakan bahwa pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan semua itu diatur oleh undang-undang.[44]

      Serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur berbagai aspek penting dalam sistem pendidikan di Indonesia, termasuk dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional; hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah; jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; serta berbagai aspek lainnya terkait penyelenggaraan Pendidikan.[45] Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 adalah perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan ini mengubah dan menambah beberapa definisi serta lingkup standar nasional pendidikan, dan menetapkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI ASENG MUHAMMAD DESARI
PONOROGO

[44] MPR RI, *UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945* (Jakarta: Setjen MPR RI, 2020).

[45] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional," Pub. L. No. 20 (2003), https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU20-2003Sisdiknas.pdf.

standar kompetensi lulusan sebagai acuan pengembangan standar Pendidikan.[46]

Implementasi teknis Kurikulum 2013 diatur melalui berbagai Permendikbud, seperti Permendikbud Nomor 67 sampai dengan 71 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SD/MI. Namun, dalam rentang nomor yang Anda sebutkan, tidak ada Permendikbud yang spesifik mengatur kurikulum secara umum untuk semua tingkatan pendidikan. Untuk implementasi Kurikulum 2013, yang menjadi panduan utamanya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013.[47]

b. Aturan Implemetatif

Aturan implementatif Kurikulum 2013 tertuang dalam berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Regulasi tersebut antara lain Permendikbud Nomor 67 tahun 2013 adalah peraturan tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah. Peraturan ini berisi landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis yang menjadi acuan pengembangan kurikulum untuk tingkat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI ASENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[46] *Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*, 2013, https://peraturan.bpk.go.id/Details/5364/pp-no-32-tahun-2013.

[47] *Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013*.

nasional dan daerah, serta pedoman pengembangan kurikulum di jenjang SD/MI.[48]

Permendikbud Nomor 71 Tahun 2013, Tentang peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, yang bertujuan untuk mengatur dan menetapkan buku-buku yang layak untuk digunakan dalam pembelajaran di jenjang tersebut. kompetensi inti, serta kompetensi dasar di setiap jenjang pendidikan. [49] Selanjutnya, penyempurnaan implementasi Kurikulum 2013 diperkuat melalui Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 tentang peraturan pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013, yang memungkinkan sekolah dasar dan menengah kembali menerapkan Kurikulum 2006 mulai semester kedua tahun pelajaran 2014/2015.[50]

c. Strategi Penerapan

Strategi penerapan Kurikulum 2013 dilakukan melalui langkah-langkah sistematis yang melibatkan berbagai aspek pendidikan. Pertama, penguatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan menjadi fokus utama melalui pelatihan, pendampingan, serta pengembangan komunitas belajar. Hal ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI ASENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[48] *Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013*.

[49] *Permendikbud Nomor 71 Tahun 2013*, 2013, http://repository.unand.ac.id/20955/1/permen_tahun2013_nomor71.pdf.

[50] *Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014*, 2014, Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006.pdf.

bertujuan agar guru mampu memahami dan mengimplementasikan pendekatan saintifik, pembelajaran berbasis aktivitas, serta penilaian autentik sesuai tuntutan kurikulum. Kedua, pemerintah menyediakan sarana dan sumber belajar, termasuk buku teks pelajaran dan panduan guru, serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi sebagai media pembelajaran. Ketiga, penerapan Kurikulum 2013 dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan satuan pendidikan, sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 yang memberikan fleksibilitas penggunaan kurikulum.[51]

Selain permendikbut Nomor 160 tahun 2003 penerapan Kurikulum 2013 memiliki dasar hukum yang jelas. Secara khusus, pengaturannya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjadi payung hukum seluruh kebijakan kurikulum di Indonesia. Aturan tersebut kemudian dijabarkan lebih teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta diperkuat oleh Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum, sehingga pelaksanaan Kurikulum 2013 memiliki legitimasi yang kuat baik secara normatif maupun praktis.[52]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[51] *Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014*.
[52] MPR RI, *UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945*.

d. Kelebihan dan Kekurangan

Kurikulum 2013 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional dengan menekankan pada pendekatan ilmiah (*scientific approach*), penguatan pendidikan karakter, serta penilaian autentik yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, kurikulum memiliki kelebihan dan kekeurangan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Kelebihan
   a. Siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi disekolah
   b. Adanya penilaian dari semua pihak penentuan nilai bagi siswa bukan hanya didapat dari nilai ujian saja tetapi juga dapat dari nilai kesopanan, religi, praktek, sikap dan lain-lain
   c. Standar penilaian mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi seperti, keterampilan dan pengetahuan secara proporsional
2. Kekurangan
   a. Guru banyak salah kaprah, karena beranggapan dengan kurikulum 2013 guru tidak perlu menjelaskan materi kepada siswa dikelas, padahal banyak mata pelajaran yang harus tetap ada penjelasan dari guru.
   b. Kurangnya pemahan guru dengan konsep pendekatan scientific.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

c. Beban belajar siswa dan termasuk guru terlalu berat, sehingga waktu belajar disekolah terlalu lama.[53]

2. Kurikulum Merdeka

a. Dasar Normatif

Kurikulum Merdeka memiliki landasan normatif yang kuat sebagai acuan legal dalam penyusunan dan pelaksanaannya di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah. Dasar hukum utama dari kurikulum ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada Pasal 36 ayat (2), yang menyatakan bahwa kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip diversifikasi sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, potensi daerah, serta kebutuhan peserta didik. Ketentuan ini memberikan pijakan hukum yang jelas bagi fleksibilitas.[54]

Kurikulum Merdeka, sehingga memungkinkan implementasinya menyesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan tanpa mengabaikan tujuan pendidikan nasional secara menyeluruh. Selain Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, legitimasi pelaksanaan Kurikulum Merdeka juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pendidikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[53] Imas Kurinasih and Berlin Sani, *Implementasi Kurikulum 2013 Konsep & Penerapan* (Surabaya: Kata Pena, 2014). 40-42.

[54] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

merupakan urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah, yang berarti pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyesuaikan pelaksanaan kurikulum sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat setempat.[55]

Dari sisi operasional, kerangka kurikulum dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 yang merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan ini menegaskan bahwa kerangka dan struktur kurikulum bersifat nasional, namun tetap memberi ruang bagi inovasi di tingkat satuan pendidikan, termasuk dalam penerapan Kurikulum Merdeka yang lebih fleksibel, kontekstual, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Implementasi Kurikulum Merdeka secara resmi diperkuat melalui terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga jenjang pendidikan menengah.

Regulasi ini menetapkan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum satuan pendidikan, di mana setiap satuan pendidikan diberi kewenangan untuk menetapkan kurikulum yang akan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[55] *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*, 2014, https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014.

digunakan secara mandiri.[56] Kurikulum ini menekankan pada materi-materi esensial, pengembangan kompetensi dasar peserta didik, serta penguatan karakter melalui internalisasi nilai-nilai dalam Profil Pelajar Pancasila. Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 mulai berlaku sejak tanggal 26 Maret 2024, dan turut mengatur masa transisi dari Kurikulum 2013 menuju Kurikulum Merdeka yang direncanakan berlangsung hingga tahun ajaran 2026/2027, atau sampai tahun ajaran 2027/2028 bagi daerah tertinggal. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum sekaligus arah kebijakan yang jelas dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka secara bertahap dan terencana.[57]

Istilah merdeka belajar telah disampaikan dan difinisikan oleh para ahli,[58] salah satunya adalah Menurut Carl Rogers dalam bukunya yang berjudul *Freedom to Larn. ``I am talking about the student who says, "I am discovering, drawing in from the outside, and making that which is drawn in a real part of me``* Siswa yang berkata, 'Saya sedang menemukan, menyerap dari luar, dan menjadikan apa yang saya serap itu sebagai bagian nyata dari diri saya, dari Pernyataan tersebut menekankan bahwa proses belajar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[56] Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah, 2024, https://peraturan.bpk.go.id/Details/281847/permendikbudriset-no-12-tahun-2024.

[57] Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah.

[58] Alrizka Hairi Dilfa et al., *Pengembangan Dan Implementsi Kurikulum Merdeka* (Malang: Litnus, 2023). 13.

yang sejati terjadi ketika siswa secara aktif terlibat dalam menemukan dan menyerap pengetahuan, serta menginternalisasikannya.[59]

b. Aturan Implementatif

Kurikulum Merdeka merupakan salah satu bentuk inovasi pendidikan yang dirancang oleh pemerintah untuk menjawab tantangan perkembangan zaman, kebutuhan peserta didik, serta dampak dari krisis pembelajaran pasca pandemi. Implementasi Kurikulum Merdeka secara nasional didasarkan pada Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Menengah. Peraturan ini menjadi dasar hukum utama yang menetapkan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum operasional yang dapat diterapkan oleh seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa Kurikulum Merdeka menekankan fleksibilitas pembelajaran, penyederhanaan materi, serta penguatan karakter melalui pengembangan Profil Pelajar Pancasila.[60]

Selain itu, implementasi teknis Kurikulum Merdeka diperkuat oleh Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Nomor 033/H/KR/2022 tentang Capaian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[59] Carl Rogers, *Freedom to Learn* (California: Printed in the United States of America, 1969).3.

[60] *Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah*.

Pembelajaran. Capaian pembelajaran ini menggantikan struktur Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KI-KD) pada kurikulum sebelumnya, dan menjadi rujukan dalam penyusunan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran (ATP). Sementara itu, struktur kurikulum secara keseluruhan diatur dalam Keputusan Kepala BSKAP Nomor 010/H/KR/2022, yang memuat pembagian alokasi waktu dan mata pelajaran serta porsi pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek. Dalam mendukung pelaksanaannya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga menyediakan berbagai panduan dan platform pendukung, seperti Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan buku teks Kurikulum Merdeka.[61]

Dengan adanya dasar hukum dan perangkat implementatif yang jelas, Kurikulum Merdeka diharapkan dapat dilaksanakan secara bertahap dan terstruktur di seluruh satuan pendidikan. Khusus untuk madrasah, implementasi Kurikulum Merdeka dilakukan melalui pendekatan bertahap oleh Kementerian Agama, dengan tetap memperhatikan prinsip dasar kurikulum nasional dan penguatan nilai-nilai keagamaan. Dengan demikian, pelaksanaan Kurikulum Merdeka tidak hanya bertumpu pada inovasi kebijakan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PONOROGO

[61] *Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Nomor 033/H/KR/2022*, 2022, https://kurikulum.kemdikbud.go.id/file/1692927593_manage_file.pdf.

tetapi juga ditopang oleh regulasi dan dukungan teknis yang komprehensif.

c. Strategi Penerapan

Dalam implementasi Kurikulum Merdeka, pemerintah memberikan tiga opsi penerapan yang dapat dipilih oleh satuan pendidikan sesuai dengan kesiapan dan kapasitas masing-masing, yaitu Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi. Pertama, Mandiri Belajar, satuan pendidikan masih menggunakan struktur Kurikulum 2013 (atau Kurikulum Darurat), namun mulai mengadopsi prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka, seperti pembelajaran berdiferensiasi, penguatan literasi dan numerasi, serta pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Pada tahap ini, guru tetap dapat menggunakan perangkat ajar yang sudah dimiliki, namun didorong untuk mulai berinovasi dalam proses pembelajaran.[62]

Kedua, Mandiri Berubah, sekolah mulai menerapkan struktur Kurikulum Merdeka secara penuh, termasuk penggunaan capaian pembelajaran (CP) sebagai pengganti Kompetensi Dasar (KD), serta mengintegrasikan modul ajar dan perangkat pembelajaran yang telah disediakan pemerintah melalui Platform Merdeka Mengajar. Terakhir, Mandiri Berbagi merupakan tahap lanjutan bagi sekolah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI ASENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[62] Anindito Aditomo, *Panduan Pembelajaran Dan Asesmen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Menengah* (Jakarta: BSKAP, 2022), https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2022/06/Panduan-Pembelajarn-dan-Asesmen.pdf.

yang telah matang dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Sekolah pada tahap ini tidak hanya mengembangkan perangkat ajar secara mandiri sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan konteks lokal, tetapi juga berperan aktif dalam membagikan praktik baik dan hasil pengembangannya kepada satuan pendidikan lain. Ketiga opsi ini menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka dirancang dengan prinsip fleksibilitas dan kemandirian, sehingga memberikan ruang bagi setiap sekolah untuk berkembang sesuai dengan tingkat kesiapan mereka para siswa.[63]

Secara konseptual, Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran, menekankan pada pengembangan potensi siswa, serta mendorong guru untuk berperan sebagai fasilitator yang kreatif dan inovatif. Kurikulum ini juga menuntut perubahan paradigma, dari pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi berpusat pada peserta didik. Namun dalam praktiknya, implementasi belum berjalan optimal karena berbagai kendala yang muncul. Salah satu kesenjangan utama terletak pada aspek kesiapan guru, di mana masih banyak guru yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep dan teknis pelaksanaan Kurikulum Merdeka akibat kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang merata. Perubahan dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka menjadi tantangan karena guru masih terbiasa dengan pola pembelajaran lama yang administratif dan berorientasi pada materi. [64]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI ASENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[63] Aditomo.

[64] Andreas Fredyansa Harwisaputra et al., "Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka Di SMAN 2 Ponorogo," *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management* Vol 4 No 2 (2023): 149–64, https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.21154/sajiem.v4i2.206.

d. Kelebihan dan Kekurangan Kurikulum Merdeka

Setiap kurikulum yang diterapkan di Indonesia memiliki kelebihan dan juga kekurangan, jika dibandingkan dengan Kurikulum 2013, maka ada beberapa kelebihan yang dimiliki Kurikulum Merdeka, di antaranya ialah:

1. Kelebihan Kurikulum Merdeka
   a. Kurikulum lebih sederhana, meskipun sederhana namun kurikulum ini cukup mendalam.
   b. Pembelajaran lebih bermakna, tidak tergesa-gesa atau terkesan menuntaskan materi, pembelajaran lebih terasa menyenangkan.
   c. Kelebihan Kurikulum Merdeka bagi guru ialah pada saat kegiatan belajar mengajar guru dapat melaksanakan pengajaran sesuai penilaian terhadap jenjang capaian dan perkembangan peserta didik.
2. Kekurangan Kurikulum Merdeka
   a. Dari segi implementasinya Kurikulum Merdeka masih kurang matang.
   b. Sistem pendidikan dan pengajaran yang dirancang belum terealisasi dengan baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

c. Kurangnya sumber daya manusia (SDM), serta sistem yang belum terstruktur.[65]

3. Kurikulum Berbasis Cinta (KBC)

a. Dasar Normatif KBC

Kurikulum Berbasis Cinta memiliki landasan normatif yang berasal dari kebijakan resmi pemerintah melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 1503 Tahun 2025 mengenai Panduan Penerapan Kurikulum di Madrasah. Kebijakan ini ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai upaya untuk memperkuat pelaksanaan kurikulum yang tidak hanya fokus pada pencapaian kompetensi akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter siswa. Kurikulum ini menekankan pentingnya penggabungan nilai kasih sayang, empati, toleransi, dan penghormatan terhadap orang lain dalam proses belajar di madrasah[66]. Selain itu, Kurikulum Berbasis Cinta juga sejalan dengan Kepdirjen Pendis No. 6077 Tahun 2025 Keputusan ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai pedoman implementasi Kurikulum Berbasis Cinta pada satuan pendidikan madrasah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa proses pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada penguatan nilai spiritual, moral, dan sosial melalui

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI ASENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[65] Ahmad Almarisi, "Kelebihan Dan Kekurangan Kurikulum Merdeka Pada Pembelajaran Sejarah Dalam Perspektif Historis," *MUKADIMAH : Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial* Vol 7 No 1 (2023): 111–17, https://doi.org/https://doi.org/10.30743/mkd.v7i1.6291.

[66] "Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1503 Tahun 2025" (2025), https://drive.google.com/file/d/1riDufa6xek73ZGgQv52pTTwG9FVf6vwu/view?usp=sharing.

penanaman nilai kasih sayang, empati, serta tanggung jawab sosial dalam pembelajaran. [67]

b. Aturan Implementatif

Aturan Implementatif Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) di madrasah berlandaskan Keputusan Menteri Agama Nomor 1503 Tahun 2025 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada RA, MI, MTS, MA, dan MAK. Keputusan ini menjadi dasar bagi satuan pendidikan madrasah dalam melaksanakan kurikulum yang menekankan pada Pembelajaran Mendalam dan Kurikulum Berbasis Cinta, sebagai penyempurnaan terhadap implementasi kurikulum sebelumnya.[68] dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6077 Tahun 2025 tentang Panduan Kurikulum Berbasis Cinta di Madrasah. Keputusan ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai panduan teknis dalam menerapkan nilai-nilai Kurikulum Berbasis Cinta selama proses belajar mengajar.[69]

Aturan ini mengatur prinsip-prinsip dalam pembelajaran yang mengedepankan pengintegrasian nilai-nilai kasih sayang, empati, toleransi, serta penghargaan terhadap orang lain dalam kerangka pendidikan. Selain itu, ketentuan ini juga menguraikan cara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI ASENG MUHAMMAD DESARI PONOROGO

[67] Suyitno, "Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6077 Tahun 2025" (2025), https://ntt.kemenag.go.id/file/file/panduan-kurikulum-berbasis-cinta.pdf.

[68] Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1503 Tahun 2025.

[69] Suyitno, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6077 Tahun 2025.

penerapan nilai cinta dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler di madrasah, sehingga pembelajaran tidak hanya fokus pada penguasaan materi, tetapi juga berorientasi pada pengembangan karakter spiritual, moral, dan sosial peserta didik. Dengan cara ini, regulasi ini berfungsi sebagai panduan operasional untuk para guru dan madrasah dalam menggabungkan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam praktik pembelajaran.

c. Stratgi Penerapan

Strategi penerapan Kurikulum Berbasis Cinta juga dapat dikaitkan dengan berbagai regulasi pendidikan yang menjadi dasar pelaksanaan kurikulum serta pembentukan karakter siswa. Salah satu regulasi tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 mengenai Standar Nasional Pendidikan yang menekankan bahwa proses belajar mengajar harus mengembangkan kompetensi siswa secara menyeluruh, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Prinsip ini menjadi dasar dalam melaksanakan pembelajaran yang tidak hanya fokus pada pencapaian akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter serta nilai-nilai kemanusiaan Kelebihan dan Kekurangan.[70]

Di samping itu, strategi penerapan nilai dalam proses belajar juga sejalan dengan kebijakan dari Peraturan Presiden Nomor 87

[70] "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan" (2021), https://peraturan.bpk.go.id/Details/73167/perpres-no-57-tahun-2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang mengeksplorasi integrasi nilai-nilai religius, nasionalisme, kemandirian, kerja sama, dan integritas dalam kegiatan pendidikan. Kebijakan ini mendorong lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam aktivitas intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Oleh karena itu, penerapan Kurikulum Berbasis Cinta di madrasah dapat dilakukan melalui penguatan budaya sekolah, pembelajaran yang lebih manusiawi, serta pembiasaan sikap empati dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan pendidikan.[71]

d. Kelebihan dan Kekurangan KBC

a. Kelebihan KBC

1. Menumbuhkan karakter humanis dan empati siswa

KBC menekankan nilai kasih sayang, empati, dan kepedulian sosial dalam proses pembelajaran sehingga mampu membentuk karakter siswa yang humanis dan religius.[72]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[71] "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" (2017), https://peraturan.bpk.go.id/Details/73167/perpres-no-87-tahun-2017.

[72] Nangimatul Mukaromah et al., "Permasalahan Dan Tantangan Penerapan Kurikulum Berbasis Cinta Di Madrasah Ibtidaiyah," *Jurnal Basicedu* Vol 9 No 5 (2025): 1633–1641, https://doi.org/https://doi.org/10.31004/basicedu.v9i5.10765.

2. Mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan spiritual

KBC tidak hanya fokus pada pengetahuan akademik, tetapi juga mengembangkan kecerdasan emosional dan spiritual peserta didik.[73]

3. Menciptakan lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan

Pendekatan pembelajaran berbasis kasih sayang membuat proses belajar lebih humanis dan tidak menekan siswa.[74]

4. Menguatkan pendidikan karakter di madrasah

KBC hadir sebagai respon terhadap masalah degradasi moral dan rendahnya empati di kalangan peserta didik.[75]

b. Kekurangan KBC

1. Pemahaman guru terhadap konsep KBC belum merata

Banyak guru masih belum memahami konsep dan implementasi KBC secara menyeluruh.

2. Kurangnya pelatihan dan sosialisasi

Implementasi KBC masih menghadapi kendala karena belum adanya pelatihan yang sistematis bagi guru.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[73] Akhmad Sahrandi, "Implementasi Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Di Madrasah," *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* vol 9 No 2 (2024): 306–15, https://doi.org/https://doi.org/10.55102/alyasini.v9i2.6835.

[74] Suyitno, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6077 Tahun 2025. 14.

[75] Khairunnisa Khairunnisa, Miftahul Jannah, and Ayu Tri Darma Ramadhani, "Analisis Teoretis Kurikulum Cinta Berbasis Multiple Intelligences Dalam Membentuk Karakter Humanis Siswa Madrasah Ibtidaiyah," *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 10 No (2026): 2046–2055, https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v10i1.36360.

3. Penerapan nilai cinta sering tidak konsisten

Dalam praktik pembelajaran, nilai-nilai yang menjadi dasar KBC belum selalu diterapkan secara konsisten.[76]

4. Membutuhkan perubahan paradigma guru

KBC menuntut guru mengubah pendekatan mengajar dari yang berorientasi materi menuju pembelajaran yang menekankan nilai dan hubungan emosional.[77]

Berdasarkan uraian diatsas bahwasannya Kurikulum 2013, Kurikulum Merdeka, dan Kurikulum Berbasis Cinta memiliki tujuan yang sama, yaitu mengembangkan kompetensi siswa yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap, sambil juga menekankan pentingnya pendidikan karakter dan pembelajaran yang aktif. Namun, masing-masing kurikulum memiliki fokus yang berbeda dalam pendekatan pembelajarannya. Kurtilas lebih menekankan pada pendekatan berbasis sains dengan kegiatan mengamati, bertanya, bereksperimen, berpikir kritis, dan berkomunikasi. Kurikulum merdeka memberikan kebebasan bagi guru untuk menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Di sisi lain, KBC lebih menekankan pada penanaman nilai-nilai kasih sayang terhadap Tuhan, sesama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[76] Mukaromah et al., "Permasalahan Dan Tantangan Penerapan Kurikulum Berbasis Cinta Di Madrasah Ibtidaiyah."

[77] Kementrian Agama RI, "Kemenag Uji Publik Kurikulum Berbasis Cinta, Siap Diterapkan Tahun Ajaran 2025/2026," Direktorat KSKK Madrasah, 2025, https://pendis.kemenag.go.id/direktorat-kskk-madrasah/kemenag-uji-publik-kurikulum-berbasis-cinta-siap-diterapkan-tahun-ajaran-20252026?utm_source=chatgpt.com.

manusia, pengetahuan, serta lingkungan dalam proses pendidikan.

D. Dampak Kesenjangan Implementasi Kurikulum

Menurut John I. Goodlad dalam karyanya *Curriculum Inquiry: The Study of Curriculum Practice*, kesenjangan antara kurikulum yang direncanakan dan yang dilaksanakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku dan hasil belajar siswa. Goodlad menjelaskan bahwa ketika guru tidak menerapkan strategi pembelajaran sebagaimana yang telah dirancang dalam kurikulum, maka proses pembelajaran akan kehilangan arah dan tujuan utamanya. Kondisi tersebut menyebabkan siswa kurang aktif dalam mengikuti kegiatan belajar, mengalami penurunan motivasi, serta tidak mampu mencapai kompetensi yang diharapkan.

Lebih lanjut, Goodlad menegaskan bahwa efektivitas kurikulum tidak hanya terletak pada rancangan tertulis, melainkan pada sejauh mana kurikulum tersebut dapat diterapkan secara konsisten di dalam kelas. Ketidaksesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi akan mengakibatkan siswa tidak memperoleh pengalaman belajar yang bermakna dan terarah. Akibatnya, hasil belajar menjadi tidak optimal dan mutu pembelajaran menurun. Dengan demikian, Goodlad memandang bahwa kesenjangan implementasi kurikulum berdampak langsung pada rendahnya motivasi belajar, partisipasi aktif siswa, serta ketimpangan hasil belajar antar satuan pendidikan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

kurikulum agar setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang efektif, bermakna, dan berkualitas.[78]

Dalam konteks penelitian ini, pandangan Goodlad sangat relevan dengan kondisi yang terjadi di MI Ma'arif Mojorejo Jetis dan MI Ma'arif Polorejo Ponorogo. Berdasarkan hasil pengamatan awal, ditemukan adanya kesenjangan antara kurikulum yang dirumuskan di tingkat madrasah dengan pelaksanaan di ruang kelas. Beberapa guru belum sepenuhnya memahami prinsip dan langkah implementasi Kurikulum 2013, sehingga pembelajaran masih berfokus pada penyampaian materi dibandingkan pada pengembangan kompetensi siswa secara holistik. Akibatnya, siswa tidak memperoleh pengalaman belajar yang bermakna sebagaimana yang diamanatkan dalam kurikulum.

## E. Telaah Pustaka

### 1. Konsep Implementasi Kurikulum

Implementasi kurikulum merupakan proses penerapan kurikulum yang telah dirancang ke dalam praktik pembelajaran di satuan pendidikan. Implementasi ini tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan rencana pembelajaran yang tertulis dalam dokumen kurikulum, tetapi juga mencakup bagaimana guru sebagai pelaksana utama menafsirkan dan menerjemahkan kurikulum dalam kegiatan belajar mengajar di kelas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PONOROGO

[78] John I. Goodlad, *Curriculum Inquiry: The Study of Curriculum Practice* (New York: McGraw-Hill, 1979), 60-62.

Menurut Ralph W. Tyler, implementasi kurikulum merupakan upaya menerapkan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan ke dalam pengalaman belajar yang nyata bagi peserta didik. Artinya, kurikulum tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan, tetapi harus diwujudkan dalam proses pembelajaran yang sistematis sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif.

Sementara itu, Ornstein dan Hunkins menyatakan bahwa implementasi kurikulum merupakan proses dinamis yang melibatkan berbagai faktor seperti keyakinan guru terhadap kurikulum, kondisi lembaga pendidikan, serta tuntutan masyarakat terhadap pendidikan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kurikulum tidak hanya ditentukan oleh kualitas rancangan kurikulum, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan lingkungan pendidikan

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kurikulum

Keberhasilan implementasi kurikulum sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal sekolah. Marsh mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi implementasi kurikulum, yaitu dukungan kepala sekolah, dukungan rekan sejawat guru, dan dukungan internal di dalam kelas.

Selain itu, Posner menjelaskan bahwa implementasi kurikulum juga dipengaruhi oleh faktor kontekstual yang berfungsi sebagai batasan atau kendala dalam proses pembelajaran. Faktor-faktor tersebut meliputi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

ketersediaan sarana prasarana, kebijakan pendidikan, waktu pembelajaran, serta kondisi sosial sekolah

Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum antara lain:

a. Faktor Guru

Guru merupakan aktor utama dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah. Kompetensi pedagogik, pemahaman terhadap kurikulum, serta sikap dan motivasi guru sangat menentukan keberhasilan implementasi kurikulum.

b. Faktor Kepemimpinan Sekolah

Kepala sekolah memiliki peran penting dalam mengarahkan dan mengoordinasikan pelaksanaan kurikulum. Kepemimpinan yang efektif mampu menciptakan budaya sekolah yang mendukung inovasi dan perubahan dalam pembelajaran.

c. Faktor Pelatihan dan Pengembangan Profesional

Pelatihan dan pengembangan profesional guru menjadi sarana penting dalam meningkatkan kompetensi guru dalam memahami dan mengimplementasikan kurikulum.

d. Faktor Lingkungan Sosial dan Budaya

Lingkungan masyarakat juga berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kurikulum. Dukungan orang tua dan masyarakat dapat memperkuat pelaksanaan program pendidikan di sekolah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

3. Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia sebagai penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini menekankan pada pengembangan kompetensi peserta didik secara holistik yang mencakup aspek sikap, pengetahuan.

a. Dasar Hukum Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 memiliki landasan yuridis yang kuat, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SD/MI
4. Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum
5. Permendikbut Nomor 71 tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Kma 184 tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah

Kurikulum ini dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pendekatan ilmiah (scientific approach) serta penguatan pendidikan karakter.

b. Karakteristik Kurikulum 2013

Beberapa karakteristik utama Kurikulum 2013 antara lain:

1.Pembelajaran berbasis kompetensi

2. Pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

3.Penilaian autentik yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan

4. Penguatan pendidikan karakter

c. Kelebihan Kurikulum 2013

1. Mendorong siswa lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam pembelajaran.
2. Penilaian tidak hanya berdasarkan ujian, tetapi juga mencakup sikap dan keterampilan.
3. Mengintegrasikan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran.

d. Kekurangan Kurikulum 2013

1. Sebagian guru masih kurang memahami konsep pendekatan saintifik.
2. Beban administrasi guru cukup tinggi.
3. Proses pembelajaran sering dianggap terlalu kompleks oleh sebagian guru.

4. Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum terbaru yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bagian dari upaya transformasi pendidikan nasional. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran yang lebih fleksibel, berpusat pada peserta didik, serta memberikan kebebasan kepada guru dan sekolah dalam mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa.

a. Dasar Hukum Kurikulum Merdeka

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. KMA Nomor 450 Tahun 2022 tentang Penetapan Madrasah Pelaksana Kurikulum Merdeka
4. Keputusan Menteri Pendidikan tentang Kurikulum Merdeka dalam program Merdeka Belajar

b. Karakteristik Kurikulum Merdeka

Beberapa karakteristik utama Kurikulum Merdeka yaitu:

1. Pembelajaran berpusat pada peserta didik
2. Struktur kurikulum lebih fleksibel
3. Fokus pada pengembangan kompetensi dan karakter
4. Adanya Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)

c. Kelebihan Kurikulum Merdeka

1. Memberikan fleksibilitas kepada guru dalam merancang pembelajaran.
2. Menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan siswa.
3. Mengurangi beban administrasi guru dibanding kurikulum sebelumnya.

d. Kekurangan Kurikulum Merdeka

1. Tidak semua guru siap dengan perubahan kurikulum yang cepat.
2. Keterbatasan pelatihan bagi guru di beberapa daerah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

5. Kurikulum Berbasis Cinta

Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) merupakan pendekatan pendidikan yang dikembangkan oleh Kementerian Agama untuk memperkuat pembentukan karakter peserta didik melalui penanaman nilai-nilai kasih sayang, empati, dan kepedulian dalam proses pembelajaran di madrasah.

a. Dasar Hukum KBC

1. KMA Nomor 1503 Tahun 2025 Implementasi kurikulum pada madrasah yang menyesuaikan perkembangan kebijakan kurikulum merdeka dan penguatan nilai karakter termasuk pendekatan kurikulum berbasis cinta (kbc).
2. Kepdirjen Pendis No. 6077 Tahun 2025 tentang Panduan Kurikulum Berbasis Cinta.

b. Karakteristik KBC

Kurikulum Berbasis Cinta memiliki beberapa karakteristik utama, antara lain:

1. **Pembelajaran berorientasi pada nilai kasih sayang** Proses pembelajaran menanamkan nilai empati, kepedulian, dan penghargaan terhadap sesama.
2. **Mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan** Nilai-nilai spiritual dan moral menjadi bagian penting dalam kegiatan pembelajaran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

3. **Pembelajaran yang humanis dan inklusif**
   Guru menciptakan suasana belajar yang menghargai perbedaan dan mendorong kerja sama antar peserta didik.

c. Kelebihan KBC

1. Menciptakan suasana pembelajaran yang lebih humanis dan menyenangkan.
2. Mendorong hubungan yang lebih harmonis antara guru dan peserta didik.
3. Membantu membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang baik.

d. Kekurangan KBC

1. Masih tergolong konsep baru, sehingga belum semua guru memahami implementasinya secara optimal.
2. Membutuhkan pelatihan guru agar dapat mengintegrasikan nilai-nilai cinta dalam proses pembelajaran.
3. Belum memiliki panduan teknis yang sepenuhnya seragam di semua madrasah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

# BAB III
# METODE PENELITIAN

## A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi multi kasus yang dilaksanakan di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo Ponorogo. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk mengungkap secara mendalam fenomena implementasi kurikulum dalam konteks alami di masing-masing madrasah.

Menurut Sugiyono "metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti merupakan sebagai instrumen kunci, pengambiln sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi." Dengan menggunakan desain multikasus, peneliti dapat membandingkan implementasi kurikulum antara madrasah negeri dan swasta serta menemukan pola-pola kesenjangan yang terjadi. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif terhadap dinamika pelaksanaan kurikulum secara kontekstual, sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan implementasi di masing-masing satuan pendidikan.[79]

Penelitian ini menekankan pada proses yang fleksibel, di mana pertanyaan dan prosedur berkembang seiring berjalannya penelitian. Pengumpulan data dilakukan secara langsung di lingkungan alami partisipan, sementara analisis data disusun secara induktif, dimulai dari temuan-temuan khusus hingga membentuk tema-tema umum. Dalam proses ini, peneliti berperan aktif dalam menginterpretasikan makna yang terkandung dalam data secara mendalam dan kontekstual.[80]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2025/2026. Sedangkan tempat pertama yang digunakan sebagai penelitian oleh peneliti adalah MI Ma'arif Mojorejo Kec.Jetis Kab.Ponorogo Pemilihan tempat kedua penelitian di MI Ma'arif Polorejo Kec.Babadan Kab.Ponorogo hal ini didasari atas pertimbangan sebagai berikut :

a. Kedua madrasah memiliki karakteristik pembelajaran yang relevan dengan fokus kajian penelitian sehingga memungkinkan diperolehnya data yang akurat dan representatif.
b. Ketersediaan subjek penelitian yang sesuai serta dukungan pihak sekolah memudahkan proses pengumpulan data.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[79] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Interpretif Dan Konstruktif)* (Bandung: Alfabeta, 2022), 15.

[80] John W. Creswell, *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches* (California: SAGE Publications, 2007), 37.

c. Akses lokasi yang mudah dijangkau oleh peneliti turut mendukung efektivitas pelaksanaan penelitian.

d. Kedua lembaga memiliki lingkungan belajar yang dinamis dan program pendidikan yang dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk analisis penelitian. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua madrasah dalam peningkatan kualitas pembelajaran.

C. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui interaksi langsung dengan sumber data. Data ini sering disebut sebagai data asli atau data baru karena sifatnya yang terkini. Untuk mengumpulkan data primer, peneliti harus terlibat langsung di lapangan dan mengumpulkan informasi secara langsung dari sumbernya. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diambil dari Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah bidang Kurikulum , dan guru mata Pelajaran di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang sudah ada. Data ini juga dapat diperoleh dari dokumentasi kegiatan yang mendukung kesetaraan pendidikan dan nilai-nilai sosial. Sumber-sumber tersebut termasuk seperti jurnal, Keputusan Menteri Agama (KMA), laporan, dan buku.[81]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[81] James Edward Burt, Gerald Michael Barber, and David Leslie Rigby, *Elementary Statistics for Geographers* (New York, USA: The Guilford Press, 2009). 18.

Dengan mengetahui dan memahami sumber data yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian, maka peneliti dapat menentukan landasan teknik pengumpulan data yang akan menghasilkan data.[82]

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Penelitian kualitatif menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara, pengamatan dan dokumentasi.[83] Metode-metode yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER PONOROGO

[82] Salim and Haidar, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis* (Jakarta: Kencana, 2019). 103.

[83] Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, Dan Penelitian Pengembangan*, ed. Mara Samin Lubis (Bandung: Citra Pustaka Media, 2016), 143.

atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.[84]

Wawancara awal dilakukan secara terstruktur dengan tujuan untuk memperoleh keterangan secara rinci dan mendalam mengenai pandangan informan tentang Kesenjangan Implementasi Kurikulum Madrasah Swasta : Studi Multi Kasus di MI Ma`arif dan MI Ma`arif Polorejo Adapun dalam penelitian ini sumber informan meliputi beberapa orang yang berkaitan langsung dengan fenomena tersebut, antara lain sebagai berikut: *Pertama*, Kepala MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo atau Waka MI Ma`arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo selaku perancang dan pelaksana kurikulum yang ada di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo dan yang kedua, peserta didik, MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo untuk mendapatkan informasi terkait kesenjangan implementasi kurikulum madrasah negeri dan swasta : studi multi kasus di MI Ma`arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo

b. Observasi

Menurut Moleong Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek di lapangan. Observasi dilakukan secara terencana dan terarah untuk mengidentifikasi perilaku, peristiwa, atau situasi tertentu yang relevan dengan fokus penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[84] Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal* (Yogyakarta: LP2M UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020), 89.

Melalui teknik ini, peneliti dapat memperoleh data yang bersifat faktual dan kontekstual, karena diperoleh langsung dari kondisi nyata yang sedang diteliti.[85] Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo Peneliti dalam penelitian ini mengamati hal-hal yang berkaitan dengan kesenjangan implementasi apa yang terjadi di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo

c. Dokumentasi

Menurut Arikunto Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan berbagai dokumen lain yang relevan. Metode ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, serta memberikan gambaran faktual mengenai kondisi, peristiwa, atau aktivitas yang telah terjadi.[86].

E. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel merupakan metode atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk memilih individu atau elemen dari populasi agar menjadi bagian dari sampel. Teknik ini memegang peran penting dalam menjamin sejauh mana sampel tersebut dapat merepresentasikan populasi secara valid, akurat, dan tidak bias. Teknik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[85] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017). 61.

[86] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 27.

pengambilan sampel secara umum terbagi menjadi dua kategori, yaitu *Purposive sampling*, dan *snowbaal sampling* .[87]

a. Purposive Sampling

*Purposive sampling* adalah teknik penentuan sumber data yang dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu. Peneliti memilih informan yang dianggap paling mengetahui, memahami, dan terlibat langsung dengan fenomena yang diteliti sehingga mampu memberikan informasi yang mendalam dan relevan dengan fokus penelitian.[88]

Kelebihan *purposive sampling* terletak pada kemampuannya menghasilkan data yang mendalam karena informan dipilih secara sengaja berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan mereka terhadap masalah penelitian. Teknik ini membuat pemilihan sampel menjadi lebih tepat sasaran sehingga informasi yang diperoleh relevan dengan fokus penelitian. Selain itu, proses pengumpulan data menjadi lebih efisien karena peneliti tidak perlu melibatkan banyak responden, melainkan cukup memilih informan yang dianggap mampu memberikan informasi yang dibutuhkan secara komprehensif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[87] Dika Raihan Batara et al., "Langkah-Langkah Menentukan Populasi Dan Sampel Yang Tepat Dalam Penelitian," *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia* Vol 4 No 2 (2025): 682 – 689, https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpion.v4i2.457.

[88] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017). 60.

b. *Snowbaal Sampling*

*Snowball Sampling* adalah teknik pengambian sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar, hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap, maka mencari orang lain lagi yang daat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar, seperi bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar. [89]

F. Teknik Analisis Data

Ada berbagai cara untuk menganalisis data dalam penelitian kualitatif. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana mengungkapkan bahwasanya proses analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga selesai, tuntas, dan data jenuh. Data jenuh berarti tidak ada lagi data yang dapat digali atau diperoleh, meskipun proses pencarian data telah diulang berulang kali. Setelah proses pengumpulan data, analisis data mencakup data condensation, data display, dan drawing dan verifikasi conclusions.[90] Terbagi menjadi 3 yaitu:

a. Kondensasi Data

Kondensasi data terjadi secara berkesinambungan dalam kehidupan selama berorientasi pada beberapa proyek/penelitian kualitatif. Bahkan sebelum data sebenarnya dikumpulkan, antisipasi kondensasi data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER PONOROGO

[89] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015). 300.

[90] Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (United States of America: SAGE Publications, 2014), 31-33.

sebagai seorang peneliti secara tidak sadar sering menarik sebuah kesimpulan dapat berupa kerangka kerja konseptual, kasus, pertanyaan penelitian, dan pengumpulan data yang dianggap mendekati untuk dipilih. Sebagai hasil pengumpulan data, lebih lanjut kondensasi data terjadi: menulis ringkasan, pengkodean, mengembangkan kategori, menghasilkan kategori, dan penulisan memo analisis.[91]

b. Penyajian Data

Penyajian data (data display) adalah proses menyusun informasi yang telah dikondensasi ke dalam bentuk yang sistematis dan terorganisir, sehingga memudahkan peneliti untuk memahami makna dari data tersebut dan untuk menarik kesimpulan. Tujuan dari penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi.[92]

Menurut Miles, Huberman, dan Saldana Penyajian data adalah kumpulan informasi yang terorganisir dan dipadatkan, yang memungkinkan peneliti menarik kesimpulan dan melakukan tindakan.[93]

c. Penarikan dan Verikasi Simpulan

Penarikan dan verifikasi kesimpulan merupakan proses untuk menafsirkan makna data yang telah disajikan, menemukan pola atau hubungan sebab-akibat, dan menarik kesimpulan yang sesuai dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI ASEMBO MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[91] Huberman.

[92] Eko Haryono, "Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam," *Jurnal Ilmiah An-Nuur* Vol 13 No (2023): 1–6, https://doi.org/https://doi.org/10.58403/annuur.v13i2.301.

[93] Huberman, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook,* 12.

tujuan penelitian. Kesimpulan awal yang diperoleh kemudian diverifikasi secara terus-menerus melalui proses pengecekan ulang data, membandingkan antara-sumber, serta melakukan triangulasi untuk memastikan validitas dan keandalan temuan.

Ketiga proses tersebut dilakukan secara interaktif dan berulang selama penelitian berlangsung. Artinya, sejak awal pengumpulan data hingga tahap akhir analisis, peneliti terus melakukan kondensasi, penyajian, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan secara simultan. Dengan demikian, hasil analisis yang diperoleh dapat menggambarkan fenomena secara mendalam dan kredibel.[94]

Penarikan kesimpulan dalam fase ini hanya sementara dan dapat berubah jika tanpa bukti kuat. Namun, jika fase pertama sudah ditemukan bukti yang valid, maka kesimpulan yang diuraikan dari hasil upaya penarikan kesimpulan bisa dikatakan kredibel atau asli.[95]

Menurut Bogdan dan Biklen Analisis data merupakan proses pencarian dan penataan secara sistematis terhadap transkrip wawancara, catatan lapangan, serta berbagai bahan lain yang dikumpulkan peneliti. Tujuan dari proses ini adalah untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data yang telah diperoleh serta memungkinkan peneliti menyajikan temuan yang ditemukan kepada orang lain. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa analisis data tidak hanya berfokus pada kegiatan teknis dalam mengelola

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[94] Huberman, 14.

[95] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Interpretif Dan Konstruktif)*, 141.

data, tetapi juga menuntut kemampuan peneliti dalam menafsirkan makna yang terkandung di dalamnya. Dengan kata lain, analisis data bersifat reflektif dan interpretatif, karena peneliti dituntut untuk menemukan pola, makna, serta hubungan antarunsur dalam data yang dikumpulkan. Melalui proses ini, peneliti dapat menyusun hasil temuan yang bermakna dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.[96]

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Keabsahan merupakan suatu penelitian yang sangat penting untuk menilai dari penelitian tersebut. Keabsahan ini mencakup upaya membangun: kredibilitas (sepadan dengan validitas internal), transferability (sepadan dengan validitas eksternal), dependability (sepadan dengan reliabilitas), dan confirmability (sepadan dengan objektivitas). Teknik-teknik untuk menjamin keabsahan meliputi keterlibatan yang lama, pengamatan yang terus-menerus, triangulasi, diskusi dengan rekan sejawat, analisis kasus negatif, kecukupan referensial, dan pemeriksaan oleh anggota (*member check*).[97] Oleh karena itu, peneliti harus menggunakan cara atau teknik dalam melakukan pengecekan keabsahan data temuan tersebut diantaranya adalah :

a. Perpanjang Kehadiran Peneliti

Peneliti kualitatif harus membangun kredibilitas data dengan cara seperti keterlibatan jangka panjang di lapangan (*prolonged*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER PONOROGO

[96] Robert C. Bogdan and Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods (2nd Ed.)* (Boston: Allyn and Bacon, 1992), 153.

[97] Yvonna S. Lincoln and Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry* (Newbury Park: SAGE Publications, 1985), 289-290.

*engagement*), observasi terus-menerus, (*persistent observation*), triangulasi, dan wawancara kepada lembaga yang bersangkutan secara terus-menerus supaya kredibilitas data dapat dipertanggung jawabkan.[98]

b. Observasi Lebih Mendalam

Observasi mendalam dilakukan untuk menggali data yang tersembunyi, bukan yang langsung tampak. Peneliti harus dapat membedakan data yang relevan dan tidak, serta mampu mengeksplorasi makna yang terkandung di dalamnya.[99]

c. Triangulasi/Gabungan

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.[100]

Triangulasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menghilangkan keraguan, walaupun tidak sedikit yang masih belum mengetahui makna sesungguhnya dan apa tujuan dari triangulasi di dalam sebuah perikatan. Disebabkan oleh kurangnya tentang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI ASENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[98] J. David Creswell Creswell, John W, *Qualitative Inquiry Quantitative, and Research Design Choosing Among Five Approaches. 3rd Ed* (California: SAGE Publications, 2016).

[99] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021), 369.

[100] Yudin Citriadin, *Metode Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Dasar*, ed. Lubna (Mataram: Sanabil, 2020), 101.

pemahaman tersebut. Karena itu, triangulasi merupakan usaha untuk mengecek keabsahan data atau informasi dari sudut pandang yang berbeda-beda terhadap apa yang telah dilakukan oleh periset, caranya adalah dengan sebanyak mungkin mengurangi ketidakjelasan dan makna ganda yang terjadi ketika data dikumpulkan dan dianalisis.[101] Ada 3 macam triangulasi data adalah sebagai berikut :

1. Tringulasi Sumber

   Triangulasi sumber berarti menguji data dari berbagai sumber informan yang akan diambil datanya. Triangulasi sumber dapat mempertajam daya dapat dipercaya data jika dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh selama persetan melalui beberapa sumber atau informan (Sugiyono, 2017, 2016). Dengan menggunakan teknik yang sama peneliti dapat melakukan pengumpulan data terhadap beberapa sumber perikatan (informan), misalnya ketika seorang periset ingin mengumpulkan data mengenai tata tertib yang ada di sekolah maka triangulasi bisa dilakukan dengan cara mewawancarai kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, guru mata pelajaran, dan guru BK.[102]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[101] Wanda Vera Nur Fajriani et al., "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol 10 No 1 (2024): 826–33, https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272.

[102] Andarusni Alfansyur and Mariyani Mariyani, "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial," *HISTORIS : Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* Vol 5 No 2 (2020): 146–50, https://doi.org/https://doi.org/10.31764/historis.v5i2.3432.

2. Tringulasi Teknik

Triangulasi teknik, berarti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Periset menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.[103]

3. Tringulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda-beda, dengan tujuan untuk melihat apakah informasi yang diperoleh konsisten atau mengalami perubahan. Dengan cara ini, dapat diketahui apakah suatu data tetap atau berubah sesuai konteks waktunya.[104]

H. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian merupakan langkah-langkah yang sistematis dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data, menganalisisnya, dan menyimpulkan hasil guna menjawab pertanyaan penelitian atau memecahkan masalah yang akan dikaji. Tahapan ini penting untuk menjaga keilmiahan, konsistensi, dan keabsahan penelitian.

Menurut Suharsimi Arikunto tahapan penelitian merupakan suatu proses yang harus dilalui peneliti untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang dirumuskan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.[105] Ada 3 tahapan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER PONOROGO

[103] Alfansyur and Mariyani.
[104] Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 331.
[105] Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 17.

a. Tahap Pra Lapangan

Dalam tahap pra lapangan ini ada 6 tahapan yang bisa mempermudah peneliti dalam perjalanan penelitianya :

1. Menentukan masalah/Fokus Penelitian
2. Menentukan lokasi penelitian
3. Mengurus Perizinan
4. Memilih Informan
5. Menyiapkan Instrumen
6. Menyusun strategi lapangan

b. Tahap Lapangan

Ada dua tahapan lapangan yang perlu diperhatikan peneliti :

1. Peneliti harus mengenal konteks terlebih dahulu sebelum melakukan persiapan yang diperlukan saat penelitian
2. Peneliti ikut dan terlibat langsung dalam kegiatan pengumpulan data berlangsung.
3. Tahapan Pengolahan Data

Dalam hal ini peneliti diharapkan terjun langsung di lapangan dan mengumpulkan data penelitian kemudian untuk langkah seterusnya untuk mengelola dan menganalisis data.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

# BAB IV
# KEBIJAKAN PENERAPAN KURUKULUM
# DI MI MA'ARIF MOJOREJO DAN MI MA'ARIF POLOREJO

1. Kebijakan Penerapan Kurikulum di MI Ma'arif Mojorejo

Kebijakan kepala madrasah MI Ma'arif Mojorejo, Ibu Jamilatun, S.Pd, dalam merapkan kurikulum 2013 mengacu pada KMA No 184 Tahun 2019 sebagai pedoman resmi implementasi kurikulum di madrasah. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui penyesuain kurikulum di madrsah, penguatan perencanaan pembelajaran berbasis RPP, serta penerapan autentik yang menilai aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Pembaruan kebijakan kemudian diperkuat melalui KMA Nomor 450 Tahun 2024 untuk menyesuaikan implementasi dengan perkembangan kebijakan nasional. Kurikulum 2013 berorintasi pada pencapain kompetensi inti dan kompetensi dasar dengan RPP sebagai dokumen perencanaan utama, sehingga pelaksanaan cendrung terstruktur dan berbasis standar yang jelas.

Sementara itu, penerapan kurikulum merdeka pada madrasah MI Ma'arif Mojorejo telah diatarur melalui KMA Nomor 347 Tahun 2022 yang memberi ruang implementasi secara bertahap sesuai dengan kesiapan satuan pendidikan. Ketentuan ini diperjelas melalui KMA no 1503 Tahun 2025 yang menerapakan struktur kurikulum dan capaian pembelajaran sebagai acuan utama. Kurikulum merdeka menekankan fleksibilitas, pengguaan Modul Ajar, pembelajaran berbasis proyek, serta penerapan diferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

Hal ini dapat terlihat pada proses penerapan kurikulum madrasah di MI Ma'arif Mojorejo dalam hal ini disampaikan oleh kepala sekolah MI Ma'arif Mojorejo Ibu Jamilatun, S.Pd ia menyampaikan bahwa :

> "MI Ma'arif Mojorejo ini masih menerapkan Kurikulum 2013 dari tahun 2015/2016 belum sepenuhnya berjalan ketika pemerintah mulai memberlakukan Kurikulum Merdeka yang mulai diterapkan 2022/2023 Demikian pula, Kurikulum Merdeka belum sepenuhnya diterapkan ketika muncul pula ditahun 2025/2026 Kurikulum Berbasis Cinta (KBC). Kondisi perubahan kurikulum yang cepat ini menyebabkan guru bingung dalam menentukan arah penerapan, karena kurikulum lama belum sepenuhnya dijalankan tetapi kurikulum baru sudah muncul kemudian untuk menyikapi hal tersebut, guru menerapkan strategi fleksibel dalam pembelajaran. Guru mengkombinasikan komponen kurikulum lama dan baru, misalnya menggunakan prinsip K-13 yang sudah familiar, kemudian menyisipkan elemen KBC dan pendekatan *deep learning*. Dengan cara ini, pembelajaran menjadi perpaduan antara kurikulum lama dan baru, sehingga guru tetap dapat menyampaikan materi secara efektif sambil menyesuaikan diri dengan kebijakan kurikulum yang terus berubah"[106]

Kebijakan kurikulum di MI Ma'arif Mojorejo dilaksanakan secara bertahap dan berlangsung dengan cepat. Hal ini berdampak pada cara pembelajaran diterapkan di madrasah ini, karena setiap kebijakan kurikulum memiliki ciri khas dan alat pembelajaran yang berbeda. Kepala madrasah menyatakan bahwa awalnya madrasah menerapkan Kurikulum 2013 sebagai panduan untuk proses pembelajaran. Kebijakan ini berdasarkan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019. Dalam kurikulum tersebut, guru melaksanakan pembelajaran dengan metode saintifik yang mencakup aktivitas mengamati, bertanya, bereksperimen, berpikir, dan berkomunikasi. Selain itu, guru juga membuat materi pembelajaran berupa Rencana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[106]. Lihat Transkip Wawancara, Nomor 01/W/MIS/20-XI/2025.

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), silabus, serta melakukan penilaian autentik yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Dalam wawancara kami dengan kepala madrasah Ibu Jamilatun, S.Pd megungkapkan bahwa Pada tahap awal, madrasah masih menerapkan Kurikulum 2013 dalam pelaksanaan pembelajaran. Guru menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) serta melaksanakan pembelajaran tematik sesuai dengan pedoman yang berlaku. Namun demikian, implementasi Kurikulum 2013 di madrasah belum sepenuhnya berjalan secara optimal ketika pemerintah mulai memperkenalkan Kurikulum Merdeka. Kebijakan ini mulai diberlakukan di madrasah melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 pada saat Kurikulum 2013 masih dilaksanakan, pemerintah memperkenalkan Kurikulum Merdeka. Kemudian, para guru mulai menyesuaikan alat pembelajaran, karena dalam Kurikulum Merdeka tidak lagi menggunakan RPP seperti sebelumnya, melainkan modul ajar dan Alur Tujuan Pembelajaran. Kepala madrasah juga mengungkapkan bahwa Kurikulum Merdeka memberikan lebih banyak kebebasan kepada guru dalam merancang pembelajaran. Pendekatan pembelajaran lebih difokuskan pada kegiatan proyek yang bertujuan untuk meningkatkan literasi, numerasi, dan karakter siswa.[107]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[107] "Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 Tentang Implementasi Kurikulum Pada RA, MI, MTs, MA, Dan MAK" (2024), https://mapendakuningan.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/pedoman-implementasi-kurikulum-pd-ra-mi-mts-ma-dan-mak.pdf.

Selanjutnya, ketika madrasah mulai beradaptasi dengan penerapan Kurikulum Merdeka, muncullah kebijakan baru yang menekankan pentingnya nilai dalam proses belajar, yaitu Kurikulum Berbasis Cinta. Kebijakan ini didukung oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 1503 Tahun 2025. Kepala madrasah menjelaskan situasi tersebut dalam wawancara berikut: "Perubahan kurikulum terjadi dengan sangat cepat. Kurikulum 2013 belum sepenuhnya diterapkan, lalu muncul Kurikulum Merdeka. Setelah itu, diperkenalkan lagi penguatan Kurikulum Berbasis Cinta yang fokus pada nilai kasih sayang dan karakter dalam proses pembelajaran. Kepala madrasah menyatakan bahwa perubahan kebijakan kurikulum yang cepat ini menyebabkan guru mengalami kebingungan dalam menentukan arah penerapan pembelajaran yang mengharuskan para guru untuk melakukan penyesuaian secara bertahap. Para guru perlu memahami alat-alat pembelajaran yang baru dan tetap menjalankan proses pembelajaran dengan secara efektif.[108]

Dalam merespons situasi tersebut, kepala madrasah mengungkapkan bahwa para pengajar di madrasah menggunakan metode pengajaran yang lebih fleksibel. Mereka masih memanfaatkan beberapa elemen dari Kurikulum 2013 yang telah mereka kuasai, sekaligus menggabungkan pendekatan dari Kurikulum Merdeka seperti pembelajaran berbasis proyek dan penyesuaian dalam pembelajaran. Di samping itu, nilai-nilai yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[108] "Keputusan Menteri Agama Nomor 1503 Tahun 2025 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum RA, MI, MTs, MA, Dan MAK" (2025), https://jdih.kemenag.go.id/yzxkthpo/regulation/keputusan-menteri-agama-1503-2025_251202.pdf.

ditekankan dalam Kurikulum Berbasis Cinta juga dihadirkan dalam proses belajar mengajar melalui pengembangan karakter, sikap saling menghormati, dan kepedulian sosial.

Dengan cara tersebut, proses pembelajaran di madrasah tetap berjalan meskipun terjadi perubahan kebijakan kurikulum secara bertahap Dalam strategi fleksibel ini membantu guru tetap dapat mengajar dengan percaya diri sambil menyesuaikan diri dengan tuntutan kurikulum baru hal tersebut juga dibenarkan oleh Ibu Ria Widayanti beliau merupakan wakil kepala madrasah bidang kurikulum yang menyatakan :

> "Perubahan kurikulum yang terjadi secara berulang menimbulkan kebingungan bagi guru dalam proses perencanaan pembelajaran. Meskipun Kurikulum Merdeka telah berjalan selama dua tahun dan memasuki tahun ketiga implementasi, kebijakan tersebut kembali mengalami penyesuaian melalui pengenalan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) dengan model pembelajaran *deep learning*. Walaupun perubahan tersebut tidak bersifat substitusi penuh, guru tetap harus menyisipkan elemen KBC dan pendekatan deep learning ke dalam kurikulum yang sudah dirancang sebelumnya. Hal ini semakin kompleks karena madrasah memiliki dokumen kurikulum tersendiri, yaitu Kurikulum Madrasah yang mencakup struktur kurikulum dan komponen perencanaan lainnya. Akibatnya, pada tahap penyusunan kurikulum, guru menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam menyesuaikan materi dan perangkat pembelajaran agar selaras dengan kebijakan baru"[109]

Berdasarkan wawancara kami dengan waka kurikulum MI Ma'arif ojorejo Ibu Ema Fatmwati,S.Pd bahwasanya guru di MI Ma'arif Mojorejo, diketahui bahwa perubahan kebijakan kurikulum yang terjadi secara berulang menimbulkan kebingungan dalam proses perencanaan pembelajaran. Waka kurikulum menyatakan bahwa setiap perubahan

[109]. Lihat Transkip Wawancara Nomor 01/W/MIS/20-XI/2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER PONOROGO

kebijakan membawa penyesuaian baru terhadap perangkat pembelajaran yang telah disusun sebelumnya

Waka kurikulum menjelaskan bahwa Kurikulum Merdeka sejatinya sudah diterapkan selama dua tahun dan kini memasuki tahun ketiga pelaksanaannya. Namun, ketika para guru mulai memahami dan menyesuaikan alat pembelajaran mereka dengan kurikulum tersebut, muncullah kebijakan baru yang memperkenalkan nilai-nilai positif melalui Kurikulum Berbasis Cinta dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Situasi ini mengharuskan para guru untuk kembali menyesuaikan rencana pembelajaran yang sudah mereka buat. Waka kurikulum menyatakan dalam sebuah wawancara seperti berikut: "Ketika kami mulai familiar dengan Kurikulum Merdeka, kemudian muncul penguatan dari Kurikulum Berbasis Cinta. Meskipun tidak menggantikan kurikulum yang sudah ada, kami harus tetap menyesuaikan alat-alat pembelajaran agar mencakup nilai-nilai cinta dan pendekatan pembelajaran mendalam.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diidentifikasi bahwa kebingungan yang dialami oleh guru disebabkan oleh beberapa aspek. Pertama, perubahan pada kebijakan kurikulum terjadi dalam waktu yang cukup cepat, sehingga para guru belum sepenuhnya menguasai penerapan kurikulum yang lama. Kedua, setiap kebijakan kurikulum memiliki alat bantu belajar yang berbeda, sehingga guru perlu melakukan penyesuaian terhadap rencana pembelajaran yang telah disusun sebelumnya. Ketiga, madrasah memiliki dokumen Kurikulum Madrasah yang mencakup struktur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

kurikulum serta berbagai elemen rencana pembelajaran. Ketika muncul kebijakan baru, guru harus memperbarui dokumen tersebut agar tetap sesuai dengan kebijakan pendidikan yang ada. Kondisi ini membuat proses penyusunan modul ajar menjadi lebih rumit di samping itu guru perlu menyesuaikan konten, metode pembelajaran, serta alat perencanaan seperti modul ajar dan Alur Tujuan Pembelajaran agar sesuai dengan kebijakan terbaru.

Perubahan kurikulum yang berlangsung terlalu cepat menimbulkan tantangan tersendiri bagi guru dalam proses perencanaan dan penyesuaian pembelajaran. Ketika Kurikulum Merdeka baru berjalan selama dua tahun dan sedang memasuki tahun ketiga implementasi, muncul kembali kebijakan baru berupa Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) dengan penekanan pada model pembelajaran *deep learning*.

> "Meskipun perubahan kebijakan tidak menggantikan Kurikulum Merdeka secara keseluruhan, dokumen pembelajaran dianalisis untuk melihat bagaimana guru menyisipkan elemen KBC dan pendekatan *deep learning* ke dalam perencanaan pembelajaran. Selain itu, kajian dokumentasi juga mencakup struktur kurikulum, tujuan pembelajaran, serta perencanaan program sekolah sebagai bentuk penyesuaian kurikulum di madrasah".[110]

Dari data diatas dapat diperoleh dari berbagai jenis dokumen akademis yang digunakan dalam proses pendidikan di madrasah. Dokumen-dokumen tersebut mencakup susunan kurikulum madrasah, Modul ajar, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang masih diterapkan pada beberapa mata pelajaran, serta dokumen-dokumen program madrasah seperti rencana

[110] Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor 02/D/MIS/15-XII/2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

kerja tahunan dan program penguatan karakter. Analisis dokumen dilakukan guna mengetahui cara guru menyesuaikan pelaksanaan Kurikulum Merdeka dengan pengintegrasian elemen Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) dan pendekatan pembelajaran mendalam dalam perencanaan proses belajar mengajar.

Berdasarkan dokumen mengenai struktur kurikulum, madrasah masih menggunakan kerangka dari Kurikulum Merdeka sebagai landasan untuk melaksanakan pembelajaran. Struktur kurikulum ini mencakup pembagian mata pelajaran, alokasi waktu untuk belajar, serta penguatan kegiatan proyek yang mendukung profil pelajar. Namun, pada beberapa dokumen program madrasah, terdapat penyesuaian yang menekankan pentingnya nilai-nilai karakter, empati, dan kepedulian sosial sebagai bagian dari penerapan prinsip Kurikulum Berbasis Cinta. Penyesuaian ini tercermin dalam program-program madrasah yang meliputi pembiasaan sikap religius, kegiatan sosial, serta model pembelajaran yang mengutamakan sikap saling menghormati.

Pada dokumen modul ajar dan RPP, tampak bahwa guru mulai menyesuaikan metode pengajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Kegiatan belajar tidak hanya terpusat pada penyampaian informasi, tetapi juga mendorong siswa untuk berdiskusi, merenung, serta menyelesaikan masalah ringan.[111]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PONOROGO

[111] Ference Marton, Noel Hounsell, and Noel Entwistle, *The Experience of Learning* (Skotlandia.: Scottish Academic Press, 1997). 52-54.

Dalam sejumlah modul pengajaran juga terdapat kegiatan proyek kecil yang mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Ini menunjukkan adanya usaha dari guru untuk mendorong pembelajaran yang lebih bermakna dan mendalam. Selain itu, dokumen perencanaan program madrasah menunjukkan adanya penggabungan kegiatan pembelajaran dengan program pembentukan karakter. Program ini mencakup aktivitas literasi, kebiasaan beribadah secara bersama, kegiatan sosial, serta kerja sama antarsiswa. Program ini menjadi bagian dari strategi madrasah untuk menyemai nilai-nilai kepedulian, tanggung jawab, dan sikap saling menghargai yang sesuai dengan prinsip Kurikulum Berbasis Cinta.

Jadi secara keseluruhan, data dokumentasi mengindikasikan bahwa madrasah tidak sepenuhnya mengubah struktur Kurikulum Merdeka. Para guru tetap menggunakan alat pembelajaran yang mengikuti kurikulum tersebut. Namun, dalam pelaksanaan perencanaan pembelajaran, ada penyesuaian yang dilakukan dengan menambah nilai karakter, menyelenggarakan kegiatan refleksi, serta mengenakan metode pembelajaran yang mendorong partisipasi aktif siswa. Penyesuaian ini menjadi bentuk integrasi antara Kurikulum Merdeka dan elemen Kurikulum Berbasis Cinta serta pendekatan deep learning dalam proses pengajaran di madrasah.

Meskipun kebijakan baru tidak menggantikan Kurikulum Merdeka secara keseluruhan, analisis dokumen menunjukkan bahwa guru telah menyesuaikan perangkat pembelajaran dengan menyisipkan elemen KBC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

dan pendekatan *deep learning*. Penyesuaian ini terlihat dalam struktur kurikulum, tujuan pembelajaran, dan perencanaan program sekolah, yang menunjukkan bahwa implementasi kurikulum dilakukan secara adaptif dan kontekstual sesuai kondisi madrasah, sejalan dengan pandangan Fullan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi kemampuan sekolah dan guru dalam menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan dan karakteristik lembaga Pendidikan.

Oleh karena itu, guru mengalami kesulitan dalam menyesuaikan dokumen kurikulum yang sudah ada dengan tuntutan kebijakan baru. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kurikulum yang tidak stabil dapat mempengaruhi efektivitas perencanaan pembelajaran dan menambah beban adaptasi bagi guru tetapi dengan berjalannya waktu di MI Ma'arif mojorejo ini sudah sepenuhnya menggunakan kurikulum Merdeka Sebagaimana yang disampaikan oleh Khoirul Muntari

> "Bahwasanya untuk perubahan dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2025/2026 MI Ma'arif Mojorejo sudah sepenuhnya menggunakan kurikulum Merdeka pada seluruh jenjang kelas. Penerapan kurikulum tersebut tidak dilakukan secara langsung pada semua kelas, melainkan dilaksanakan secara bertahap. Pada tahun ajaran sebelumnya, implementasi Kurikulum Merdeka dimulai pada kelas III hingga kelas VI. lalu 2 tahun berikutnya dilanjutkan untuk kelas I hingga kela III Seiring dengan evaluasi dan kesiapan satuan pendidikan, pada tahun ajaran 2026/2027 Kurikulum Merdeka telah diberlakukan secara merata di seluruh kelas".[112]

Berdasarkan dari analisis terhadap dokumen pembelajaran di madrasah, terungkap bahwa format utama yang diterapkan oleh para guru masih

[112].Lihat Transkip Nomor 01/W/MIS/15-XII/2025.

berpedoman pada Kurikulum Merdeka. Hal ini dapat dilihat dari dokumen perencanaan pengajaran yang masih menggunakan alat seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)/modul ajar, serta dokumen evaluasi yang disusun sesuai dengan struktur kurikulum tersebut. Dokumen-dokumen ini menunjukkan bahwa madrasah tidak melakukan perubahan secara keseluruhan pada struktur kurikulumnya, melainkan tetap mempertahankan sistem yang sudah ada.

Namun, dari beberapa dokumen juga menunjukkan adanya modifikasi dalam perencanaan pendidikan. Modifikasi tersebut terlihat dari dimasukkannya nilai-nilai karakter dalam tujuan dan aktivitas pembelajaran. Para guru menyertakan nilai-nilai seperti kepedulian, tanggung jawab, dan sikap saling menghargai dalam kegiatan belajar. Di samping itu, dalam modul pembelajaran juga terdapat kegiatan refleksi yang diletakkan di akhir proses belajar. Refleksi ini bertujuan untuk membantu siswa memahami pengalaman belajar yang telah mereka jalani.

Dokumentasi pembelajaran pun mengungkapkan penggunaan metode yang mendorong partisipasi aktif siswa. Dalam sejumlah modul pembelajaran, terdapat kegiatan diskusi kelompok, tanya jawab, dan aktivitas berbasis tugas yang mengharuskan siswa terlibat langsung dalam proses pengajaran. Pola aktivitas ini mencerminkan usaha guru untuk menciptakan proses belajar yang lebih melibatkan semua peserta didik.

Pada tahun ajaran 2026/2027, madrasah ini telah sepenuhnya menerapkan Kurikulum Merdeka pada seluruh jenjang kelas. Penerapan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

kurikulum tersebut dilakukan secara bertahap, yang pada tahun ajaran sebelumnya dimulai dari kelas III hingga kelas VI lalu setelah bebrapa tahun kemudian baru kelas I hingga kelas III dari Pola implementasi bertahap ini sejalan dengan teori *Diffusion of Innovation* yang dikemukakan oleh Rogers, yang menekankan bahwa adopsi suatu inovasi pendidikan memerlukan proses bertahap agar dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif oleh seluruh warga sekolah.[113] Selain itu, sebagaimana dikemukakan oleh Fullan, keberhasilan implementasi kurikulum sangat dipengaruhi oleh kesiapan institusi, termasuk aspek sumber daya manusia, budaya sekolah, dan evaluasi berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan Kurikulum Merdeka secara merata pada tahun ajaran 2026/2027 mencerminkan kesiapan madrasah dalam mengelola perubahan kurikulum secara sistematis dan berkelanjutan.[114]

Namun, dalam konteks pelaksanaan kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah (MI Ma'arif Mojorejo), masih dijumpai sejumlah Kendala utama dalam pelaksanaan kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah terletak pada aspek modul ajar hal ini disampaikan langsung oleh ibu Jamilatun, yaitu :

> "Modul ajar yang tersedia belum sepenuhnya tertata secara sistematis, sehingga kurikulum belum dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu, kebijakan kurikulum yang kerap mengalami perubahan menyebabkan ketidakstabilan dalam implementasi di lapangan. Kondisi yang berubah-ubah tersebut berdampak pada kurang maksimalnya penerapan kurikulum di sekolah. Hingga saat ini, kurikulum masih berada dalam tahap penyempurnaan; bahkan ketika baru memasuki tahun kedua implementasi, telah muncul kebijakan

[113] Everett M Rogers, *Diffusion of Innovations (5th Ed.).* (New York: Free Press, 2003), 48

[114] Fullan, *The New Meaning of Educational Change, Fourth Edition*, 60.

> baru yang berbeda dari sebelumnya. Akibatnya, guru sering kali berada pada posisi yang sulit dalam menentukan acuan yang harus digunakan, sehingga berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan pembelajaran di kelas."[115]

Dari data diatas Pelaksanaan kurikulum di madrasah masih kurang optimal. Hal ini disampaikan oleh Ibu Jamilatun, S.Pd. menyebutkan bahwa salah satu hambatan utama adalah kurangnya modul ajar yang terorganisir dengan baik. Modul ajar yang tersedia belum disusun dengan cara yang terstruktur sesuai dengan kebutuhan pengajaran. Hal ini menyulitkan para guru dalam merancang perencanaan pembelajaran yang sejalan dengan tujuan kurikulum. Selain itu, beliau juga menekankan bahwa kebijakan kurikulum sering berubah. Perubahan ini menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan di sekolah. Guru perlu menyesuaikan kembali alat dan bahan ajar setiap kali ada perubahan kebijakan. Proses penyesuaian ini membutuhkan waktu dan pemahaman baru, sehingga penerapan kurikulum tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Ibu jamilatun kembali menambahkan bahwa kurikulum yang sedang diterapkan masih berada pada tahap penyempurnaan. Bahkan ketika implementasi baru berjalan sekitar dua tahun, telah muncul kebijakan baru yang berbeda dari kebijakan sebelumnya. Situasi ini membuat guru berada pada posisi yang sulit dalam menentukan acuan pembelajaran yang harus digunakan. Akibatnya, guru sering mengalami kebingungan dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD MUZAKKI SIDDIQ
PONOROGO

[115] Lihat Transkip Wawancara Nomor 03/W/MIS/15-XII/2025

menyelaraskan perencanaan pembelajaran dengan kebijakan kurikulum yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa ketidakteraturan modul ajar serta perubahan kebijakan kurikulum yang cukup sering menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kurikulum di sekolah. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan pembelajaran di kelas karena guru harus terus menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan yang terjadi.

Dalam konteks penelitian kualitatif, bahwa proses adaptasi guru terhadap perubahan kurikulum merupakan salah satu aspek utama dalam pelaksanaan pembelajaran. Implementasi kurikulum yang berlangsung tidak hanya berfokus pada kesesuaian dengan dokumen kurikulum, tetapi juga pada kemampuan guru dalam menafsirkan, menyesuaikan, dan mengimplementasikannya dalam kegiatan pembelajaran di kelas, Selain itu kesiapan perangkat ajar dan stabilitas kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberlangsungan implementasi kurikulum. Ditemukan adanya ketidakteraturan dan ketidaksetaraan dalam penyediaan modul ajar, serta perubahan kebijakan yang terjadi secara berulang. Kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan pembelajaran yang belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.[116]

Untuk memastikan validitas temuan tersebut, keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui triangulasi teknik, yaitu dengan membandingkan

[116] Lihat Transkip Observasi Nomor 03/O/MIS/15-XII/2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data hasil wawancara dengan guru mengenai pemahaman dan penerapan KBC serta pendekatan *deep learning* dibandingkan dengan hasil observasi proses pembelajaran di kelas dan hasil analisis dokumen berupa perangkat pembelajaran serta dokumen Kurikulum Madrasah. Triangulasi ini dilakukan untuk memastikan konsistensi, akurasi, dan keandalan data yang diperoleh, sehingga analisis terhadap implementasi kurikulum dapat menggambarkan kondisi nyata di lapangan secara menyeluruh.

Dengan demikian, implementasi kurikulum 2013, kurikulum merdeka, dan KBC di MI Ma'arif Mojorejo menunjukkan adanya kesenjangan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia serta belum optimalnya fungsi supervisi madrasah. Oleh karena itu kesenjangan implementasi Kurikulum 2013, Kurikulum Merdeka, dan KBC di MI Ma'arif Mojorejo tampak pada ketidaksesuaian antara standar kurikulum dan praktik pembelajaran, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia dan lemahnya pengawasan madrasah.

Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia. Para guru di MI Ma'arif Mojorejo memiliki pemahaman yang cukup baik tentang Kurikulum 2013 dan mulai beradaptasi dengan Kurmer, namun mereka belum sepenuhnya mampu menjalankan pembelajaran diferensiatif dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

konsisten. Pemahaman mengenai konsep KBC juga masih bersifat umum dan belum terintegrasi dalam praktik pembelajaran secara sistematis.

2. Kebijakan Penerapan Kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Polorejo

Kebijakan kepala madrasah MI Ma'arif Polorejo, Bapak Ahmad Suyono, S.Pd dalam menerapakan kurikulum Merdeka mengacu pada KMA Nomor 450 Tahun 2024 tentang implementasi kurikulum pada madrasah MI Ma'arif Polorejo, yang menjadi dasar bagi madrasah dalam menyesuaikan struktur kurikulum, perangkat pembelajaran, serta sistem penilaian Kepala madrasah menetapkan kebijakan internal untuk mulai menerapkan Kurikulum Merdeka secara bertahap pada tingkat kelas tertentu. Kebijakan ini disusun berdasarkan arahan regulasi nasional serta kebutuhan madrasah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.[117] Hal ini tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kepmendikbudristek) Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa satuan pendidikan dapat mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara bertahap sesuai kesiapan sekolah.[118] Selain itu, penerapan kurikulum juga merujuk pada kebijakan sebelumnya dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 yang mengatur pedoman implementasi kurikulum pada madrasah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI ASENG MUHAMMAD DESARI
PONOROGO

[117] Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 Tentang Implementasi Kurikulum Pada RA, MI, MTs, MA, dan MAK.

[118] "Kepmendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Standar Pendidikan Guru" (2922), https://konten.usu.ac.id/storage/year/2025-07/satker/kTQsW/statis/regulation/Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidika Guru.pdf.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Ahmad Suyono, S.Pd selaku kepala sekolah MI Ma'arif Polorejo yaitu :

> " Ketika kurikulum yang berlaku itu kurikulum 2013, kita mengikuti kurikulum 2013. Sekarang kan sudah masuk di kurikulum merdeka. Dan untuk akhir tahun ini, tahun ajaran 2025-2026, sudah masuk di kurikulum yang menggunakan metode *deep learning* dan kurikulum berbasis cinta sekarang. Apa saja kurikulumnya, yang penting itu adalah komitmen dari guru. Komitmen guru, para sekolah, dan keluarga madrasah untuk saling mendukung dan meningkatkan kepotensi mereka. Kita kan sering mengikuti diklat, mengikuti kekembangan kurikulum yang penting. Kita tidak ketinggalan. Kita juga sering juga mengundang pengawas atau dari sumber lain untuk mendilat guru-guru kita, kita datangkan kesini selain kita ikut juga ke program-progra pelatihan diluar ".[119]

MI Ma'arif Polorejo ini selalu beradaptasi dalam melaksanakan pembelajaran berdasarkan kebijakan kurikulum yang sedang berlaku. Kepala madrasah menjelaskan bahwa saat pemerintah memperkenalkan Kurikulum 2013, madrasah langsung mengadopsi dan menerapkan kurikulum tersebut dalam proses pembelajaran. Kemudian, saat kebijakan mengalami perubahan dan memasuki fase penerapan Kurikulum Merdeka, madrasah kembali menyesuaikan alat dan metode pembelajaran dengan ketentuan yang baru dan begitu juga menyampaikan bahwa menjelang akhir tahun ajaran 2025–2026, terdapat penguatan untuk pendekatan pembelajaran melalui metode pembelajaran mendalam dan konsep Kurikulum Berbasis Cinta. Perubahan ini dianggap sebagai bagian dari perkembangan kebijakan pendidikan yang berlangsung. Oleh karena itu, madrasah berusaha untuk mengikuti semua perubahan kebijakan agar tetap relevan dalam penerapan kurikulum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[119] Lihat Transkip Wawancara Nomor 01/W/MIS/13-XI/2025.

Lebih jauh, Kepala Madrasah menekankan bahwa keberhasilan penerapan kurikulum tidak hanya bergantung pada kebijakan yang ada, tetapi juga pada dedikasi semua pihak yang terlibat. Dedikasi para guru, pimpinan madrasah, serta dukungan dari komunitas madrasah merupakan aspek penting dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan pengembangan kemampuan siswa. Untuk meningkatkan kesiapan para guru, madrasah aktif terlibat dalam berbagai kegiatan pengembangan profesional. Para guru sering mengikuti pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kemajuan kurikulum. Selain mengikuti pelatihan di luar lingkungan madrasah, pihak sekolah juga mengundang pengawas atau pembicara dari luar untuk memberikan bimbingan dan pelatihan kepada guru di dalam madrasah. Kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman guru mengenai perubahan kurikulum serta meningkatkan kompetensi mereka dalam melaksanakan pengajaran di kelas.

Penerapan kurikulum merupakan proses mengaktualisasikan rancangan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran di tingkat satuan pendidikan. Proses ini tidak hanya mencakup penyampaian materi ajar, tetapi juga bagaimana guru menerjemahkan tujuan pembelajaran, pendekatan pedagogis, strategi pengajaran, dan mekanisme penilaian ke dalam kegiatan belajar yang relevan dengan kebutuhan peserta didik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Hal ini juga disampaikan oleh ibu Ema Fatmawati, M.Pd beliau selaku wakil ketua bidang kurikulum MI Ma'arif Polorejo bahwasanya :

> "Kurikulum yang berlaku di madrasah ini telah menggunakan Kurikulum Merdeka. Penerapannya tidak dilakukan secara sekaligus, melainkan secara bertahap. Alhamdulillah, pada tahun ini seluruh kelas, mulai dari kelas I sampai kelas VI, telah menggunakan Kurikulum Merdeka.

> Meskipun hampir setiap pergantian menteri diikuti dengan perubahan kurikulum, hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Jika perubahan tidak dilakukan, dunia pendidikan akan tertinggal oleh perkembangan zaman. Beliau juga tidak mempermasalahkan perubahan tersebut karena pembaruan kurikulum memang perlu dilakukan seiring dengan kemajuan zaman. Oleh karena itu, beliau menyampaikan bahwa setiap ada pembaruan kurikulum, pendidik harus terus belajar dan menyesuaikan diri. Apabila tidak mau mempelajarinya, pendidik akan tersisih dan tidak lagi dibutuhkan. Dengan demikian, menurut beliau, perubahan kurikulum bukanlah beban, melainkan langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah agar pendidikan tidak tertinggal oleh perkembangan zaman".[120]

MI Ma'arif Polorejo telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dalam metode pengajaran. Ibu Ema Fatmawati menjelaskan bahwa penerapan kurikulum itu tidak dilakukan sekaligus di semua tingkat kelas, tetapi secara bertahap. Pada fase awal, kurikulum diterapkan pada beberapa tingkat kelas terlebih dahulu, sebelum secara perlahan diperluas hingga mencakup seluruh kelas. Ibu Ema Fatmawati juga menyampaikan bahwa tahun ini semua kelas, dari kelas I hingga kelas VI, telah menerapkan Kurikulum Merdeka dalam proses pembelajaran di madrasah. Ibu Ema Ftmawati juga membahas dinamika perubahan kebijakan kurikulum yang sering terjadi dalam sistem pendidikan di tanah air. Ia berpendapat bahwa pergeseran kurikulum yang sering terjadi, termasuk yang muncul saat terjadi pergantian menteri, adalah hal yang normal dalam sektor pendidikan. Perubahan ini dianggap sebagai usaha pemerintah untuk menyelaraskan sistem pendidikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan era saat ini.

Perubahan dalam kurikulum seharusnya tidak dianggap sebagai beban oleh para pendidik. Sebaliknya, hal tersebut seharusnya menjadi pendorong

[120] Lihat Transkip Wawancara Nomor 02/W/MIS/26-XII/2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD MUHAMMAD BESARI PONOROGO

bagi guru untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuannya. Informan mengungkapkan bahwa setiap kali ada pembaruan kurikulum, pendidik perlu memahami kebijakan dan metode pembelajaran yang baru agar dapat menyesuaikan cara pengajaran di kelas.

Menurut waka kurikulum MI Ma'arif Polorejo guru yang enggan mempelajari perkembangan kurikulum berisiko untuk ketinggalan dan mengalami kesulitan dalam memenuhi tuntutan pendidikan yang terus berubah. Oleh karena itu, kemampuan untuk beradaptasi dan keinginan untuk terus belajar sangat penting bagi pendidik dalam menghadapi perubahan kurikulum. Dengan demikian, informan melihat bahwa perubahan kurikulum merupakan langkah yang penting agar sistem pendidikan tetap relevan dan bisa mengikuti perkembangan zaman.

Penerapan kurikulum merupakan proses yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan satuan pendidikan. Menurut Fullan, implementasi kurikulum tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan memerlukan tahapan, penyesuaian, dan kesiapan dari berbagai unsur pendidikan, seperti guru, peserta didik, sarana prasarana, serta budaya sekolah.[121] Hal ini sejalan dengan kondisi madrasah yang menerapkan Kurikulum Merdeka secara bertahap hingga akhirnya dapat diterapkan di seluruh kelas dari kelas I sampai kelas VI di MI Ma'arif Polorejo.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
KIAI HAJI MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[121] Michael Fullan, *The New Meaning of Educational Change Fourth Edition* (New York: Teachers College Press, 2007). 121.

Dengan demikian, pembaruan kurikulum tidak dipandang sebagai beban, melainkan sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Menurut ibu Ema Fatmawati, M.Pd bahwasanya dengan kurikulum yang sering berganti itu bukan beban tapi itu harus dilakukan dengan alasan supaya tidak ketinggalan zaman seperti halnya berikut ini :

> "Perkembangan zaman yang semakin pesat, khususnya dalam bidang teknologi, menuntut dunia pendidikan untuk terus melakukan penyesuaian. Apabila pendidikan tidak mampu mengikuti perkembangan tersebut, maka akan berpotensi mengalami ketertinggalan. Oleh karena itu, pembaruan kurikulum menjadi hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai upaya untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Pembaruan kurikulum tidak seharusnya dipandang sebagai beban, melainkan sebagai proses pembelajaran dan penyesuaian yang perlu dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Dengan demikian, melalui pembaruan kurikulum, pendidikan diharapkan mampu secara aktif merespons perkembangan zaman, sehingga peserta didik dan pendidik tidak tertinggal, melainkan mampu menjadi pelaku yang siap menghadapi perubahan". [122]

Paparan data dari wawancara menunjukkan bahwa para informan menganggap kemajuan zaman, khususnya di bidang teknologi, sebagai elemen krusial yang mendorong perubahan dalam sektor pendidikan. Mereka menjelaskan bahwa kemajuan teknologi yang begitu pesat memaksa sistem pendidikan untuk terus beradaptasi. Jika dunia pendidikan tidak mengikuti perkembangan ini, ada risiko pendidikan akan terabaikan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PONOROGO

[122] Lihat Transkip Wawancara Nomor 04/W/MIS/26-XII/2025.

Ibu Fatmawati, M.Pd. juga menekankan bahwa salah satu cara untuk melakukan adaptasi dalam pendidikan adalah melalui pembaruan kurikulum. Mereka berpendapat bahwa peremajaan kurikulum merupakan langkah vital bagi Indonesia untuk menyelaraskan sistem pendidikannya dengan kemajuan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Kurikulum perlu diupdate secara berkala agar konten pembelajaran, metode pengajaran, dan tujuan pendidikan tetap sesuai dengan perkembangan zaman.

Menurut Fullan, perubahan kurikulum tidak bersifat instan, melainkan memerlukan perencanaan yang matang, kesiapan sumber daya manusia, dukungan sarana prasarana, serta pembentukan budaya sekolah yang adaptif dan inovatif. Dalam konteks ini, guru berperan sebagai aktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi kurikulum. Guru tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran, tetapi juga harus mampu mengembangkan kompetensi profesionalnya secara berkelanjutan agar dapat menghadapi tantangan pembelajaran di era digital.[123]

Dari pemaparan diatas kemudian ditambahkan oleh ibu Ayati Robiah bahwa :

> "Seluruh kelas saat ini telah menerapkan Kurikulum Merdeka. Penerapan kurikulum ini menjadi upaya strategis agar sekolah tidak tertinggal dari sekolah-sekolah di wilayah perkotaan. Pergantian kurikulum bukan merupakan beban bagi pendidik maupun satuan pendidikan, melainkan sebuah kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan daya saing dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi yang semakin canggih, dunia pendidikan

[123] Fullan, *The New Meaning of Educational Change, Fourth Edition*.

dituntut untuk beradaptasi terhadap berbagai perubahan. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan dan kemauan untuk terus mempelajari hal-hal baru agar perubahan tersebut tidak menjadi hambatan dalam proses pembelajaran".[124]

Paparan data wawancara menunjukkan bahwa seluruh kelas di madrasah saat ini telah menerapkan Kurikulum Merdeka dalam proses pembelajaran. Informan menjelaskan bahwa penerapan kurikulum tersebut dilakukan sebagai langkah strategis agar madrasah mampu mengikuti perkembangan pendidikan dan tidak tertinggal dari sekolah-sekolah yang berada di wilayah perkotaan. Dengan menerapkan Kurikulum Merdeka pada seluruh tingkat kelas, madrasah berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran serta menyesuaikan diri dengan arah kebijakan pendidikan yang sedang berlaku. Ibu Ayati Robiah juga menyampaikan bahwa pergantian kurikulum bukan merupakan sesuatu yang perlu dipandang sebagai beban bagi pendidik maupun satuan pendidikan. Menurutnya, perubahan kurikulum merupakan kebijakan yang wajar dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkuat daya saing lembaga pendidikan

Selain itu, beliau juga menekankan bahwa perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat turut mempengaruhi sistem pendidikan. Perkembangan tersebut menuntut dunia pendidikan untuk mampu beradaptasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, guru dan pihak sekolah perlu memiliki kesiapan serta kemauan untuk terus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[124] Lihat Transkip Wawancara Nomor 01/W/MIS/26-XII/2025

mempelajari hal-hal baru yang berkaitan dengan kebijakan kurikulum maupun metode pembelajaran. Berdasarkan penjelasan Ibu Ayati Robiah tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan Kurikulum Merdeka di madrasah tidak hanya bertujuan untuk mengikuti kebijakan pemerintah, tetapi juga menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan tuntutan zaman. Sikap terbuka terhadap perubahan serta kemauan untuk terus belajar menjadi faktor penting agar perubahan kurikulum tidak menjadi hambatan, melainkan dapat mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif.

Penerapan Kurikulum Merdeka pada seluruh kelas merupakan bentuk respons sekolah terhadap kebijakan pendidikan nasional dan tuntutan perkembangan zaman. Dalam konteks teori implementasi kurikulum, Michael Fullan menegaskan bahwa perubahan kurikulum tidak hanya berkaitan dengan penggantian dokumen kebijakan, tetapi terutama pada proses perubahan yang terjadi pada pelaksana di tingkat sekolah. Fullan menyatakan bahwa "*educational change depends on what teachers do and think*" Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka sangat ditentukan oleh kesiapan, pemahaman, serta sikap pendidik dalam menerjemahkan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran.[125]

Berdasarkan hasil observasi di madrasah, penerapan kurikulum telah disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama

[125] Fullan, *The New Meaning of Educational Change*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER PONOROGO

dalam acuan KMA Nomor 450 Tahun 2024 Hal tersebut ditunjukkan oleh kesesuaian dokumen kurikulum madrasah dengan regulasi yang berlaku, seperti penggunaan dokumen Kurikulum Operasional Madrasah (KOM) yang mengacu pada pedoman terbaru dari Kementerian Agama . Selain itu, madrasah secara aktif mengikuti perkembangan dan perubahan kebijakan kurikulum. Bukti observasi menunjukkan bahwa madrasah telah melakukan penyesuaian terhadap perangkat pembelajaran, yang terlihat dari penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)/Modul Ajar yang selaras dengan struktur kurikulum terbaru. Dalam proses pembelajaran, guru menerapkan pendekatan dan strategi pembelajaran yang dianjurkan dalam regulasi kurikulum yang berlaku.[126]

Selain itu peneliti mencoba untuk menggali lebih dalam lagi peneliti menggunakan Teknik dokumentasi dan menghasilkan, bahwasanya MI Mma'arif Polorejo telah menyediakan sarana pembelajaran berbasis digital berupa televisi digital berbasis Android yang ditempatkan di setiap ruang kelas. Hal tersebut dibuktikan melalui dokumen inventaris sarana dan prasarana madrasah yang mencatat kepemilikan dan distribusi perangkat televisi digital sebagai media pendukung pembelajaran ada kurang lebih 100 TV berbasis Android yang terpasang di setiap kelas supaya pembelajaran memperlihatkan pemanfaatan media digital pada berbagai mata pelajaran. Pada mata pelajaran fiqih, dokumen pembelajaran menunjukkan penggunaan media digital untuk menyajikan materi tentang

[126] Lihat Transkip Observasi Nomor 02/O/MIS/13-XII/2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI MUHAMMAD BESARI PONOROGO

tata cara berwudu dan salat. Sementara itu, pada mata pelajaran IPAS, guru menunjukkan pemanfaatan media digital berupa video pembelajaran dari YouTube pada mata pelajaran IPAS dan fiqih.

Dokumen pembelajaran mencantumkan penggunaan video sebagai sumber belajar untuk menjelaskan materi tentang konsep magnet pada mata pelajaran IPAS serta tata cara solat dan wudu pada mata pelajaran fikih. Selain itu, dokumentasi pembelajaran menunjukkan bahwa guru mendampingi siswa dalam penggunaan televisi berbasis Android dan memberikan penjelasan lanjutan dengan mengaitkan materi video dengan buku teks. Pendampingan tersebut bertujuan untuk memperjelas materi pembelajaran dan membantu siswa memahami isi pembelajaran secara lebih sistematis.[127]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[127] Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor 06/D/MIS/13-XI/2025

# BAB V

# FAKTOR YANG MEMPENGARUHIKESENJANGAN IMPLEMENASI KURIKULUM DI MA'ARIF MOJOREJO DAN MI MA'ARIF POLOREJO

A. Faktor yang mempengaruhi kesenjangan kurikulum di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo

1. Faktor-Faktor yang mempengaruhi kesenjangan kurikulum di MI Ma'arif Mojorejo

Faktor-faktor kesenjangan implementasi kurikulum dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, salah satunya adalah ketersediaan dan kualitas modul ajar yang digunakan oleh guru. Modul ajar yang belum tersusun secara sistematis, kurang kontekstual, atau tidak sepenuhnya selaras dengan capaian pembelajaran dapat menyulitkan guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran faktor-faktor yang akan mempengaruhi kesenjangan implementasi kurikulum menurut ibu Jamilatun adalah :

> Kesenjangan implementasi kurikulum di madrasah adalah ketidaksiapan modul ajar serta perubahan kebijakan kurikulum yang relatif cepat. Ibu Jamilatu juga menyampaikan bahwa modul ajar belum sepenuhnya tertata dan kurikulum belum dapat dilaksanakan secara optimal karena masih berada dalam tahap penyempurnaan. Kondisi ini diperparah dengan adanya perubahan kebijakan kurikulum meskipun implementasi baru memasuki tahun kedua, sehingga menimbulkan kebingungan bagi guru dalam menentukan acuan pembelajaran yang digunakan. Ketidakstabilan kebijakan tersebut menyebabkan penerapan kurikulum di MI Ma'arif Mojorejo menjadi kurang maksimal dan berdampak pada terjadinya ketidaksesuaian antara perencanaan kurikulum dan pelaksanaannya di kelas.[128]

[128] Lihat Transkip Wawancara Nomor 03/W/MIS/13-XI/2025

Kesenjangan implementasi kurikulum di MI Ma'arif Mojorejo terlihat dari kesiapan perangkat pembelajaran serta dinamika kebijakan kurikulum yang terjadi dalam waktu relatif singkat. Hasil wawancara dengan guru menunjukkan bahwa pelaksanaan kurikulum masih menghadapi beberapa kendala teknis. Dari hasil wawancara dengan Ibu Jamilatuun, S.Pd terungkap bahwa salah satu kendala utama dalam menjalankan kurikulum adalah ketidaksiapan modul pengajaran. Modul pengajaran yang digunakan oleh guru belum sepenuhnya disusun dengan baik. Beberapa guru masih berada di tahap penyusunan dan penyesuaian dengan kebutuhan pembelajaran di kelas. Keadaan ini membuat proses pembelajaran tidak berjalan secara maksimal karena guru harus melakukan penyesuaian ulang pada materi dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Selain itu, perubahan kebijakan kurikulum yang cepat juga menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kurikulum. Menurut Ibu Jamilatu, kurikulum yang diterapkan di madrasah sudah berlangsung sekitar dua tahun. Namun, dalam periode itu, sejumlah penyesuaian kebijakan muncul yang harus dilakukan oleh para guru. Perubahan ini menyebabkan kebingungan bagi guru dalam menentukan acuan pembelajaran yang akan digunakan. Kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan pembelajaran di kelas. Perencanaan pembelajaran yang telah disusun sebelumnya sering kali harus disesuaikan kembali dengan kebijakan terbaru. Akibatnya, terdapat ketidaksesuaian antara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

perencanaan kurikulum dan pelaksanaan pembelajaran di kelas sehingga implementasi kurikulum di madrasah belum berjalan secara maksimal.

Dari wawancara kami dengan Ibu Jamilatun, S.Pd telah di temukan sebuah temuan dari penelitian yang menunjukkan bahwa kesenjangan implementasi kurikulum di MI Ma'arif Mojorejo dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kesiapan perangkat pembelajaran dan stabilitas kebijakan kurikulum diantaranya sebagai berikut :

***Pertama***, kesiapan alat bantu belajar, khususnya modul ajar, masih belum memadai. Modul ajar adalah elemen krusial dalam perencanaan pengajaran karena berfungsi sebagai pedoman bagi guru selama proses belajar mengajar. Ketidaklengkapan modul ajar membuat guru harus melakukan penyesuaian langsung saat pelaksanaan pembelajaran. Kondisi ini mengakibatkan proses belajar menjadi kurang teratur, dan tujuan pendidikan tidak selalu dapat tercapai dengan baik,[129] dan ***Kedua***, perubahan kebijakan kurikulum yang terjadi dalam waktu singkat menimbulkan tantangan bagi para guru dalam beradaptasi. Guru perlu waktu untuk memahami ide dari kurikulum yang baru, menyusun alat bantu belajar, dan menyesuaikan metode pengajaran dengan karakteristik siswa. Apabila perubahan kebijakan kurikulum terjadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER PONOROGO

[129] George J. Posner, *Analyzing the Curriculum 2nd Ed* (New York: McGraw Hill, 1995). 95.

sebelum proses adaptasi tuntas, guru akan kesulitan untuk menemukan pedoman pembelajaran yang konsisten.[130]

Kondisi ini memperlihatkan adanya perbedaan antara kebijakan kurikulum yang ditentukan di tingkat nasional dengan persiapan pelaksanaannya di tingkat sekolah. Perbedaan ini berdampak pada tidak maksimalnya pelaksanaan kurikulum di madrasah, terutama dalam hal perencanaan dan pelaksanaan proses belajar mengajar.

Temuan dari studi ini sejalan dengan teori pelaksanaan kebijakan pendidikan yang menyebutkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kurikulum sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya, kejelasan dalam kebijakan, dan stabilitas regulasi yang mengawasi pelaksanaannya. Pelaksanaan kurikulum tidak semata-mata tergantung pada desain kebijakan, tetapi juga pada kemampuan guru untuk menerapkan kebijakan tersebut dalam proses belajar-mengajar di kelas. Di lingkungan madrasah, pelaksanaan kurikulum juga ditentukan oleh berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Kebijakan tersebut mencakup Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 mengenai Pedoman Pelaksanaan Kurikulum di Madrasah, yang menjadi landasan untuk penerapan Kurikulum 2013 di madrasah. Kemudian, pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 yang memberikan panduan untuk penerapan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[130] Fullan, *The New Meaning of Educational Change Fourth Edition*. 132

Kurikulum Merdeka di madrasah sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Perkembangan kebijakan kurikulum tersebut selanjutnya dikuatkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 1503 Tahun 2025, yang mengatur perbaikan pelaksanaan kurikulum madrasah agar lebih responsif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebijakan ini menyoroti pentingnya pengembangan perangkat pembelajaran seperti modul ajar, jalur tujuan pembelajaran, serta perencanaan pembelajaran yang terstruktur. Akan tetapi, hasil riset menunjukkan bahwa penerapan kebijakan ini di tingkat madrasah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan kesiapan perangkat pembelajaran dan adaptasi guru terhadap perubahan kebijakan. Ini mengindikasikan bahwa suksesnya implementasi kurikulum tidak hanya bergantung pada kebijakan yang berlaku, tetapi juga pada sejauh mana madrasah mampu menerapkan kebijakan tersebut dalam proses pembelajaran.[131]

Sehingga, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa adanya kesenjangan dalam pelaksanaan kurikulum di MI Ma'arif Mojorejo disebabkan oleh perbedaan antara kebijakan kurikulum yang terus berkembang dan kesiapan guru untuk menerapkan kurikulum tersebut di lingkungan pendidikan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PONOROGO

[131] Keputusan Menteri Agama Nomor 1503 Tahun 2025 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum RA, MI, MTs, MA, dan MAK.

Hal tersebut juga disampaikan oleh waka kurikulum ibu Ria Widayati yakni :

> "Faktor utama yang mempengaruhi kesenjangan implementasi kurikulum di madrasah adalah perubahan kebijakan kurikulum yang terjadi secara berkelanjutan dan relatif cepat. Kurikulum Merdeka yang belum sepenuhnya mapan dalam pelaksanaannya kemudian diikuti dengan kebijakan Kurikulum Berbasis Cinta dan model pembelajaran *deep learning* yang harus diintegrasikan ke dalam kurikulum madrasah yang telah disusun, sehingga menimbulkan kebingungan di tingkat satuan pendidikan dan menuntut penyesuaian berulang, baik dalam penyusunan Dokumen satu maupun dalam praktik pembelajaran. Selain itu, perubahan pola pelaksanaan program pembelajaran, seperti integrasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) ke dalam aktivitas pembelajaran sehari-hari, membutuhkan waktu adaptasi, pemahaman, dan kesiapan pendidik, yang pada akhirnya memperlebar kesenjangan antara kurikulum yang direncanakan dan yang dilaksanakan di lapangan".[132]

Faktor dari kesenjangan dalam pelaksanaan kurikulum dipengaruhi oleh perubahan kebijakan kurikulum yang terjadi dengan sangat cepat. Kepala madrasah Ibu Jamilatun, S.Pd mengungkapkan bahwa lembaga pendidikan saat ini masih berada dalam proses penyesuaian terhadap Kurikulum Merdeka, sementara pada saat yang bersamaan, ada kebijakan baru yang harus diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran. Kepala Madrasah MI Ma'arif Mojorejo menyatakan bahwa perubahan dalam kebijakan kurikulum mengharuskan madrasah untuk melakukan penyesuaian berulang-ulang pada dokumen kurikulum. Ia menjelaskan bahwa kurikulum yang telah disusun sebelumnya perlu diperbarui ketika

[132] Lihat Transkip Wawancara Nomor 03/W/MIS/ 20-XI/2025.

ada kebijakan baru dari kementerian. Dia menambahkan bahwa keadaan ini mengakibatkan guru harus menyesuaikan kembali alat ajar seperti modul ajar/RPP dan dokumen kurikulum untuk tingkat satuan pendidikan.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Khorul Muntari salah satu guru MI Ma'arif Mojorejo. Beliau menjelaskan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka masih dalam tahap pemahaman oleh para guru, namun sudah ada kebijakan tambahan seperti Kurikulum Berbasis Cinta dan pendekatan pembelajaran *deep learning*. Beliau juga menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak menghapus kurikulum yang lama, melainkan harus diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Keadaan ini mengharuskan guru untuk menyesuaikan kembali rencana pembelajaran yang sudah ada.

Berdasarkan paparan data diatas dapat diketahui bahwa perubahan kebijakan kurikulum yang berlangsung secara berkelanjutan menuntut madrasah untuk melakukan penyesuaian secara berulang. Kondisi ini berdampak pada penyusunan dokumen kurikulum serta pelaksanaan pembelajaran di kelas

Faktor kesenjangan implementasi kurikulum di MI Ma'arif Mojorejo juga bisa dipengaruhi oleh keterbatasan sarana prasarana, hal ini disampaikan oleh Ibu Khoirul Muntari adalah sebagai berikut :

> Keterbatasan sarana dan prasarana membuat guru belum dapat mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran sebagaimana dianjurkan dalam kurikulum, namun guru tetap berupaya mengimplementasikan prinsip pembelajaran Kurikulum Merdeka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

yang berpusat pada peserta didik dan bersifat kontekstual. Pada mata pelajaran IPAS, khususnya materi budidaya ikan, hewan, dan fotosintesis, guru mengajak siswa melakukan observasi langsung di lapangan, seperti ke kolam ikan, kandang, dan sawah, sehingga pembelajaran tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memberikan pengalaman belajar nyata. Dalam kegiatan tersebut, guru berperan sebagai fasilitator dengan memberikan pendampingan dan arahan agar siswa memahami konsep secara lebih konkret meskipun dalam kondisi keterbatasan sarana dan prasarana.[133]

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Khoirul Muntari menyampaikan bahwa kurangnya fasilitas dan perlengkapan masih menjadi hambatan dalam penggunaan media pembelajaran di MI Ma'arif Mojorejo. Situasi ini menyebabkan para guru belum bisa memanfaatkan berbagai media pembelajaran dengan semaksimal mungkin sesuai yang diharapkan dalam Kurikulum Merdeka. Namun, para guru tetap berusaha melaksanakan pembelajaran yang fokus pada siswa dan menghubungkan materi dengan kondisi di sekitar mereka agar proses belajar tetap relevan dan memiliki arti bagi para siswa. Beliau juga menjelaskan bahwa dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, khususnya mengenai budidaya ikan, hewan, dan proses fotosintesis, para guru memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber untuk belajar.

Para guru mengajak siswa untuk melakukan kegiatan observasi langsung di lapangan, seperti melihat kolam ikan, kandang hewan ternak, dan area persawahan yang ada di sekitar madrasah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[133] Lihat Transkip Wawancara Nomor 03/W/MIS/12-XII/2025.

Dengan cara ini, siswa dapat mengamati secara langsung objek yang sedang dipelajari sehingga pemahaman mereka mengenai konsep menjadi lebih jelas. Dalam pelaksanaan tersebut, guru berfungsi sebagai pembimbing yang memberikan petunjuk dan dukungan selama observasi. Guru membantu siswa untuk melihat objek, mengajukan pertanyaan, dan mengaitkan hasil pengamatan tersebut dengan konsep yang sedang dibahas. Dengan pendekatan ini, pembelajaran tidak hanya terjadi secara teoritis di ruang kelas, tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada siswa meskipun dalam keadaan terbatasnya sarana dan prasarana dari keterbatasan sarana dan prasarana inilah ynag menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi kesenjangan implementasi kurikulum.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa guru telah melakukan penyesuaian materi ajar dengan kondisi dan kemampuan siswa dalam proses pembelajaran. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan awal siswa, namun tetap mengacu pada materi pokok yang telah ditetapkan dalam Kurikulum Merdeka. Dalam praktiknya, guru berupaya mengkolaborasikan kebutuhan belajar siswa dengan tuntutan pencapaian materi, mengingat adanya standar kompetensi yang harus dipenuhi. Meskipun Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada guru dalam menentukan target pembelajaran,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

guru tetap menetapkan standar materi tertentu agar selaras dengan kebutuhan evaluasi dan ujian yang harus diikuti oleh siswa.[134]

Hasil dari oberasi yang dilakukan peneliti di kelas menunjukkan bahwa guru telah menyesuaikan materi pengajaran dengan kondisi belajar para siswa. Ketika proses belajar mengajar berlangsung, guru terlebih dahulu mengevaluasi kemampuan awal siswa melalui pertanyaan lisan dan diskusi singkat. Langkah ini diambil untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa sebelum memulai materi utama. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru tidak langsung menyampaikan semua materi sekaligus, tetapi memilih bagian-bagian materi yang dinilai paling sesuai dengan kemampuan siswa. Materi yang diajarkan tetap merujuk pada topik yang terdapat dalam perangkat pembelajaran seperti modul ajar yang disusun berdasarkan Kurikulum Merdeka. Peneliti juga mencatat bahwa guru sering kali memberikan contoh-contoh sederhana yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa agar materi lebih mudah dipahami.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan kurikulum di MI Ma'arif Polorejo

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan implementasi kurikulum dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, salah satunya adalah kesiapan guru dalam menghadapi perubahan kurikulum. Perbedaan tingkat pemahaman dan kompetensi guru dalam

[134] Lihat Transkip Observasi Nomor 04/O/MIS/20-XII/2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

menerjemahkan kebijakan kurikulum ke dalam perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan asesmen menjadi faktor utama munculnya kesenjangan implementasi kurikulum menurut bapak Suyono adalah sebagai berikut :

> "Kesiapan guru dalam menghadapi perubahan kurikulum. Guru dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan kurikulum baru, seperti pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Rahmatan lil 'Alamin (P5RA), yang memerlukan kesiapan media, peralatan, serta perencanaan pembelajaran yang lebih matang. Persiapan tersebut membutuhkan waktu yang tidak sedikit, sehingga berimplikasi pada keterlambatan penyelesaian materi pembelajaran sesuai target kurikulum. Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara perencanaan kurikulum dan pelaksanaannya di kelas. Selain itu, masih ditemukannya guru yang bertahan pada metode pembelajaran konvensional, seperti ceramah, turut memperlebar kesenjangan implementasi kurikulum. Oleh karena itu, bapak kepala madrasah Bapak Ahmad Suyono, S.Pd menekankan pentingnya pelatihan guru sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan dalam mengimplementasikan kurikulum secara optimal".[135]

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala madrasah dan beberapa pengajar di MI Ma'arif Polorejo, didapatkan informasi bahwa adanya perubahan kurikulum memerlukan kesiapan guru dalam berbagai aspek pembelajaran. Para guru tidak hanya perlu menyesuaikan perangkat pengajaran seperti modul dan ATP, tetapi juga harus mempersiapkan kegiatan belajar yang berbasis proyek melalui pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Rahmatan lil 'Alamin (P5RA). Kepala madrasah Bapak Ahmad Suyono, S.Pd menjelaskan bahwa implementasi program P5RA memerlukan

[135] Lihat Transkip Wawancara Nomor 03/W/MIS/13-XI/2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

persiapan yang lebih rumit dibandingkan dengan metode pengajaran sebelumnya. Para guru harus menyiapkan media pembelajaran, alat praktik, serta merancang kegiatan proyek yang sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Proses ini memerlukan waktu perencanaan yang cukup panjang sehingga dalam beberapa situasi dapat berpengaruh pada keterlambatan penyelesaian materi pembelajaran yang telah menjadi target dalam kurikulum

Bapak Ahmad Suyono, S.Pd sebagai kepela madrasah juga menyampaikan bahwa modifikasi kurikulum mengharuskan para guru untuk terus belajar dan menyesuaikan cara mengajar. Namun dalam kenyataannya, tidak semua pengajar mampu beradaptasi dengan segera. Beberapa pengajar masih menggunakan metode ceramah sebagai strategi utama dalam proses belajar karena dianggap lebih praktis dan tidak memerlukan banyak persiapan media maupun kegiatan proyek. Selain itu, para guru juga menyatakan bahwa penyusunan kegiatan P5RA membutuhkan kerjasama antar guru serta ketersediaan fasilitas pendukung yang cukup. Jika perencanaan belum sepenuhnya matang, pelaksanaan proyek dapat mengurangi waktu yang tersedia untuk mengajarkan materi inti di kelas. Kondisi ini menimbulkan perbedaan antara rencana kurikulum yang telah disusun dalam perangkat pembelajaran dengan pelaksanaan yang sebenarnya di dalam kelas.

Temuan ini sejalan dengan teori kesenjangan kurikulum yang dikemukakan oleh John I. Goodlad, yang menyatakan bahwa perbedaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

antara *intended curriculum dan implemented curriculum* sering kali dipengaruhi oleh keterbatasan pelaksana kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Selain itu, masih ditemukannya guru yang bertahan pada metode pembelajaran konvensional, seperti ceramah, in menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan kurikulum yang menekankan pembelajaran aktif dan praktik pembelajaran di kelas..[136]

Oleh sebab itu, Bapak Ahmad Suyono, S.Pd menekankan bahwa pelatihan dan bimbingan untuk para guru itu sangat penting. Guru diharapkan mampu memperdalam pemahaman pengajar mengenai penerapan kurikulum, pengembangan pembelajaran yang berfokus pada proyek, serta penerapan metode pengajaran yang lebih beragam dan efisien.

Hal ini juga disampaikan oleh waka kurikulum Ibu Ema Fatmawati bahwasanya :

> "Perubahan kebijakan kurikulum yang terjadi secara relatif cepat menuntut madrasah untuk melakukan penyesuaian berkelanjutan dalam perencanaan, perangkat pembelajaran, dan sistem evaluasi. Perubahan ini tidak dipandang sebagai beban, melainkan sebagai keharusan strategis agar madrasah mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tetap memiliki daya saing. Namun, keterbatasan waktu sosialisasi dan pendampingan menyebabkan implementasi kurikulum belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan desain ideal, sehingga masih terdapat kesenjangan antara kurikulum tertulis dan praktik pembelajaran di madrasah".[137]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[136] John I. Goodlad, *Curriculum Inquiry: The Study of Curriculum Practice* (New York: McGraw-Hill Book Company, 1979), 210-211.

[137] Lihat Transkip Wawancara Nomor 05/W/MIS/13-XI/2025.

Perubahan kebijakan kurikulum yang terjadi secara relatif cepat menuntut madrasah melakukan penyesuaian berkelanjutan dalam perencanaan, perangkat pembelajaran, dan sistem evaluasi sebagai langkah strategis agar tetap adaptif dan berdaya saing. Namun, keterbatasan waktu sosialisasi dan pendampingan menyebabkan implementasi kurikulum belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan desain ideal. Berdasarkan teori *Street-Level Bureaucracy* (*Lipsky*), guru dan waka kurikulum sebagai pelaksana kebijakan di tingkat lapangan memiliki ruang diskresi dalam menerjemahkan kebijakan sesuai dengan kondisi dan keterbatasan yang dihadapi. Diskresi tersebut memunculkan penyesuaian dalam praktik pembelajaran yang berdampak pada kesenjangan antara kurikulum tertulis dan implementasinya di madrasah.[138]

Selain pemaparan dari Ibu Ema Fatmawati dan Bapak Ahmad Suyono ada lagi pemaran dari ibu Ayati Robiah yang menyatakan :

> "Keterbatasan pemahaman dan kesiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum yang baru belum sepuhnya optimal. Meskipun telah mengikuti kegiatan sosialisasi atau pelatihan, pemahaman guru terhadap konsep, pendekatan pembelajaran, dan sistem asesmen dalam kurikulum yang belum merata. sebagian guru masih mengalami kebingungan dalam menerjemahkan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran di kelas. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan pembelajaran cenderung menyesuaikan dengan kebiasaan lama, sehingga tujuan dan karakteristik kurikulum yang diharapkan belum sepenuhnya terwujud. Mungkin karena hal ini dipengaruhi oleh perubahana kurikulum bagitu cepat dan tidak bisa dipungkiri bahwasanya guru akan mengalami kewalahan meskipun menutut ibu waka kurikulum

[138] Michael Lipsky, *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services* (New York: Russell Sage Foundation, 1980), 5.

itu bukan sebagai beban guru tetapi dengan rotasi pergantian kurikulum yang begitu cepat itu akan membuat guru secara tidak langsung akan kewalahan juga .”.[139]

Keterbatasan pemahaman dan kesiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum yang baru belum sepuhnya optimal. Meskipun telah mengikuti kegiatan sosialisasi atau pelatihan, pemahaman guru terhadap konsep, pendekatan pembelajaran, dan sistem asesmen dalam kurikulum yang belum merata. sebagian guru masih mengalami kebingungan dalam menerjemahkan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran di kelas. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan pembelajaran cenderung menyesuaikan dengan kebiasaan lama, sehingga tujuan dan karakteristik kurikulum yang diharapkan belum sepenuhnya terwujud. Mungkin karena hal ini dipengaruhi oleh perubahana kurikulum bagitu cepat dan tidak bisa dipungkiri bahwasanya guru akan mengalami kewalahan

Informasi serupa juga diutarakan oleh Wakil Kepala Madrasah yang bertanggung jawab di bidang Kurikulum. Ia mengungkapkan bahwa pihak madrasah telah berusaha memberikan pemahaman melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Namun, perubahan kurikulum yang terjadi dengan cepat memaksa para guru untuk terus menyesuaikan dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Menurutnya, pergantian kurikulum bukanlah beban bagi guru, tetapi merupakan suatu kebijakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas

[139] Lihat Transkip Wawancara Nomor 09/W/MIS/ 26-XII/2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER PONOROGO

pendidikan. Meskipun demikian, perubahan yang terjadi secara berulang tetap membutuhkan kesiapan dan adaptasi guru dalam waktu yang singkat.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kurangnya pemahaman tentang konsep kurikulum, pendekatan pembelajaran, dan sistem asesmen merupakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kurikulum di madrasah. Selain itu, perubahan kurikulum yang berlangsung dengan cepat juga mengharuskan guru untuk melakukan penyesuaian yang berkelanjutan. Hal ini menyebabkan sebagian guru masih merasa bingung dalam menerapkan kurikulum secara efektif, sehingga pelaksanaan pembelajaran di kelas dalam beberapa keadaan masih beradaptasi dengan kebiasaan belajar yang lama.

Pergantian kurikulum yang berlangsung relatif cepat berdampak pada belum optimalnya implementasi kurikulum di MI Ma'arif Polorejo. Kondisi ini diperkuat oleh temuan dalam dokumen kebijakan serta laporan kegiatan pelatihan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara penetapan kebijakan di tingkat pusat dengan kesiapan pelaksanaan di tingkat satuan pendidikan. Guru memerlukan waktu adaptasi yang cukup panjang untuk menguasai satu kurikulum, namun perubahan kebijakan sering terjadi sebelum proses adaptasi tersebut selesai. Selain itu, tuntutan kurikulum yang memerlukan dukungan sarana dan teknologi tertentu belum sepenuhnya didukung oleh kondisi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

fasilitas madrasah, sehingga memunculkan kesenjangan antara kurikulum tertulis dan kurikulum yang diimplementasikan.[140]

Pergantian kurikulum yang relatif cepat menyebabkan implementasi kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah belum berjalan optimal. Dokumen kebijakan dan laporan pelatihan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara penetapan kebijakan di tingkat pusat dan kesiapan pelaksanaan di tingkat daerah, baik dari aspek waktu adaptasi guru maupun ketersediaan sarana pendukung. Kondisi ini mencerminkan kesenjangan implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Pressman dan Wildavsky, yaitu ketika kebijakan yang dirumuskan tidak sepenuhnya selaras dengan kapasitas dan sumber daya pelaksana di tingkat satuan pendidikan.[141]

Berdasarkan hasil studi dokumentasi diatas pergantian kurikulum yang berlangsung relatif cepat menyebabkan implementasi kurikulum di MI Ma'arif Polorejo belum berjalan optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kurikulum ideal dan kurikulum tertulis, serta antara kurikulum tertulis dan kurikulum yang diimplementasikan, sebagaimana dikemukakan oleh Van den Akker. Dokumen kebijakan dan laporan pelatihan memperlihatkan bahwa perubahan kebijakan tidak selalu diiringi dengan kesiapan guru dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

[140] Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor 07/S/MIS/26-XII/2025.

[141] Pressman and Wildavsky, *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland*, 6.

dukungan sarana yang memadai. Akibatnya, kurikulum yang dirancang secara konseptual tidak sepenuhnya terwujud dalam praktik pembelajaran di kelas.[142]

Kurikulum yang dirancang secara konseptual tidak sepenuhnya terwujud dalam praktik pembelajaran karena adanya perbedaan antara kebijakan dan kondisi nyata di sekolah. Keterbatasan pemahaman guru, proses adaptasi yang belum selesai, dukungan pelatihan yang masih terbatas, serta keterbatasan sarana pembelajaran menyebabkan implementasi kurikulum di kelas tidak selalu sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

[142] Akker, *Curriculum Perspectives: An Introduction*, 3.

# BAB VI

# IMPLIKASI KESENJANGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM DI MI MA'ARIF MOJOREJO DAN MI MA'ARIF POLOREJO

Kesenjangan dan dampak implementasi kurikulum di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'rif Polorejo sebagaimana dalam Bagan sinkronisasi ini yang menggambarkan keterkaitan antara kebijakan kurikulum madrasah swasta di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo dan proses implementasi kurikulum di tingkat satuan pendidikan, serta kesenjangan implementasi yang muncul dalam praktik pembelajaran di madrasah.serta munculnya kesenjangan dalam implementasinya. Pada bagian awal ditunjukkan bahwa pelaksanaan kurikulum di madrasah berlandaskan pada kebijakan kurikulum madrasah yang ditetapkan oleh pemerintah melalui regulasi resmi, yaitu Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Struktur Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab serta Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 tentang Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Kedua kebijakan tersebut menjadi landasan normatif dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menetapkan kerangka dasar yang kemudian diterjemahkan ke dalam struktur implementasi kurikulum di tingkat satuan pendidikan.

Struktur implementasi tersebut mencakup beberapa komponen utama, yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. Ketiga komponen ini menjadi tahapan penting dalam proses penerapan kurikulum karena menentukan bagaimana kebijakan yang bersifat konseptual dapat diterapkan dalam praktik pembelajaran di kelas. Struktur implementasi kurikulum tersebut kemudian diwujudkan dalam pelaksanaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

pendidikan di madrasah yang dalam penelitian ini difokuskan pada dua lembaga, yaitu MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo. Kedua madrasah tersebut menjadi lokasi penelitian implementasi kebijakan kurikulum sekaligus objek analisis untuk melihat bagaimana kebijakan kurikulum diterapkan dalam praktik pembelajaran. Dalam proses implementasinya, kedua madrasah dianalisis melalui berbagai aspek implementasi yang meliputi pemahaman terhadap tujuan perubahan kurikulum, metode pembelajaran yang digunakan, kondisi lingkungan belajar, kepemimpinan kepala madrasah, kompetensi guru, ketersediaan sarana prasarana, serta kemampuan guru dalam beradaptasi terhadap perubahan kurikulum.

Pada MI Ma'arif Mojorejo, tujuan perubahan kurikulum belum dipahami secara merata oleh seluruh guru sehingga berdampak pada variasi pemahaman dalam pelaksanaan pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan masih tergolong sederhana dan guru masih mengalami kesulitan dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi. Meskipun demikian, lingkungan belajar di madrasah tersebut cukup kondusif untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Kepala sekolah juga berperan aktif dalam mengontrol berbagai program yang berkaitan dengan implementasi kurikulum. Dari sisi kompetensi, guru memiliki kemampuan pedagogik yang cukup baik, namun kompetensi dalam bidang teknologi informasi masih relatif rendah. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Secara umum, implementasi yang dilakukan di MI Ma'arif Mojorejo diarahkan untuk mewujudkan madrasah yang islami dan berprestasi. Berbeda dengan kondisi tersebut, implementasi kurikulum di MI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Ma'arif Polorejo menunjukkan kesiapan yang relatif lebih baik dalam beberapa aspek.

Tujuan perubahan kurikulum sudah lebih stabil dan telah menyesuaikan dengan ketentuan dalam KMA 450 Tahun 2024. Dokumen kurikulum yang dimiliki madrasah juga relatif lengkap dan tersusun secara sistematis sehingga memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Selain itu, sarana dan prasarana pembelajaran di madrasah ini tergolong lebih memadai, seperti tersedianya televisi Android, LCD, serta fasilitas lain yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi. Madrasah juga memperoleh akses pelatihan dan pendampingan dari kepala madrasah maupun pengawas sehingga guru memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya. Kepemimpinan yang diterapkan bersifat inovatif dan adaptif terhadap perubahan kebijakan pendidikan. Kondisi tersebut mendorong guru untuk lebih adaptif dalam menghadapi perubahan kurikulum. Dampaknya terlihat pada variasi metode pembelajaran yang digunakan oleh guru serta berkembangnya pembelajaran berbasis proyek sebagai salah satu pendekatan dalam Kurikulum Merdeka.

Meskipun kedua madrasah telah melaksanakan implementasi kurikulum berdasarkan kebijakan yang berlaku, hasil analisis menunjukkan masih terdapat kesenjangan implementasi dalam praktik pembelajaran. Pada MI Ma'arif Mojorejo, kesenjangan tersebut terlihat dari beberapa kondisi, antara lain pemahaman teknis guru terhadap kurikulum yang belum merata, kesulitan dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi serta penilaian autentik, dan keterbatasan pelatihan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

diikuti oleh guru. Supervisi akademik sebenarnya telah dilaksanakan secara terjadwal dan rutin oleh kepala madrasah, namun upaya pembinaan terhadap guru masih perlu terus dilakukan agar pemahaman dan keterampilan guru semakin meningkat. Selain itu, kompetensi teknologi informasi guru masih tergolong rendah sehingga pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran belum optimal. Pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Guru juga belum berjalan secara maksimal sehingga proses berbagi pengalaman dan peningkatan kompetensi profesional belum berlangsung secara efektif. Kondisi tersebut menyebabkan variasi metode pembelajaran yang digunakan oleh guru masih terbatas.

Sementara itu, kesenjangan implementasi di MI Ma'arif Polorejo muncul dalam bentuk yang berbeda. Meskipun dokumen kurikulum telah disusun dengan baik, integrasi antara tujuan kurikulum nasional dan tujuan lokal madrasah belum sepenuhnya konsisten dalam praktik pembelajaran. Selain itu, masih ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan kurikulum dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Pemanfaatan media teknologi informasi juga belum digunakan secara maksimal oleh seluruh guru meskipun sarana pendukung sudah tersedia. Supervisi akademik telah dilaksanakan secara rutin oleh kepala madrasah, namun masih terdapat perbedaan pemahaman guru terhadap konsep kurikulum yang diterapkan. Partisipasi guru dalam pengembangan perangkat pembelajaran juga belum merata sehingga kualitas perangkat pembelajaran yang dihasilkan masih bervariasi. Di samping itu, pelaksanaan proyek pembelajaran sebagai bagian dari pendekatan Kurikulum Merdeka belum memiliki ukuran yang jelas dalam perencanaan maupun evaluasinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

Oleh karena itu, bagan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kurikulum yang berawal dari kebijakan nasional kemudian diterjemahkan dalam struktur implementasi di madrasah, dilaksanakan dalam berbagai aspek pembelajaran, dan pada akhirnya menghasilkan dinamika praktik yang berbeda di setiap madrasah sehingga memunculkan kesenjangan implementasi yang perlu dianalisis dan diperbaiki dalam proses pengembangan kurikulum di tingkat satuan pendidikan.

Dari peryataan diatas dapat dideskripsikan bahwa Implementasi kurikulum di madrasah dimulai dari kebijakan yang ditentukan pemerintah melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 mengenai Struktur Kurikulum PAI dan Bahasa Arab serta Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 tentang Penerapan Kurikulum Merdeka di Madrasah. Kebijakan ini kemudian dilaksanakan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pembelajaran di madrasah. Hasil dari penerapan di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo memperlihatkan adanya variasi kondisi yang dipengaruhi oleh pemahaman para guru, metode pengajaran yang digunakan, kompetensi guru, kepemimpinan kepala madrasah, serta ketersediaan fasilitas. Variasi ini menyebabkan pelaksanaan kurikulum belum sepenuhnya sesuai dengan rencana yang tercantum dalam dokumen kurikulum. Dengan demikian, bagan sinkronisasi ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan kurikulum telah disusun dengan teratur, dalam praktiknya masih ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaan yang dipengaruhi oleh kesiapan guru serta kondisi madrasah dalam menjalankan proses pembelajaran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

Berikut adalah bagan dari kesenjangan dan dampak kesenjangan implemenatasi kurikulum di MI Ma'arif Mojorejo dan MI Ma'arif Polorejo.

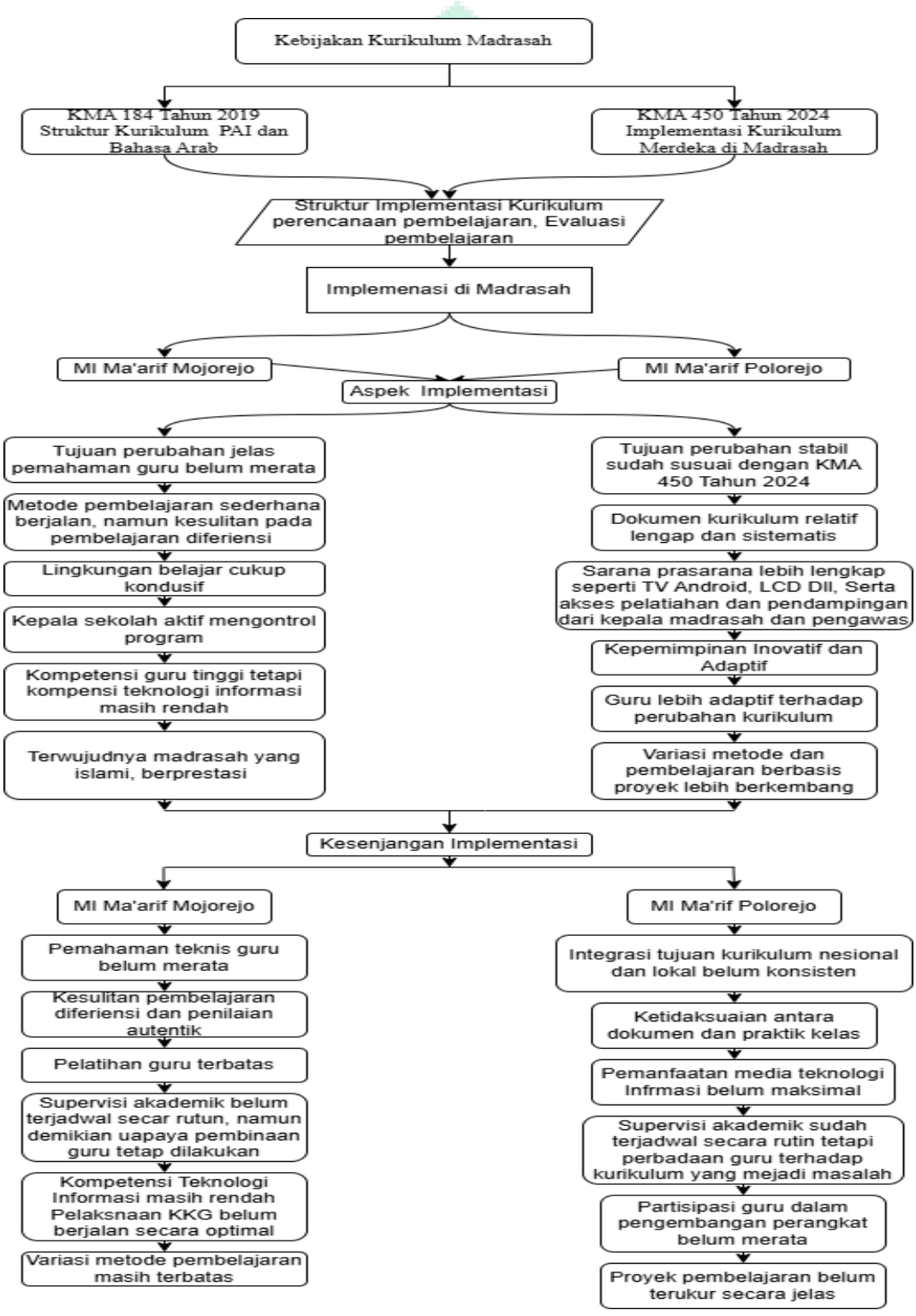

# BAB VII

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. kebijakan penerapan kurikulum di kedua madrasah pada dasarnya mengacu pada regulasi nasional, yaitu Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka yang ditetapkan pemerintah. Implementasi kurikulum tersebut disesuaikan dengan karakteristik madrasah swasta yang berada di bawah naungan LP Ma'arif NU. Namun dalam praktiknya terdapat perbedaan tingkat keterlaksanaan antara kedua madrasah. MI Ma'arif Mojorejo telah menerapkan kurikulum nasional, tetapi masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait kesiapan perangkat pembelajaran, keterbatasan sarana prasarana, serta proses adaptasi terhadap perubahan kebijakan kurikulum. Sementara itu, MI Ma'arif Polorejo menunjukkan implementasi yang relatif lebih sistematis karena dokumen kurikulum tersusun lebih lengkap dan didukung oleh sarana prasarana yang lebih memadai sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lebih sesuai dengan perencanaan kurikulum.
2. kesenjangan implementasi kurikulum di kedua madrasah dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Faktor tersebut meliputi pemahaman guru terhadap konsep dan tujuan kurikulum, variasi kompetensi guru dalam menerapkan metode pembelajaran, kepemimpinan kepala madrasah dalam mengarahkan kebijakan pendidikan, serta ketersediaan fasilitas pembelajaran. Perbedaan kondisi sumber daya manusia dan dukungan fasilitas menyebabkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
PONOROGO

implementasi kurikulum tidak selalu berjalan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disusun

3. kesenjangan implementasi kurikulum berdampak pada variasi praktik pembelajaran di kelas. Perbedaan pemahaman guru, penggunaan media pembelajaran, serta strategi pembelajaran yang digunakan menyebabkan hasil implementasi kurikulum tidak sepenuhnya seragam. Dalam beberapa kasus, pembelajaran masih berfokus pada penyampaian materi sehingga tujuan kurikulum yang menekankan pembelajaran aktif dan pengembangan kompetensi siswa belum sepenuhnya tercapai secara optima

B. Saran

1. Bagi Pengelola Madrasah (Kepala Madrasah dan Yayasan)

   Pihak madrasah disarankan untuk memperkuat perencanaan dan pengelolaan kurikulum melalui penyusunan program yang sistematis, pelaksanaan supervisi pembelajaran secara rutin, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kurikulum. Penguatan manajemen madrasah berbasis sekolah/madrasah perlu dioptimalkan agar pelaksanaan kurikulum dapat berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

2. Bagi Guru

   Guru diharapkan dapat terus mengembangkan kompetensi profesional dan pedagogiknya melalui kegiatan pelatihan, lokakarya, serta keikutsertaan dalam komunitas belajar guru seperti KKG atau MGMP. Pemahaman yang mendalam terhadap kurikulum, penyusunan perangkat pembelajaran, serta penerapan strategi pembelajaran inovatif perlu ditingkatkan guna

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

mengurangi kesenjangan antara kurikulum yang dirancang dengan praktik pembelajaran di kelas.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup lokasi dan pendekatan metodologis. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian, menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran .

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

# DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rapanna. Makassar: Cv Syakir Media Press, 2021.

Ainy, Farhany Zahra Qurrata, and Anne Effane. "Peran Kurikulum Dan Fungsi Kurikulum." *Karimah Tauhid : Karya Ilmiah Mahasiswa Bertauhid* Vol 2 No 1 (2023): 153–156. https://doi.org/https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i1.7712.

Akker, Jan van den. *Curriculum Perspectives: An Introduction*. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2003.

Alexander, William M., and J Galen Saylor. *Curriculum Planning for Better Teaching and Learning*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1954.

Alfansyur, Andarusni, and Mariyani Mariyani. "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial." *HISTORIS : Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* Vol 5 No 2 (2020): 146–50. https://doi.org/https://doi.org/10.31764/historis.v5i2.3432.

Arikunto, Suharmisi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Babbie, Earl. *The Practice of Social Research*. Canada: Cengage Learning, 2016.

Batara, Dika Raihan, Ramadhania Ardiansyah, Yoga Bonfilio Brady Yanwas, Nabil Naumi, Rafli Achmad Slamet, and Ahman. "Langkah-Langkah Menentukan Populasi Dan Sampel Yang Tepat Dalam Penelitian." *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia* Vol 4 No 2 (2025): 682 – 689.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpion.v4i2.457.

Bogdan, Robert C., and Sari Knopp Biklen. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods (2nd Ed.)*. Boston: Allyn and Bacon, 1992.

Carl, Arend E. *Teacher Empowerment Through Curriculum Development: Theory into Practice*. Cape Town, Afrika Selatan: Juta & Co., Ltd, 1995.

Citriadin, Yudin. *Metode Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Dasar*. Edited by Lubna. Mataram: Sanabil, 2020.

Creswell, John W, J. David Creswell. *Qualitative Inquiry, Quantitative, and Research Design Choosing Among Five Approaches. 3rd Ed*. California: SAGE Publications, 2016.

Creswell, John W. *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches*. California: SAGE Publications, 2007.

Dunsire, Andrew. *Implementation, Control and Change*. Oxford, Inggris: Martin Robertson, 1978.

Fachreza, Khaidir. "Analisis Komparatif Antara Probability Dan Nonprobability Dalam Penelitian Pemasaran." *MEGA: Jurnal Pendidikan Matematika* Vol 5 No 2 (2024): 751–60. https://doi.org/https://doi.org/10.59098/mega.v5i2.1613.

Fullan, Michael. *Successful School Improvement: The Implementation Perspective and Beyond*. Maidenhead, Berkshire, United Kingdom.: Open University Press, 1992.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

———. *The New Meaning of Educational Change*. Columbia University, New York: Teachers College Press, 1991.

———. *The New Meaning of Educational Change Fourth Edition*. New York: Teachers College Press, 2007.

Goodlad, John I. *Curriculum Inquiry: The Study of Curriculum Practice*. New York: McGraw-Hill, 1979.

———. *Curriculum Inquiry: The Study of Curriculum Practice*. New York: McGraw-Hill Book Company, 1979.

Hall, George E., and Susan M. Hord. *Change in Schools: Facilitating the Process*. New York: SUNY Press, 1987.

Hamalik, Oemar. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Edited by Boyke Ramdhani. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.

Haryono, Eko. "Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam." *Jurnal Ilmiah An-Nuur* Vol 13 No (2023): 1–6. https://doi.org/https://doi.org/10.58403/annuur.v13i2.301.

Hasanah, Dwi Umul, Miladina Nur Khasanah, and Desty Putri Hanifah. "Analisis Tantangan Dan Hambatan Penerapan Kurikulum 2013 Di MI Ma'arif Budiluhur Kertek." *Waspada : Jurnal Wawasan Pengembangan Pendidikan* Vol 11 No (2023): 23–29. https://doi.org/https://doi.org/10.61689/waspada.v11i1.404.

Hill, Michael, and Peter Hupe. *Implementing Public Policy*. California: SAGE Publications, 2002.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PONOROGO

Huberman, Matthew B. Miles and A. Michael. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. United States of America: SAGE Publications, 2014.

Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 Tentang Kurikulum Pada Madrasah, Pub. L. No. 184 (2019). https://www.mtsypkpsentani.sch.id/read/5/kma-184-tahun-2019-pedoman-implementasi-kurikulum-pada-madrasah.

Khojanah, Siti. "Analisis Swot Dalam Pembelajaran Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Di Mi Ma'arif Nu Pandansari Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga (Tesis, Master)." Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Lawton, Denis, Peter Gordon, Maggie Ing, Bill Gibby, Richard Pring, and Terry Moore. *Theory and Practice of Curriculum Studies*. London: Routledge & Kegan Paul, 1978.

Lincoln, Yvonna S., and Egon G. Guba. *Naturalistic Inquiry*. Newbury Park: SAGE Publications, 1985.

Lipsky, Michael. *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. New York: Russell Sage Foundation, 1980.

Machi, Lawrence A., and Brenda T. McEvoy. *The Literature Review 3 Rd Ed.* California: Corwin A SAGE Company, 2016.

Masruhin, Seorang. "Implementasi Kurikulum 2013 Di Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Semarang." *Jurnal Pembinaan : Pendidikan Agama Islam* Vol 3 No 1 (2020): 85–109. https://doi.org/https://doi.org/10.37092/ej.v3i1.220.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Mubarok, Laeli. "Implementasi Penilaian Autentik Kurikulum 2013 Di Mi Maarif Nu Karangdadap Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas (Thesis, Master)." Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2022.

Murdiyanto, Eko. *Penelitian Kualitatif Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal*. Yogyakarta: LP2M UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020.

Naldi, Anri, Neng Nurcahyati Sinulingga Lubis, and Putri Handayani. "Analisis Perkembangan Dan Pelaksanaan Kurikulum Di Mis Elsusi Medina." *Paedagoria : Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Kependidikan* Vol 14 No (2023): 292–300. https://doi.org/10.31764.

Nasir, Muhammad, and Muhammad. "Analisis Perkembangan Kurikulum Di Indonesia : Masa Lalu, Kini, Dan Masa Depan." *Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran* Vol 4 No 2 (2024): 228–36. https://doi.org/https://doi.org/10.51878/learning.v4i2.2846.

Nasution, S. *Asas-Asas Kurikulum*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.

Nur Fajriani, Wiyanda Vera, Muhammad Wahyu Ilhami, Arivan Mahendra, Muhammad Win Afgani, and Rusdy Abdullah Sirodj. "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Vol 10 No 1 (2024): 826–33. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Ornstein, Allan C., and Francis P. Hunkins. *Curriculum: Foundations, Principles, and Issues (7th Ed.)*. New York: Pearson, 2018.

*Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013*, 2013. https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/Permendikbud67-2013KD-StrukturKurikulum-SD-MI.pdf.

*Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013*, 2013. https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/Permendikbud81A-2013ImplementasiK13Lengkap.pdf.

Posner, George J. *Analyzing the Curriculum 2nd Ed*. New York: McGraw Hill, 1995.

Pressman, Jeffrey L., and Aaron Wildavsky. *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland*. Los Angeles: Universitas Of California Press, 1984.

Ramadani, Ulva Putri, Raudhatul Muthmainnah, Nisa Ul Hilma, Azzah Wazabirah, Rully Hidayatullah, and Harmonedi Harmonedi. "Strategi Penentuan Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian Pendidikan: Antara Validitas Dan Representativas." *QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* Vol 3 No 2 (2025): 574–585. https://doi.org/https://doi.org/10.61104/jq.v3i2.1021.

Rangkuti, Ahmad Nizar. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, Dan Penelitian Pengembangan*. Edited by Mara Samin Lubis. Bandung: Citra Pustaka Media, 2016.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

Rogers, Everett M. *Diffusion of Innovations (5th Ed.).* New York: Free Press, 2003.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2021.

———. *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Interpretif Dan Konstruktif)*. Bandung: Alfabeta, 2022.

Suyono, Ahmad. "MI Ma`arif Polorejo," 2022. https://mipolorejo.maarifponorogo.sch.id/.

Tyler, Ralph W. *Basic Principles of Curriculum and Instruction*. London: The University of Chicago Press, 1949.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pub. L. No. 20 (2003). https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU20-2003Sisdiknas.pdf.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

## LAMPIRAN

A. Ini merupakan sebuah foto penelitian di MI Ma'arif Mojorejo Jetis Ponorogo bersama Ibu Jamilatun Sebagai Kepela sekolah, Ibu Ria Widayati Sebagai Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum, dan Ibu Khorul Muntari Sebagai Guru Mapel.

*Gambar 1 Inilah foto bersama kepala sekolah MI Ma'arif Mojorejo Ibu Jamilatun Waka Kurikulum Ibu Ria Widayati dan Guru Mapel Ibu Khoirul Muntari di MI Ma'rif Mojorejo Jetis*

Dari penelitian yang berlansung beberapa bulan ini telah mendapatkan hasil bahwasanya wawancara yang dilakukan dengan kepala madrasah dan guru, pengamatan langsung di kelas, serta analisis dokumen kurikulum, dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan kurikulum di MI Ma'arif Mojorejo telah mengacu pada ketentuan nasional. Madrasah menerapkan Kurikulum 2013 dan mulai beradaptasi dengan Kurikulum Merdeka secara bertahap. Dokumen kurikulum tersusun lengkap, mencakup visi misi, struktur kurikulum, perangkat ajar, serta integrasi program keagamaan seperti tahfidz dan pembiasaan ibadah harian dari hasil wawancara ini menunjukkan bahwa kepala madrasah menjalankan fungsi kepemimpinan secara aktif dalam mengarahkan kebijakan kurikulum. Guru didorong mengikuti pelatihan dan forum KKG. Secara umum guru memahami arah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI MUHAMMAD BESARI PONOROGO

dan tujuan kurikulum. Namun, pada tahap teknis masih ditemukan perbedaan tingkat penguasaan, terutama dalam penerapan pembelajaran berbasis proyek, strategi diferensiasi, dan penilaian autentik. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara pemahaman normatif dan praktik di ruang kelas.

Observasi pembelajaran memperlihatkan bahwa guru telah menerapkan pendekatan aktif dan tematik. Kegiatan diskusi, tanya jawab, dan penugasan sudah berjalan. Meski demikian, pemanfaatan media pembelajaran dan teknologi belum optimal. Karakter pembelajaran yang menuntut eksplorasi mendalam, refleksi siswa, serta penguatan profil pelajar Pancasila belum sepenuhnya terstruktur dalam setiap proses belajar.

Dokumentasi memperlihatkan ketersediaan perangkat ajar seperti RPP dan modul ajar. Program keagamaan terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler maupun kokurikuler. Sistem evaluasi dilaksanakan melalui penilaian harian, tengah semester, dan akhir semester. Akan tetapi, hasil evaluasi belum sepenuhnya dianalisis secara sistematis untuk mendukung perbaikan strategi pembelajaran berikutnya.

Secara menyeluruh, implementasi kurikulum di MI Ma'arif Mojorejo tergolong baik dari sisi administrasi dan komitmen kelembagaan. Arah kebijakan jelas dan dukungan pimpinan kuat. Namun, masih terdapat celah pada aspek teknis pelaksanaan, terutama pada inovasi pembelajaran, optimalisasi media, dan penguatan evaluasi berbasis data. Faktor yang mempengaruhi kondisi ini meliputi keterbatasan sumber daya, variasi kompetensi guru, serta proses adaptasi terhadap perubahan kebijakan yang berlangsung bertahap.

Temuan ini menegaskan bahwa MI Ma'arif Mojorejo memiliki dasar kelembagaan yang kokoh, tetapi memerlukan penguatan kapasitas implementasi agar tujuan kurikulum dapat tercapai secara maksimal dan konsisten.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO

B. Ini merupakan sebuah foto penelitian di MI Ma'arif Polorejo Babadan Ponorogo bersama Ibu Ahmad Suyono Sebagai Kepela sekolah, Ibu Ema Fatmawati Sebagai Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum, dan Ibu Ayati Robiah Sebagai Guru Mapel.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, pelaksanaan kurikulum di MI Ma'arif Polorejo telah merujuk pada kebijakan nasional, khususnya Kurikulum Merdeka, dengan penyesuaian terhadap karakter madrasah yang berbasis nilai Islam. Secara administratif, madrasah telah menyusun dokumen kurikulum operasional, perangkat ajar, serta modul pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumen yang tersedia menunjukkan bahwa struktur kurikulum, pembagian waktu belajar, dan program penguatan karakter telah dirancang secara terencana.

Namun demikian, hasil wawancara dengan kepala madrasah dan guru mengindikasikan bahwa pemahaman terhadap konsep dasar Kurikulum Merdeka belum sepenuhnya merata. Sebagian guru masih memandang perubahan kurikulum sebatas penyesuaian administrasi, bukan sebagai perubahan pendekatan pembelajaran. Kondisi ini berpengaruh pada praktik di kelas yang belum sepenuhnya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan berbasis proyek secara optimal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI ASEMBAGUS MUHAMMAD BESARI PONOROGO

Hasil observasi menunjukkan bahwa kegiatan belajar berlangsung tertib dan terstruktur, tetapi strategi pembelajaran masih didominasi metode yang berpusat pada guru. Pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Rahmatan lil ‘Alamin sudah berjalan, namun intensitas dan kedalaman kegiatannya masih terbatas. Nilai-nilai keislaman telah diterapkan melalui program rutin seperti tahfidz dan pembiasaan ibadah, tetapi integrasinya dalam pembelajaran intrakurikuler belum konsisten.

Dari sisi sumber daya, data wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa madrasah telah mengikuti pelatihan dan pendampingan terkait implementasi kurikulum. Akan tetapi, pelatihan tersebut belum berlangsung secara berkelanjutan. Keterbatasan sarana pendukung pembelajaran berbasis proyek juga menjadi hambatan dalam mengoptimalkan penerapan kurikulum.

Secara umum, MI Ma’arif Polorejo telah melaksanakan Kurikulum Merdeka sesuai kebijakan yang berlaku. Meskipun demikian, masih terdapat perbedaan antara perencanaan kurikulum dan praktik pembelajaran di kelas. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh tingkat pemahaman guru, kompleksitas perubahan kurikulum, serta keterbatasan dukungan teknis dan fasilitas. Dampaknya terlihat pada belum maksimalnya transformasi pembelajaran menuju model yang aktif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan kompetensi.

Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kurikulum tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan dokumen, tetapi juga oleh kesiapan guru, efektivitas kepemimpinan kepala madrasah, serta dukungan sumber daya yang memadai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO